

**MINISTRY OF AGRICULTURE
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**STUDI MENGENAI PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI:
PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
DAN KEUANGAN MIKRO PEDESAAN
DI INDONESIA**

LAPORAN UTAMA

July 2007

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

NIPPON KOEI CO., LTD.

LIST OF REPORTS

FINAL REPORT: SUMMARY

MAIN REPORT

APPENDICES

Appendix A:	Rural Microfinance
Appendix B:	Agricultural Processing
Appendix C:	Agricultural Marketing
Appendix D:	Socio-Economy and Institution

SUMMARY (Indonesian)

MAIN REPORT (Indonesian)

SOUTH SULAWESI COMPONENT:

MAIN REPORT

MAIN REPORT (Indonesian)

Jakarta, Juli 2007

Kepada YTH.
Bpk (Mr X)
Departemen Pertanian Republik Indonesia
Jl Harsono RM No. 3, Ragunan
Jakarta 12550

Menindak lanjuti permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang telah melaksanakan “Studi tentang Peningkatan Pendapatan Petani melalui Pengolahan Hasil Pertanian dan Keuangan Mikro Pedesaan” dengan mempercayakan pelaksanaan Studi tersebut kepada Japan International Corporation Agency (JICA).

Dalam pelaksanaan Studi, JICA menyeleksi dan mengirimkan Tim Studi yang diketuai oleh Mr Naoto Morioka dari Nippon Koei Co., Ltd yang berlangsung antara November 2005 hingga Juni 2007.

Tim Studi telah melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak terkait Pemerintah Indonesia dan melaksanakan survei lapangan di wilayah Studi. Setelah kembali ke Jepang, Tim Studi melakukan studi lanjutan dan mempersiapkan laporan akhir ini.

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan proyek dan mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait Pemerintah Indonesia atas kerjasama yang telah diberikan selama berlangsungnya Studi.

Hormat Kami,

Takashi KANEKO
Wakil Presiden
Japan International Cooperation Agency

Jakarta, Juli 2007

Kepada YTH.
Mr Takashi KANEKO
Wakil Presiden
Japan International Cooperation Agency

Perihal: Surat Pengantar

Bersama ini kami kirimkan Laporan Akhir dari “Studi tentang Peningkatan Pendapatan Petani melalui Pengolahan Hasil Pertanian dan Keuangan Mikro Pedesaan”. Laporan ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan dalam meningkatkan pendapatan petani. Rekomendasi kebijakan tersebut disusun selama pelaksanaan Studi yang berlangsung dari bulan November 2005 hingga Juli 2007.

Dalam pelaksanaan Studi, rencana pengolahan hasil pertanian untuk tiga komoditas contoh telah dipersiapkan untuk 13 Kelompok Tani sasaran yang berlokasi di 5 kabupaten. Rencana tersebut dikategorikan dalam 5 model usaha yang disusun dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk yang rencananya akan diperluas ke wilayah dan komoditas lain.

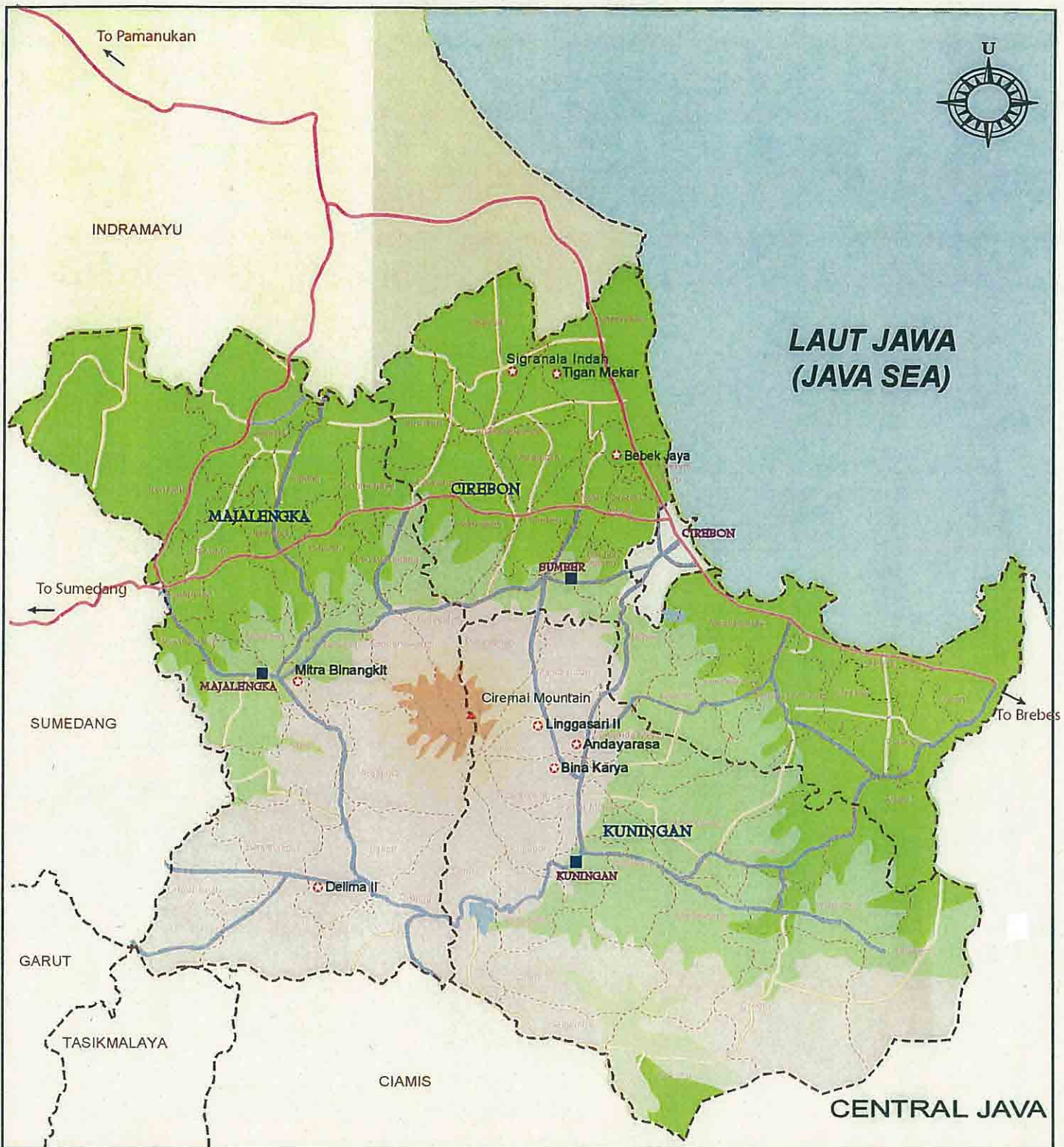
Keuangan mikro merupakan komponen lain yang menyediakan lingkungan pendukung bagi kegiatan pengolahan hasil pertanian melalui kelompok tani dan masyarakat pedesaan. Kelompok tani serta anggota masyarakat pedesaan diharapkan untuk dapat mengubah bentuk menjadi lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan serta memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan kegiatan pengolahan hasil pertanian yang berkesinambungan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan kepada JICA, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pemerintah Jepang atas bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada kami.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak terkait di Kantor JICA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia, pemerintah provinsi dan kabupaten serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasama selama berlangsungnya masa Studi kami di Indonesia.

Hormat Kami,

Naoto MORIOKA
Ketua Tim Studi tentang Peningkatan Pendapatan Petani: Pengolahan Hasil Pertanian dan Keuangan Mikro Pedesaan di Indonesia

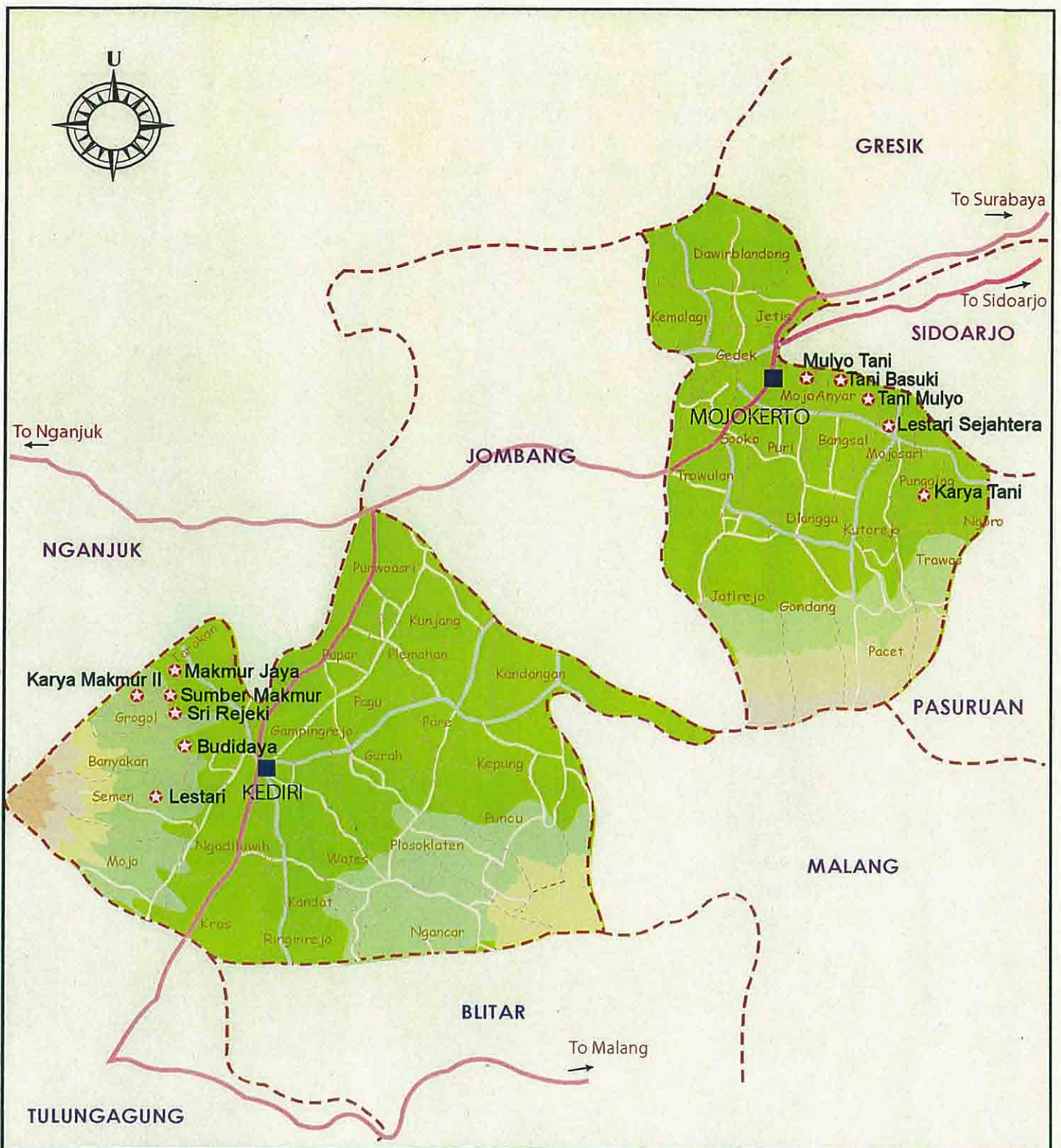
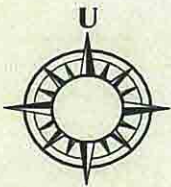


LEGEND

- CAPITAL OF KABUPATEN
- ⊙ KELOMPOK TANI SELECTED
- STATE ROAD
- PROVINCIAL ROAD
- KABUPATEN ROAD
- - - BOUNDARY OF KABUPATEN
- ⋯ BOUNDARY OF KECAMATAN
- ▲ MOUNTAIN
- ☪ RESERVOIR / LAKE
- MORE THAN 1500 M
- 1000 - 1500 M
- 500 - 1000 M
- 100-500 M
- 0 - 100 M



LOCATION MAP (WEST JAVA)



LEGEND

- CAPITAL OF KABUPATEN
- ★ KELOMPOK TANI SURVEYED
- STATE ROAD
- PROVINCIAL ROAD
- KABUPATEN ROAD
- - - BOUNDARY OF KABUPATEN
- · · · BOUNDARY OF KECAMATAN

- MORE THAN 1500
- 1000 - 1500 M
- 500 - 1000 M
- 100-500 M
- 0 - 100 M



LOCATION MAP (EAST JAVA)

Photographs



Duck
DOD Feeding at Kabupaten Mojokerto
(August 8th, 2007)



Duck
Preparation of Salted Egg in Kabupaten Cirebon
(August 3rd, 2006)



Duck
Drainage from Duck House in Kabupaten Mojokerto
(August 8th, 2006)



Duck
Checking fertilization of duck egg by simple lighting
equipment at Kabupaten Mojokerto
(August 8th, 2007)



Duck
Traditional Manual Hatchery Machine at Kabupaten
Mojokerto
(August 8th, 2007)



Duck
Duck Feed Harvested from the River at Kelompok
Tani Bebek Jaya at Kabupaten Cirebon
(August 8th, 2007)



Duck
Socialization Meeting at Kabupaten Cirebon
(February 6th, 2006)



Duck
Sate Bebek, one of the important Products from Duck at
Kabupaten Cirebon
(August 3rd, 2006)



Sweet Potato
Field Workshop held at Kelompok Tani Lingasari II at
Kabupaten Kuningan
(August 3rd, 2006)



Sweet Potato
Socialization Meeting at Kabupaten Majalengka
(February 8th, 2007)



Sweet Potato
Field Survey, Interview at Kelompok Tani Andayarasa in
Kabupaten Kuningan
(September 7th, 2006)



Sweet Potato
Ice Cream made from Sweet Potato at Kabupaten
Kuningan
(August 2nd, 2006)

Photographs



Sweet Potato
Research for Dry Chips at Legumes and Tuber Crops Research Institute (BALITKABI) at Malang (February 22nd, 2007)



Sweet Potato
Sweet Potato Flour Mill Machine (Manual Type) at Kabupaten Kuningan (August 2nd, 2006)



Sweet Potato
Sweet Potato Farm at Kelompok Tani Sawalogah in Kabupaten Majalengka (September 11th, 2006)



Sweet Potato
Group Discussion for Reviewing Draft Implementation Model in Socialization Meeting at Kabupaten Kuningan (February 7th, 2007)



Mango
Peeled by Farmers' Group for preparing Dried Mango at Kabupaten Kediri (November 6th, 2007)



Mango
Vacuum Flyer for preparing Dried Fruits by the assistance of NGO, Resource Exchange International (REI) in Kabupaten Kediri (February 20th, 2007)



Mango
Dried Mango processed by the assistance of REI in Kabupaten Kediri (February 20th, 2007)



Mango
Exchange of Opinion with REI during Socialization Meeting at Kabupaten Kediri (February 20th, 2007)



Mango
Packed Products in Kabupaten Kediri (November 6th, 2006)



Mango
Juice Packing Equipment in Kabupaten Kediri (November 6th, 2006)



Mango
Problem Census in Field Workshop at Kelompok Tani Makmur Jaya in Kabupaten Kediri (October 16th, 2006)



Mango
Market in Surabaya (August 10th, 2006)

Studi Mengenai Peningkatan
Pendapatan Petani:
Pengolahan Hasil Pertaniandan Keuangan
Mikro Pedesaan di Indonesia

LAPORAN UTAMA

Daftar Isi

Location Maps
Photographs
Abbreviation and Measurement Unit

Hal

BAB 1 PEMBUKAAN

1.1	Pendahuluan	1-1
1.2	Latar Belakang Studi	1-1
1.3	Tujuan Studi	1-2
1.4	Wilayah Studi	1-2
1-5	Lingkup Studi	1-2
1-6	Pengaturan Studi.....	1-3
1-7	Kegiatan Studi	1-4

BAB 2 KONDISI SOSIAL-EKONOMI DAN KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN

2.1	Kondisi Sosial-Ekonomi Sektor Pertanian	2-1
2.2	Keuangan.....	2-4
2.2.1	Kondisi Perekonomian dan Keuangan Mikro	2-4
2.2.2	Sektor Perbankan	2-5
2.2.3	Ringkasan mengenai Sektor Keuangan Mikro.....	2-8
2.3	Kebijakan Sektor Pertanian	2-14
2.3.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).....	2-14
2.3.2	Rencana Pembangunan Pertanian 2005 – 2009	2-14
2.3.3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2-15
2.3.4	Keuangan Mikro Pedesaan dan Pembiayaan Pertanian	2-16
2.3.5	Penyuluhan Pertanian.....	2-18

BAB 3 KONDISI WILAYAH STUDI SAAT INI

3.1	Prosedur Pelaksanaan Survei.....	3-1
3.1.1	Survei Lapangan dan Seleksi Kelompok Tani	3-1
3.1.2	Seminar Lapangan dan Survei Tingkat Kemiskinan	3-2
3.2	Kondisi Umum	3-3
3.2.1	Lokasi dan Administrasi	3-3
3.2.2	Kondisi Alam	3-4
3.2.3	Kondisi Sosial Ekonomi	3-5
3.3	Kabupaten Cirebon.....	3-6
3.3.1	Umum	3-6
3.3.2	Karakteristik Kelompok Tani.....	3-6
3.3.3	Pengolahan Hasil Pertanian	3-9
3.3.4	Pemasaran	3-10

	<u>Hal</u>
3.4 Kabupaten Kuningan	3-12
3.4.1 Umum	3-12
3.4.2 Karakteristik Kelompok Tani.....	3-13
3.4.3 Pengolahan Hasil Pertanian	3-15
3.4.4 Pemasaran	3-17
3.5 Kabupaten Majalengka.....	3-18
3.5.1 Umum	3-18
3.5.2 Karakteristik Kelompok Tani.....	3-19
3.5.3 Pengolahan Hasil Pertanian	3-21
3.5.4 Pemasaran	3-22
3.6 Kabupaten Mojokerto	3-24
3.6.1 Umum	3-24
3.6.2 Karakteristik Kelompok Tani.....	3-25
3.6.3 Pengolahan Hasil Pertanian	3-27
3.6.4 Pemasaran	3-28
3.7 Kabupaten Kediri.....	3-30
3.7.1 Umum	3-30
3.7.2 Karakteristik Kelompok Tani.....	3-31
3.7.3 Pengolahan Hasil Pertanian	3-33
3.7.4 Pemasaran	3-35
3.8 Lembaga Keuangan Mikro.....	3-37
3.8.1 Latar Belakang Layanan Keuangan yang Tersedia bagi Masyarakat Tani.....	3-37
3.8.2 Kondisi Layanan Keuangan.....	3-41
3.8.3 Pengalaman Keuangan Kelompok Tani.....	3-33
3.8.4 Kesenjangan.....	3-35

BAB 4 PENDEKATAN PERBAIKAN DASAR

4.1 Pendekatan Perbaikan Dasar	4-1
4.1.1 Kemiskinan dan Kelompok Sasaran	4-1
4.1.2 Hubungan antara Pengolahan Hasil Pertanian dan Keuangan Mikro Pedesaan	4-2
4.1.3 Transformasi Kelompok Tani menjadi Kelompok Usaha	4-3
4.1.4 Interaksi antara Usaha Agribisnis Petani dengan Pengembangan Masyarakat Pedesaan	4-4
4.2 Langkah Perbaikan	4-6
4.2.1 Pengolahan Hasil Pertanian	4-6
4.2.2 Pemasaran	4-12
4.2.3 Keuangan Mikro	4-16

BAB 5 RENCANA PERBAIKAN

5.1 Rencana Perbaikan	5-1
5.2 Langkah Perbaikan dan Model Usaha.....	5-1
5.2.1 Langkah Perbaikan dan Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran.....	5-1
5.2.2 Langkah Perbaikan dan Model Usaha untuk Keuangan	5-2
5.3 Hubungan Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran, dengan Keuangan Mikro	5-5

	<u>Hal</u>
5.4 Mekanisme Pendukung Mempertimbangkan Persoalan yang Muncul dari Program-program Sebelumnya.....	5-6
5.4.1 Seleksi Kelompok Tani Sasaran	5-6
5.4.2 Dukungan Teknis.....	5-7
5.4.3 Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah.....	5-7
5.4.4 Exit Strategy	5-8
5.4.5 Peningkatan Kemampuan Keuangan.....	5-8
5.5 Seminar Sosialisasi	5-10
5.5.1 Umum.....	5-10
5.5.2 Hasil Sosialisasi	5-10
5.6 Rencana Implementasi Skema Pengolahan dan Pemasaran	5-11
5.6.1 Rencana Implementasi dan Kelompok Tani.....	5-11
5.6.2 Tahap-tahap dan Jadwal Implementasi	5-12
5.6.3 Analisa Keuangan	5-12
5.7 Rencana Implementasi Skema Keuangan Pedesaan	5-13
5.7.1 Rencana Implementasi dan Gabungan dan LKM Sasaran	5-13
5.7.2 Tahapan dan Jadwal Implementasi	5-13
5.7.3 Analisa Keuangan	5-14
5.8 Pengembangan Kapasitas, Pengawasan dan Evaluasi.....	5-14
5.8.1 Gambaran Ringkas	5-14
5.8.2 Pengembangan Kapasitas	5-15
5.8.3 Pengawasan dan Evaluasi	5-17

BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 Ikhtisar.....	6-1
6.2 Rekomendasi Kebijakan.....	6-3
6.2.1 Seleksi Kelompok, Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat	6-4
6.2.2 Teknologi Pengolahan & Komoditas Lain dan Kerjasama Pemasaran.....	6-5
6.2.3 Business Development Services (BDS).....	6-6
6.2.4 Dukungan Permodalan bagi Peningkatan Kemampuan, dengan Komponen Peningkatan Aset	6-6
6.2.5 Dukungan dari Pemerintah Daerah.....	6-6
6.2.6 Replikasi Model Usaha	6-7

List of Table

	<u>Hal</u>
Table 2.3.1 Priority Area in the Government Work Plan for 2007 under National Medium-Term Development Plan (1/2 – 2/2).....	T-1
Table 2.3.2 Focus and Priority Activities: “Revitalization of Agriculture, Fishery, Forestry and Village Affair” in the Government Work Plan 2007 under the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) (1/2 – 2/2)	T-3
Table 4.2.1 Marketing Activities Applicable to Each Type of Business Unit (1/2 – 2/2).....	T-5
Table 5.1.1 Summary of Improvement Plan for Selected Kelompok Tani (1/5 - 5/5).....	T-7
Table 5.1.2 Classification of Business Model in Processing and Marketing	T-12
Table 5.1.3 Summary of Finance Improvement Direction for Selected Kelompok Tani (1/4 - 4/4)	T-13

	<u>Hal</u>
Table 5.1.4	Classification of Business Model in Finance (1/2 – 2/2)..... T-17
Table 5.2.1	Summary of Investment and Profit in Each Project..... T-19
Table 5.5.1	List of Major Operation and Effect Indicators for the Model Project..... T-20
Table 6.2.1	Points to be Considered for Implementation under SKR-CF (1/2 – 2/2)..... T-21

List of Figures

	<u>Hal</u>
Figure 2.3.1	Major Finance Program under the Ministry of Agriculture F-1
Figure 4.1.1	Result of Poverty Ranking at Farmers Community (1/2 – 2/2) F-2

Daftar Tabel

	<u>Hal</u>
Tabel 1	Wilayah dan Komoditas Studit 1-2
Table 2	Laju Pertumbuhan PDB (Harga Konstan Tahun 1993)..... 2-1
Table 3	Laju Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian (Harga Konstan Tahun 2000) 2-1
Table 4	Persentase Sektor Pertanian dalam Nominal PDB (Harga Berlaku) 2-2
Table 5	Kondisi Ketenagakerjaan..... 2-2
Table 6	Nominal PDB per Lapangan Kerja (Harga Berlaku) 2-3
Table 7	Populasi dibawah Garis Kemiskinan (1976 – 2005)..... 2-3
Table 8	Perekonomian Indonesia: Perbandingan Sebelum dan Sesudah Krisis 2-4
Table 9	Non Performing Loan (NPL) Bank Umum 2-4
Table 10	Jumlah Bank 2-6
Table 11	Tren Jangka Panjang Tingkat Bunga di Indonesia..... 2-6
Table 12	Indikator Perkembangan Bank Umum 2-6
Table 13	Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Pusat..... 2-9
Table 14	Lembaga Keuangan Mikro 2-9
Table 15	Jumlah Kelompok Tani dan Badan Penyuluhan Pertanian 2-18
Table 16	Badan Penyuluhan Pertanian 2-20
Table 17	Kategori Evaluasi dalam Pemilihan Kelompok Tani..... 3-1
Table 18	Jumlah Kelompok Tani yang Disurvei 3-2
Table 19	Gambaran Ringkas Administratif 3-3
Table 20	Indeks Kemiskinan 3-5
Table 21	Indikator Dasar Sosia..... 3-5
Table 22	Ringkasan Kelompok Tani di Kabupaten Cirebon 3-6
Table 23	Hasil Evaluasi Kelompok Tani (Kabupaten Cirebon)..... 3-7
Table 24	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Sigranala Indah)..... 3-8
Table 25	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Bebek Jaya)..... 3-9
Table 26	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Tigan Mekar)..... 3-9
Table 27	Metode Peternakan Itik..... 3-10
Table 28	Permintaan dan Penawaran Produk Itik di Kabupaten Cirebon (2005)..... 3-11
Table 29	Ringkasan Data Harga Jual Telur Itik di Cirebon (Rp./butir) 3-12
Table 30	Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Kuningan 3-13
Table 31	Hasil Evaluasi Kelompok Tani di Kabupaten Kuningan 3-14
Table 32	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Lingassari 2) 3-15
Table 33	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Andayarasa) 3-15
Table 34	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Bina Karya)..... 3-15

	<u>Hal</u>
Table 35	Harga Jual dan Keuntungan Bandar di Kabupaten Kuningan (Rp./segar kg)..... 3-18
Table 36	Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Majalengka 3-19
Table 37	Hasil Evaluasi Kelompok Tani Kabupaten Majalengka 3-20
Table 38	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Delima 2) 3-21
Table 39	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Mitra Binangkit) 3-21
Table 40	Data Harga Penjualan di Majalengka (Rp/kg)..... 3-23
Table 41	Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Mojokerto 3-25
Table 42	Hasil Evaluasi Kelompok Tani Kabupaten Mojokerto 3-25
Table 43	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Karya Tani) 3-26
Table 44	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Lestari Sejahtera) 3-27
Table 45	Peringkat Masalah (Kelompok Tani Tani Mulyo) 3-27
Table 46	Ringkasan Data Harga Jual di Mojokerto (Rp/butir)..... 3-29
Table 47	Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Kediri..... 3-31
Table 48	Hasil Evaluasi Kelompok Tani di Kabupaten Kediri..... 3-32
Table 49	Peringkat Kemiskinan (Kelompok Tani Budidaya)..... 3-33
Table 50	Peringkat Kemiskinan (Kelompok Tani Makmur Jaya) 3-33
Table 51	Data Harga Jual Mangga di Kabupaten Kediri (Rp/kg)..... 3-37
Table 52	Layanan Keuangan yang Tersedia bagi Masyarakat Kelompok Tani di Propinsi Jawa Barat..... 3-38
Table 53	Layanan Keuangan yang Tersedia bagi Masyarakat Kelompok Tani di Propinsi Jawa Timur 3-40
Table 54	Akses Keuangan berdasarkan Survei Tingkat Kemiskinan 3-41
Table 55	Persyaratan Tabungan 3-41
Table 56	Persyaratan Pinjaman 3-42
Table 57	Batas Tingkat Pendapatan dalam Survei Tingkat Kemiskinan menurut Komunitas..... 4-1
Table 58	Karakteristik Pasar di Kabupaten Cirebon dan Mojokerto 4-14
Table 59	Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Cirebon dan Mojokerto 4-15
Table 60	Karakteristik Pasar Kabupaten Kuningan dan Majalengka 4-15
Table 61	Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Kuningan dan Majalengka 4-15
Table 62	Karakteristik Pasar di Kabupaten Kediri 4-16
Table 63	Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Kediri 4-16
Table 64	Pengaruh Perbaikan Pendapatan Rumah Tangga..... 5-12
Table 65	Calon Sasaran KPK Gabungan atau 5-13
Table 66	Kegiatan-kegiatan yang Diusulkan pada Pengembangan Lembaga Masyarakat..... 5-16
Table 65	Kegiatan-kegiatan yang Diusulkan pada Pengembangan Teknis..... 5-16

Daftar Gambar

	<u>Hal</u>
Gambar 1	Jadwal Studi1 1-3
Gambar 2	Laju Pertumbuhan PDB di Indonesia (2001 - 2005) dan Kontribusi bagi Pertumbuhn 2-5
Gambar 3	Tren Inflasi & Suku Bunga..... 2-5
Gambar 4	Piramida 4 Tingkat LKM (LKM Menerima Simpanan Publik)..... 2-12
Gambar 5	Proses Pendaftaran Kelompok Tani 2-19
Gambar 6	Populasi Berdasarkan Sektor (Kab. Cirebon) 3-3
Gambar 7	Populasi Berdasarkan Sektor (Kab. Kuningan) 3-3
Gambar 8	Populasi Berdasarkan Sektor (Kab. Majalengka) 3-3
Gambar 9	Populasi Berdasarkan Sektor (Kab. Mojokerto) 3-3
Gambar 10	Populasi Berdasarkan Sektor (Kab. Kediri)..... 3-3

	<u>Hal</u>
Gambar 11 Rata-rata Curah Hujan dan Temperatur (1999-2002) (Kab. Cirebon di Propinsi Jawa Barat)	3-4
Gambar 12 Rata-rata Curah Hujan dan Temperatur (1999-2002) (Kab. Kediri di Propinsi Jawa Timur)	3-4
Gambar 13 Pola Pemanfaatan Lahan (Kab. Cirebon)	3-4
Gambar 14 Pola Pemanfaatan Lahan (Kab. Kuningan).....	3-4
Gambar 15 Pola Pemanfaatan Lahan (Kab. Majalengka)	3-4
Gambar 16 Pola Pemanfaatan Lahan (Kab. Mojokerto)	3-4
Gambar 17 Pola Pemanfaatan Lahan (Kab. Kediri)	3-4
Gambar 18 Produksi Itik, Cirebon.....	3-6
Gambar 19 Persentase Kemiskinan Masyarakat, Cirebon.....	3-8
Gambar 20 Diagram Konsep Skema Segitiga	3-9
Gambar 21 Produksi Ubi Jalar (Kab. Kuningan)	3-12
Gambar 22 Persentase Kemiskinan Masyarakat, Kuningan.....	3-14
Gambar 23 Produksi Ubi Jalar, Majalengka.....	3-18
Gambar 24 Persentase Kemiskinan Masyarakat Majalengka.....	3-21
Gambar 25 Produksi Itik, Mojokerto.....	3-24
Gambar 26 Persentase Kemiskinan Masyarakat(Kab. Mojokerto)	3-26
Gambar 27 Produksi Mangga di Kab. Kediri	3-30
Gambar 28 Persentase Kemiskinan (Kab. Kediri).....	3-33
Gambar 29 Hasil Survei Tingkat Kemiskinan pada Komunitas Petani	4-1
Gambar 30 Gambar Skema Hubungan.....	4-3
Gambar 31 Gambar Transformasi Kelompok Tani menjadi LKM/Kelompok Usaha	4-4
Gambar 32 Interaksi dengan Masyarakat	4-5
Gambar 33 Alur Rantai Nilai Usaha Itik	4-6
Gambar 34 Alur Rantai Nilai Usaha Ubi Jalar	4-8
Gambar 35 Alur Rantai Nilai Usaha Mangga	4-10
Gambar 36 Analisa Masalah Pemasaran	4-12
Gambar 37 Marketing Activities Image	4-13
Gambar 38 Analisa Masalah Keuangan dan Langkah Perbaikan	4-22
Gambar 39 Gambar Skematis Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran	5-2
Gambar 40 Gambar Skematis Model Usaha Keuangan	5-4
Gambar 41 Hubungan Industri Itik dengan Model Usaha Keuangan.....	5-5
Gambar 42 Hubungan Pengolahan Ubi Jalar dengan Model Usaha Keuangan.....	5-6
Gambar 43 Hubungan Pengolahan Mangga dengan Model Usaha Keuangan	5-6
Gambar 44 Hubungan Peningkatan Pendapatan dengan Model Usaha Keuangan.....	5-6
Gambar 45 Usulan Struktur Organisasi Implementasi (Alur Koordinasi dan Pencairan Dana).....	5-8
Gambar 46 Jadwal Implementasi Model Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	5-12
Gambar 47 Jadwal Implementasi Skim Keuangan	5-14
Gambar 48 Mekanisme Pengembangan Kemampuan, Pengawasan dan Evaluasi.....	5-15
Gambar 49 Gambar Skematis Keuangan Mikro Pedesaan dan Pengolahan & Pemasaran	6-1
Gambar 50 Model Usaha Keuangan Mikro Pedesaan dan Pengolahan & Pemasaran	6-2
Gambar 51 Ringkasan Aspek Penting bagi Rekomendasi Kebijakan	6-3

Attachment

Attachment -1	Scope of Work
Attachment -2	Minutes of Meeting for Inception Report
Attachment -3	Minutes of Meeting for Progress Report 1
Attachment -4	Minutes of Meeting for Interim Report
Attachment -5	Minutes of Meeting for Progress Report 2
Attachment -6	Minutes of Meeting for Draft Final Report

Measurement Unit

Extent

cm ²	= Square-centimeters (1.0 cm x 1.0 cm)
m ²	= Square-meters (1.0 m x 1.0 m)
Km ²	= Square-kilometers (1.0 Km x 1.0 Km)
a.	= Acre or Acres (100 m ² or 0.1 ha.)
ha.	= Hectares (10,000 m ²)
ac	= Acres (4,046.8 m ² or 0.40468 ha.)

Length

mm	= Millimeters
cm	= Centimeters (cm = 10 mm)
m	= Meters (m = 100 cm)
Km	= Kilometers (Km = 1,000 m)
Inch	= 2.54 cm
ft	= foot (0.3048 m)
mile	= 1,609.34 m

Currency

US\$	= United State Dollars
JPY	= Japanese Yen
Rp.	= Indonesian Rupees

Volume

cm ³	= Cubic-centimeters (1.0 cm x 1.0 cm x 1.0 cm or 1.0 m-lit.)
m ³	= Cubic-meters (1.0 m x 1.0 m x 1.0 m or 1.0 K-lit.)
lit.	= Liter (1,000 cm ³)

Weight

gr.	= Grams
Kg	= Kilograms (1,000 gr.)
ton	= Metric tons (1,000 Kg)
MCM	= 1,000,000 cu-m = 810.68 acre-ft
ac-ft	= 1,233.83 m ³

Time and Others

sec.	= Seconds
min.	= Minutes (60 sec.)
hr.	= Hours (60 min.)
cusec.	= 28.32 lit/sec
cu-m/s	= 35.31 cu-ft/sec

Exchange Rate

As of April, 2007
US \$ 1.00 = JPY 117.38
Rp. 1.00 = JPY 0.01286

List of Terms & Abbreviations

AARD	Agency for Agricultural Research Development
AAHRD	Agency for Agriculture Human Resources Development
ADB	Asian Development Bank
AIAT	Assessment Institute for Agricultural Technology
APBN	National Government Budget (Anggaran Belanja Pendapatan Nasional)
APBD	Local Government Budget (Annggaran Belanja Pendapatan Daerah)
APP	Agricultural Extension Academy
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BALITKABI	Indonesian Legumes and Tuber Tuber Crops Research Institute (Balai Penelitian Kacang Kacangan Dan Umbi-Umbian)
BAPPEDA	Provincial Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
BAPPENAS	National Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
BBDA	Agribusiness Training Center (Balai Besar Diklat Agribisnis)
BCA	Bank Central Asia
BDA	Agribuisness Training Center (Balai Diklat Agribisnis)
BDS	Business Development Services
BIMAS	Mass Guidance Program (Bimbingan Massal)
BIPP	Agricultural Extension Information Centre (Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian)
BKD	Village Credit Institutions, Village Credit Board (Badan Kredit Desa)
BLM	Community Direct Assistance under Ministry of Agriculture (Bantuan Langsung Masyarakat)
BMT	Integrated Independent Business Institution as a Non-Bank Microfinance Institution operated by YINBUK/PINBUK (Baitul Maal wat Tamwil in Arabic, Balai-Usaha Mandiri Terpadu in Indonesian language), People's economic institution which develop productive business & investment in improving economic activities of small entrepreneurs according to Syariah Principles & Cooperative Principles
BNI	State Bank of Indonesia (Bank Negara Indonesia)
BPD	Regional Development Bank (Bank Pembangunan Daerah)
BPML	Community Direct Loan Assistance (Bantuana Pingaman Langsung Masyarakat)
BPP	Extension Office (Balai Penyuluhan Pertanian)
BPR	People's Credit Bank (Bank Perkreditan Rakyat)
BPS	Statistics Indonesia: Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik)
BPTP	Agricultural Technology Extension Agency (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)
BRI	State Owned People's Bank (Bank Rakyat Indonesia)
BRI Unit	Village Unit of State Owned People's Bank (Bank Rakyat Indonesia Unit Desa)
BPTP	Center for Research and Development of Agriculture Technology (<i>Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian</i>)
BULOG	National Logistics Agency (Badan Urusan Logistik)
BUMDes	Village Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa)
CF	Counterpart Fund
JCIF	Japan Center for International Finance
CRIFI	Central Research Institute of Fisheries
CU	Credit Union
DAC	Development Assistance Committee
DAFEP	Decentralized Agriculture and Forestry Extension Project, financed by World Bank
DELIVERI	Decentralized Livestock Services Project in Eastern Indonesia

DEPTAN	Ministry of Agriculture: MOA (Departemen Pertanian)
DG	Directorate General / Director General
DINAS	Service Office for Agriculture and Industry & Trade, Kabupaten / Kotamadya / Kota level
DOD	Day Old Duck
DOLOG	Regional Logistic Agency (Depot Logistik)
DPD	Regional Representative Council under MPR (Dewan Perwakilan Daerah)
DPR	People's Representative Council under MPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPM-LEUP	Capital Strengthen Fund for Rural Economic Business Institution under Ministry of Agriculture (Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan)
EKUIIN	The coordinating Ministry of Economic Affairs (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia)
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FY	Fiscal Year
GDP	Gross Domestic Product
GNI	Gross National Income
GOI	Government of Indonesia
GOJ	Government of Japan
GRDP	Gross Regional Domestic Product
GTZ	German Technical Cooperation
HRD	Human Resources Development
IBRA	Indonesian Banking Restructuring Agency
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IMF	International Monetary Fund
IPB	Bogor Agricultural University (Institut Pertanian Bogor)
IPM	Integrated Past Management
Jabar	West Java (Java Barat)
Jatim	East Java (Java Timur)
JICA	Japan International Cooperation Agency
JBIC	Japan Bank for International Cooperation
JCIF	Japan Center for International Finance
Kab.	District (Kabupaten)
Kec.	Sub-District (Kecamatan)
KKP	Food Security Credit (Kredit Ketahanan Pangan)
Koptan	Farmer's Own Cooperative (Kooperasi Tani)
KPK	Self-Help Group (Kelompok)
KSP	Saving & Loan Cooperative (Koperasi Simpan Pinjam)
KT	Farmers' Groups organized under Agricultural Extension Workers (Kelompok Tani)
KTNA	Farmers and Fishermen's Groups (Kontak Tani dan Nelayan Andalan)
KUB	Kelompok Usaha Bersana
KUD	Village Cooperative Unit (Koperasi Unit Desa)
KUF	Kalimantan Upland Farming System Development Project
KUMKM	Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprise
KUT	Farm Credit Scheme (Kredit Usaha Tani)
LDKP	Rural Credit Fund Institution (Lembaga Dana Kredit Pedesaan)
LDR	Loan to Deposit Ratio
LKM	Micro-Finance Insitution (Lembaga Kredit Mikro)
LKM-A	Micro-Finance Insitution-Agribusines (Lembaga Kredit Mikro Agribisnis)

LKM-B3K	Non-Bank / Non Cooperative Micro-Finance Institution (Lembaga Kredit Micro)
LMDH	Village Community and Forestry Institute
LUED	Village Economy Institution (Lembaga Usaha Ekonomi Desa)
MFI	Micro Finance Institution
MOA	Ministry of Agriculture (Departemen Pertanian: DEPTAN)
MOF	Ministry of Finance
MOHA	Ministry of Home Affairs
MOU	Memorandum of Understanding
MPR	People's Representative House or Parliament (Majelis Perwakilan Rakyat)
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
NBNC MFIs	Non-Bank Non-Cooperative Micro-Finance Institutions
NGO	Non Governmental Organization
NPFS	National Program for Food Security
NPL	Non-Performing Loan
NRS	National Regulator & Supervisor (proposed under draft Law of MFI, ProFi)
PINBUK	Center for the Incubation of Small Businesses, regional chapter of YINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
ODA	Official Development Assistance
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
P2KP	Urban Poverty Program under World Bank (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)
P4K	Rural Income Generation Project, Ministry of Agriculture's Micro-Credit Project for Farmers and Fisherfolk (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil)
P4S	Centre of Participatory Agricultural Training in Rural Area (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya)
PEMP:	Empowerment of Coastal and Small Island Population under Ministry of Marine Affairs and Fishery (Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir)
PINBUK	Micro Enterprise Incubation Center (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
PKK	Family Welfare Empowerment
PMAM-PMUK	Strengthening Group Business Capital (Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok)
PNM	(Permodalan Nasional Madani)
PPD	Regional Empowerment Project under Ministry of Home Affairs and Regional Autonomy (Proyek Pemberdayaan Daerah)
PPK	Kecamatan Development Program under Ministry of Home Affairs and Regional Autonomy (Program Pengembangan Kecamatan)
PPL	Agricultural Extension Worker (Petugas Penyuluh Lapangan)
PPP	Agricultural Training Center (Pusat Pelatihan Pertanian)
ProFi	Promotion of Small Financial Institutions under BI & MOF supported by GTZ
PROPENAS	National Development Plan (2000 – 2004) (Program Pembangunan Nasional)
REI	Resource Exchange International
Renstra	Strategic Plan (Rencana Strategi) RIGK Rural Income Generation Project under Ministry of Agriculture, P4K
RPJM	Mid Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
RT	Neighborhood Association, smallest unit under Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga)
RW	Citizens Association, smallest unit under Desa/Kelurahan (Rukun Warga)
SBI	Bank Indonesia Certificate (Prime Rate: Interest Rate of Government Bond: Sertifikat Bank Indonesia)
SHG	Self-Help Group

SKR	Second Kennedy Round
SL-PHT	Field School Approach for Integrated Pest Control
SME	Small & Medium Enterprise
SM-MFIs	Small & Medium Micro-Finance Institutions
SOEs	State Owned Enterprises
SP-3	Agricultural Financing Services Scheme
SSN	Social Safety Net
SUB-DOLOG	DOLOG for a District (refer to DOLOG)
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
S/W	Scope of Work
UED	Village Economy Enterprise (Usaha Ekonomi Desa)
UI	University of Indonesia (Universitas Indonesia)
UNHAS	University of Hasanuddin located at Makassar of South Sulawesi (Universitas Hasanuddin)
UNDP	United Nations Development Program
UPPKS	Family Welfare Income Generation Project under National Family Planning Coordination Board (Usaha Penengkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
UPTD	Regional Technical Implementation Unit / Functional Position Group (Unit Pelaksana Teknis Daerah)
USAID	United States Agency for International Development
UU	Law (Undang Undang)
WTO	World Trade Organization
WUA	Water Users Association
YINBUK	Foundation for the Incubation of Small Businesses, NGO (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

BAB I PEMBUKAAN

1.1 Pendahuluan

Laporan Akhir dari “Studi tentang Peningkatan Pendapatan Petani: Pengolahan Hasil Pertanian dan Keuangan Mikro Pedesaan” (Studi) ini disusun berdasarkan Lingkup Kerja (Scope of Work) yang disepakati oleh Studi bersama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Departemen Pertanian (DEPTAN) pada tanggal 5 November 2004. Laporan ini mengemukakan hasil Studi termasuk latar belakang, situasi di contoh Kabupaten saat ini, model usaha dan model implementasi dari pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan serta rekomendasi kebijakan pendukung pengolahan hasil pertanian dan pengembangan skema keuangan mikro.

1.2 Latar Belakang Studi

Setelah Krisis Keuangan yang terjadi di tahun 1997, perekonomian Indonesia telah kembali bangkit melalui berbagai usaha yang dapat meningkatkan PDB per kapita yaitu sebesar US\$1,280 di tahun 2005. Akan tetapi, jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan masih mencapai 35,3 juta orang dan 65% dari angka tersebut adalah petani yang hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu, guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan, penting artinya untuk meningkatkan pendapatan petani.

Dalam usaha peningkatan pendapatan petani tersebut, Pemerintah Indonesia mencanangkan berbagai kegiatan guna menambah nilai dari hasil produksi pertanian yaitu melalui pengolahan hasil primer pertanian, meskipun masih sulit untuk menambah nilai hasil pengolahan di tingkat petani.

Keuangan mikro pedesaan merupakan salah satu cara efektif dalam pembiayaan pengolahan hasil pertanian dan kegiatan ekonomi bagi petani miskin. Akan tetapi, masih banyak kesulitan yang belum terselesaikan dan masih belum tersedianya skema keuangan mikro yang berkesinambungan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Indonesia meminta bantuan Pemerintah Jepang dalam pemberian bantuan teknis dalam pelaksanaan Studi tentang pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan. Menanggapi permintaan tersebut, JICA telah melaksanakan Studi Persiapan selama periode 18 Oktober hingga 11 November 2004, yang dimulai dari diskusi dengan Pemerintah Indonesia mengenai Lingkup Studi dan Lingkup Kerja dari Studi serta Minutes of Meeting antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang pada tanggal 5 November 2004, seperti terlampir pada Lampiran-1.

1.3 Tujuan Studi

Tujuan dari Studi adalah:

- (1) Untuk mempersiapkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Indonesia dalam penyusunan/pelaksanaan kebijakan dalam mendukung kegiatan pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan guna meningkatkan pendapatan petani.
- (2) Untuk berbagi pengetahuan/keterampilan teknis kepada pihak-pihak terkait di DEPTAN melalui kegiatan pelatihan kerja lapangan selama berlangsungnya masa Studi.

1.4 Wilayah Studi

- (1) Pengolahan Hasil Pertanian

Guna membantu Studi melakukan penelitian dalam bidang pengolahan hasil pertanian, Pemerintah Indonesia telah memilih tiga komoditas yaitu ubi jalar, itik dan mangga. Berdasarkan wilayah produksi dari tiga komoditas tersebut maka wilayah dibawah ini telah terseleksi menjadi wilayah Studi yang mencakup luas sekitar 4,300 km² di 5 Kabupaten seperti yang tertera pada Peta Lokasi dibawah ini:

Tabel 1 Wilayah dan Komoditas Studi

Propinsi	Kabupaten	Komoditas	Luas Wilayah
Jawa Barat	Kuningan	Ubi Jalar	220 km ²
	Majalengka	Ubi Jalar	1,070 km ²
	Cirebon	Itik	960 km ²
Jawa Timur	Kediri	Mangga	1,390 km ²
	Mojokerto	Itik	690 km ²
2 Propinsi	5 Kabupaten	3 Komoditas	4,330 km ²

- (2) Keuangan Mikro Pedesaan

Sedangkan untuk bidang keuangan mikro pedesaan, Studi mengumpulkan data dari dalam wilayah maupun di luar wilayah Studi.

1.5 Lingkup Studi

Studi ini dilaksanakan selama lebih dari satu setengah tahun, dari bulan Desember 2005 hingga bulan Juni 2007 seperti yang dijelaskan dalam jadwal berikut ini.

Periode Studi	2005		2006						2007							
	Tahun Pertama (JFY2005)		Tahun Ke-2 (JFY2006)						Tahun Ke-3 (JFY2007)							
	Nov	Des	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Pekerjaan di Indonesia	■	■	■						■			■				
	Tahap I		Tahap II						Tahap III			Tahap IV				
Pekerjaan di Jepang	▨								▨				▨	▨		
	Tahap Persiapan								Tahap I			Tahap II		Tahap III		
Laporan		△							△	△		△	△		△	
		Ic/R							Pr/R(1)	It/R		Pr/R(2)	Df/R		F/R	

Gambar 1 Jadwal Studi

Lingkup Studi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji ulang informasi dan data yang ada mengenai pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan
- 2) Mengumpulkan informasi dasar dari wilayah Studi yaitu kondisi alam, kondisi sosial-ekonomi, kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dll.
- 3) Pengolahan Hasil Pertanian: klarifikasi situasi saat ini, kebutuhan para pemangku kepentingan, identifikasi solusi, persiapan rekomendasi
- 4) Keuangan Mikro Pedesaan: klarifikasi situasi saat ini, kebutuhan para pemangku kepentingan, identifikasi solusi, penyusunan skema baru bagi keuangan mikro pedesaan
- 5) Hubungan antara pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan
- 6) Rekomendasi kebijakan bagi promosi kegiatan pengolahan hasil pertanian dan penyusunan skema keuangan mikro pedesaan

1.6 Pengaturan Studi

Biro Perencanaan dibawah Sekretariat Jenderal DEPTAN merupakan badan koordinasi bagi Studi ini. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Studi, Tim Koordinasi dibentuk dibawah pimpinan Direktur Biro Perencanaan dan anggota Direktorat Jenderal (DirJen) Tanaman Pangan, DirJen Hortikultura, DirJen Peternakan, DirJen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Pusat Pembiayaan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian.

1.7 Kegiatan Studi

Persiapan Studi telah dilaksanakan di Jepang pada bulan November 2005. Draft Inception Report dipersiapkan melalui analisa awal dengan menggunakan data dan informasi yang ada termasuk pengaturan jadwal dan perencanaan kegiatan Studi.

Tahap pertama pekerjaan di Indonesia dilaksanakan pada awal Desember 2005 untuk i) menjelaskan dan mendiskusikan draft Inception Report kepada Tim Koordinasi, ii) finalisasi Inception Report (lihat Lampiran-2).

Tahap kedua pekerjaan di Indonesia dilaksanakan selama periode 4 bulan yaitu dari tanggal 24 Juli sampai dengan 29 Desember 2006. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam periode ini meliputi: i) mengkaji ulang tujuan dan pendekatan Studi bersama dengan Tim Koordinasi, ii) melakukan survei lapangan guna memahami situasi dan kegiatan saat ini di bidang pengolahan, pemasaran, keuangan mikro, kelembagaan dll, iii) pengumpulan dan analisa data dan informasi di bidang sosial-ekonomi, pengolahan, pemasaran, keuangan, kelembagaan dan masalah terkait lainnya, dan iv) persiapan pendekatan

perbaikan berdasarkan survei lapangan dan analisa data yang terkumpul. Hasil Studi kemudian disusun dalam Progress Report 1, yang dijelaskan dan didiskusikan dengan pihak DEPTAN (Lampiran-3).

Kemudian Studi mempersiapkan enam draft proposal proyek bagi penggunaan dana SKR-CF (Second Kennedy-Round Counterpart Fund) melalui penelitian awal pengolahan dan keuangan mikro, yang kemudian dijelaskan kepada DEPTAN pada akhir bulan November hingga pertengahan Desember 2006. Setelah modifikasi keenam draft tersebut, seluruh DirJen yang terkait menyampaikan proposal-proposal tersebut kepada Sekretariat SKR-CF yang berada dibawah Biro Kerjasama Luar Negeri DEPTAN. Proposal-proposal tersebut telah disetujui untuk dapat dilaksanakan pada pertengahan Maret 2007.

Tahap pertama pekerjaan di Jepang dilaksanakan pada awal Januari 2007 guna mempersiapkan model usaha dan model perbaikan bagi pengolahan hasil pertanian dan draft skema keuangan mikro pedesaan berdasarkan pendekatan dasar, serta menyusun Interim Report dan draft model implementasi.

Tahap ketiga pekerjaan di Indonesia dilakukan selama 1.5 bulan yaitu dimulai dari akhir Januari hingga Maret 2007. Pekerjaan utama meliputi 1) penjelasan dan diskusi mengenai Interim Report bersama dengan Tim Koordinasi (Lampiran-4), 2) sosialisasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan di 5 Kabupaten dengan mengundang Dinas-Dinas propinsi, 3) melakukan modifikasi dari model implementasi berdasarkan masukan dan pendapat dari sosialisasi. Hasil dari Studi tersebut kemudian disusun ke dalam Progress Report 2, yang selanjutnya didiskusikan bersama dengan Tim Koordinasi (Lampiran-5).

Berdasarkan hasil dari seminar sosialisasi di tiap Kabupaten, Tahap kedua pekerjaan di Jepang dilaksanakan pada awal Mei 2007. Pekerjaan utama pada periode ini termasuk penyusunan Draft Final Report serta persiapan rekomendasi kebijakan bagi pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro.

Tahap keempat pekerjaan di Indonesia dilakukan selama bulan Mei hingga Juni 2007, serta menyelenggarakan seminar diseminasi di Cirebon untuk Propinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Mei, di Surabaya untuk Propinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Mei dan di Jakarta untuk DEPTAN pada tanggal 31 Mei. Dalam seminar-seminar tersebut, model usaha yang telah diperbaiki dan rekomendasi kebijakan telah dikemukakan kepada para pemangku kepentingan dimana seluruh masukan segera ditampung. Selanjutnya, Draft Final Report akan difinalisasi dalam tahap ketiga pekerjaan di Jepang yang dimulai pada pertengahan Juni hingga Juli 2007.

BAB 2 KONDISI SOSIAL-EKONOMI DAN KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN

2.1 Kondisi Sosial-Ekonomi Sektor Pertanian

Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia sangat terpuruk akibat krisis nilai tukar yang melanda Asia sehingga mengakibatkan produk domestik bruto (PDB) turun 13,1% di tahun 1998. Akan tetapi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya menunjukkan penurunan sebesar 1.3% (Tabel 2). Salah satu alasan mengapa krisis tersebut hanya berpengaruh sedikit terhadap sektor pertanian adalah karena produksi hasil pertanian sangat bergantung kepada produksi tanaman pangan yang kurang sensitif terhadap perubahan yang terjadi dalam bidang perekonomian.

Tabel 2 Laju Pertumbuhan PDB (Harga Konstan Tahun 1993)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Total Laju Pertumbuhan PDB Riil	8.2%	7.8%	4.7%	-13.1%	0.8%	4.9%	3.8%
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4.4%	3.1%	1.0%	-1.3%	2.2%	1.9%	4.1%
Pertambangan	6.7%	6.3%	2.1%	-2.8%	-1.6%	5.5%	0.3%
Industri Manufaktur	10.9%	11.6%	5.3%	-11.4%	3.9%	6.0%	3.3%
Kebutuhan Publik*1	15.9%	13.6%	12.4%	3.0%	8.3%	7.6%	5.0%
Konstruksi	12.9%	12.8%	7.4%	-36.4%	-1.9%	5.6%	4.4%
Perdagangan dan Pariwisata	7.9%	8.2%	5.8%	-18.2%	-0.1%	5.7%	3.7%
Transportasi & Komunikasi	8.5%	8.7%	7.0%	-15.1%	-0.8%	8.6%	8.1%
Keuangan	11.0%	6.0%	5.9%	-26.6%	-7.2%	4.6%	6.6%
Jasa	3.3%	3.4%	3.6%	-3.9%	1.9%	2.3%	3.2%

*1: Listrik, gas dan air bersih. Sumber: Laporan Statistik Tahunan, BPS.

Sejak tahun 2000, seluruh sektor ekonomi berhasil mencapai pertumbuhan positif yang menyebabkan peningkatan pada PDB riil di tahun 2004 dan 2005 yaitu lebih dari 5% per tahun. Meskipun pertanian menunjukkan pertumbuhan 4.1% lebih tinggi daripada total pertumbuhan PDB tahun 2001, laju pertumbuhan sektor tersebut turun 2.5% tahun 2005, seperti pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian (Harga Konstan Tahun 2000)

	2001	2002	2003	2004*1	2005*1
Total Laju Pertumbuhan PDB Riil	3.83%	4.50%	4.78%	5.05%	5.60%
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4.08%	3.13%	3.79%	3.26%	2.49%
Tanaman Pangan	1.52%	2.13%	3.64%	2.89%	2.57%
Non-Tanaman Pangan	9.85%	5.83%	4.37%	2.21%	2.23%
Pernakan	8.36%	6.52%	4.13%	3.35%	2.07%

*1: Angka awal tahun 2004 dan 2005. Sumber: Laporan Statistik Tahunan, BPS.

Berkaitan dengan subsektor pertanian pada tabel di atas, subsektor tanaman pangan menunjukkan laju pertumbuhan yang rendah yaitu 1.5 hingga 2.5% per tahun. Subsektor Non-tanaman pangan dan peternakan menunjukkan laju pertumbuhan lebih tinggi daripada total PDB tahun 2001 dan 2002, yang membantu meningkatkan PDB sektor pertanian secara keseluruhan. Akan tetapi setelah tahun 2004, laju pertumbuhan subsektor non-tanaman pangan dan peternakan mengalami penurunan pada sebesar 2% pada tahun 2005, yaitu kurang dari subsektor tanaman pangan.

Sampai dengan tahun 1999, sektor pertanian merupakan sektor kedua terbesar setelah industri manufaktur, dengan nilai 16% hingga 17% dari nominal PDB. Akibat penurunan laju

pertumbuhan PDB pada sektor ini, andil sektor pertanian turun ke peringkat ketiga tetapi masih sanggup bertahan pada angka 13% (Tabel 4). Kontribusi setiap subsektor terhadap nominal PDB dijelaskan dalam tabel dibawah ini. Subsektor tanaman pangan telah memberikan kontribusi separuh dari PDB Pertanian, yang disusul oleh non-tanaman pangan dan peternakan.

Tabel 4 Persentase Sektor Pertanian dalam Nominal PDB (Harga Berlaku)

	2001	2002	2003	2004*1	2005*1
Sektor Pertanian dari Total PNB	15.6%	15.5%	15.2%	14.6%	13.4%
Subsektor Pertanian					
Tanaman Pangan	52.3%	51.9%	51.6%	49.9%	50.2%
Non-Tanaman Pangan	13.9%	15.3%	15.3%	15.6%	15.8%
Peternakan	13.1%	12.2%	12.2%	12.2%	11.8%
Lainnya (Kehutanan & Perikanan)	20.7%	20.6%	20.9%	22.3%	22.2%

*1: Angka awal tahun 2004 dan 2005. Sumber: Laporan Statistik Tahunan, BPS.

Sektor pertanian menampung lebih dari 40% dari total populasi angkatan kerja yaitu sebesar 94.9 juta jiwa (Tabel 5). Menurut sensus penduduk tahun 2000, dari total populasi pekerjaan di sektor ini, 97% adalah dari sektor pertanian sedangkan 3% dari sektor kehutanan dan perikanan.

Tabel 5 Kondisi Ketenagakerjaan

	2002		2003		2004		2005	
	Orang dalam ribuan	%	Orang dalam ribuan	%	Orang dalam ribuan	%	Orang dalam ribuan	%
Populasi Tenaga Kerja	100,779	100.0	100,316	100	103,973	100	105,802	100
Populasi Penduduk Bekerja	91,647	93.9	90,785	91.9	93,722	90.1	94,948	89.7
Populasi Penduduk Tidak Bekerja	9,132	6.1	9,531	8.1	10,251	9.9	10,854	9.5
Pekerjaan menurut Sektor								
Pertanian/Kehutanan/Perikanan	40,634	45.3	42,001	43.8	40,608	39.1	41,814	44.0
Pertambangan & Manufaktur	12,744	13.0	11,656	13.3	12,105	12.9	12,461	13.1
Konstruksi	4,274	3.9	4,107	4.2	4,417	4.7	4,427	4.6
Lainnya	33,998	37.9	33,02	38.7	36,592	43.3	37,974	38.3
Total Populasi Penduduk Bekerja	91,647	100	90,785	100	93,722	100	94,948	100

Sumber: Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, BPS Tahun 2002~2005, Badan Pusat Statistik Indonesia.

Nilai ekspor sektor ini, termasuk ekspor barang olahan adalah US\$10 milyar, yaitu setara dengan nilai 16% dari total pendapatan ekspor negara yaitu sebesar US\$61.1 milyar pada tahun 2003. Dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyumbangkan 14% terhadap PDB, menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 40% tenaga kerja serta menambah devisa negara.

Nominal GDP per lapangan kerja selama periode 2001 hingga 2005 dianggap sebagai produktivitas sektoral bagi sektor pertanian dan sektor lainnya. Produktivitas sektor pertanian adalah US\$880 per tenaga kerja di tahun 2005, jauh lebih rendah daripada sektor lain, yaitu 20% dari sektor lain (US\$4,490 per tenaga kerja di tahun 2005), seperti yang dijelaskan dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Nominal PDB per Lapangan Kerja (Harga Berlaku)

Sektor	2001	2002	2003	2004*1	2005*1
Sektor Pertanian					
- Nominal PDB (Milyar Rp)	263,328	281,591	305,784	331,553	365,560
- Tenaga Kerja ('000 Orang)	39,744	40,634	42,001	40,608	41,814
- PDB per Tenaga Kerja (Juta Rp)	6,600	6,900	7,300	8,200	8,700
(setara dengan US\$)	(US\$630)	(US\$770)	(US\$860)	(US\$880)	(US\$880)
Sektor Lain					
- Nominal PDB (Milyar Rp)	1,420,953	1,540,234	1,707,891	1,941,589	2,364,149
- Tenaga Kerja ('000 Orang)	51,064	51,014	47,793	53,114	53,134
- PDB per Tenaga Kerja (Juta Rp)	27,800	30,200	35,700	36,600	44,500
(setara dengan US\$)	(US\$2,670)	(US\$3,380)	(US\$4,220)	(US\$3,940)	(US\$4,490)
(Nilai tukar dengan US\$)	10,400	8,940	8,465	9,290	9,900

*1: Angka awal tahun 2004 dan 2005. Sumber: Laporan Statistik Tahunan, BPS.

Jumlah populasi yang berada dibawah garis kemiskinan (Tabel 7) turun drastis antara pertengahan tahun 1970-an dan 1996, yaitu setahun sebelum krisis nilai tukar terjadi. Jumlah orang miskin pada tahun 1996 adalah sebanyak 22.5 juta jiwa, atau sebesar 11.3% dari total populasi di Indonesia. Akan tetapi krisis nilai tukar tersebut juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 37.5 juta jiwa, atau 18.2% dari total populasi, meningkat lebih dari 1.5 kali jumlah di tahun 1996.

Tabel 7 Populasi dibawah Garis Kemiskinan (1976 – 2005)

	Populasi dibawah Garis Kemiskinan (juta)			Angka Kemiskinan (%)		
	Perkotaan	Pedesaan	Negara	Perkotaan	Pedesaan	Negara
1976	10.0	44.2	54.2	38.8	40.4	40.1
1980	9.5	32.8	42.3	29.0	28.4	28.6
1990	9.4	17.8	27.2	16.8	14.3	15.1
1996	7.2	15.3	22.5	9.7	12.3	11.3
1998	17.6	31.9	49.5	21.9	25.7	24.2
1999	12.4	25.1	37.5	15.1	20.2	18.2
2000	12.3	26.4	38.7	14.6	22.4	19.1
2001	8.6	29.3	37.9	9.8	24.8	18.4
2002	13.3	25.1	38.4	14.5	21.1	18.2
2003	12.2	25.1	37.3	13.6	20.2	17.4
2004	11.3	24.8	36.1	12.1	20.1	16.7
2005	12.4	22.7	35.1	11.4	19.5	16.0

Sumber: Laporan Statistik Tahunan Indonesia

Menurut Data Informasi Kemiskinan (BPS Tahun 2003 dan 2004), sekitar 60% dari total populasi miskin berada di Pulau Jawa, 20% berada di Pulau Sumatera, dan sisa 20% berada di kepulauan lain. Sedangkan di bidang pekerjaan rumah tangga miskin, 59% bekerja di sektor pertanian, 32% di sektor industri dan sektor lain, sedangkan 8% tidak bekerja. Ini berarti bahwa dalam program pengentasan kemiskinan, perlu dilaksanakan pengembangan perekonomian di daerah pedesaan yang akan membantu mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian kesempatan untuk peningkatan pendapatan, khususnya untuk industri berbasis pertanian di Pulau Jawa.

2.2 Keuangan

2.2.1 Kondisi Perekonomian dan Keuangan Mikro

(1) Pasca Krisis Nilai tukar (1998-2000)

Setelah krisis nilai tukar tahun 1997, IMF memainkan peranan penting dalam membantu memperbaiki perekonomian dan menyusun kebijakan ekonomi dan fiskal. Akibatnya, perekonomian terpuruk pada kuartal keempat tahun 1998, tetapi kemudian bangkit kembali. Kenaikan harga minyak dan kebutuhan pokok membantu dalam pemulihan perekonomian di tahun 2000, dengan mencatat 4.9% laju pertumbuhan di tahun yang sama.

Tabel 8 Perekonomian Indonesia: Perbandingan Sebelum dan Sesudah Krisis

Keterangan	Pra-krisis (1993-96)	Krisis (1998)	Pasca-krisis	
			(2002-05)	2005
Laju Pertumbuhan PDB (%)	7.7	-13.1	4.9	5.6
Nilai tukar mata uang (rata-rata per tahun per US\$)	2,210	10,013	9,133	9,705
Ekspor (milyar US\$)	43.0	48.8	68.8	85.6
Impor (milyar US\$)	36.0	27.3	42.0	57.5
Neraca Perdagangan (milyar US\$)	7.0	21.5	26.8	28.0
Cadangan Devisa Internasional (milyar US\$)	13.8	23.6	26.8	34.7
Laju Inflasi (CPI)	8.7	58.5	8.8	17.1
Neraca Fiskal (% dari PDB)	1.2	-2.0	-1.0	-0.5
Angka Pengangguran (%)	-	-	9.7	10.3

Sumber: World Bank, Snapshot of Indonesia's Economy, 2006

(2) Restrukturisasi Perbankan

Sektor perbankan di Indonesia mengalami proses restrukturisasi setelah krisis nilai tukar tahun 1997. Keseluruhan jumlah kredit bermasalah (NPL: non-performing loan) mencapai tingkat tertinggi yaitu 58.7% di bulan Maret 1999, kemudian menurun, yang menyebabkan rasio NPL dari sektor perbankan turun menjadi 18.8% pada akhir tahun 2000 seperti pada Tabel 9.

Tabel 9 Non Performing Loan (NPL) Bank Umum

	98/3	99/3	99/12	00/12	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12
NPL Bank Umum	19.8%	58.7%	32.8%	18.8%	12.1%	8.1%	8.2%	5.8%	8.3%

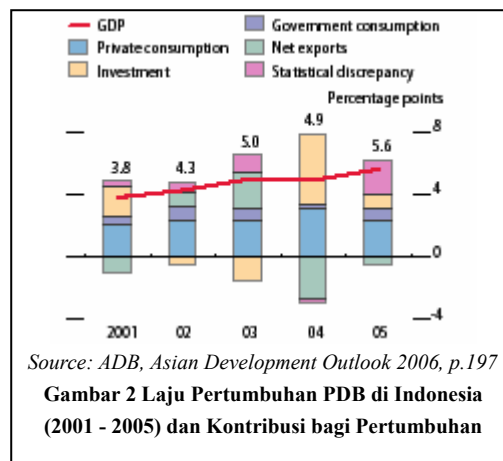
Sumber: Japan Center for International Finance (JCIF), 2006

Dari tahun 1998 hingga 2004, beberapa langkah telah ditempuh guna mereformasi sektor perbankan seperti pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang bertujuan untuk memindahkan NPL dari bank-bank yang bermasalah serta penutupan dan penggabungan beberapa bank. Hasilnya, jumlah bank umum berkurang dari 239 bank di tahun 1996 menjadi 131 bank di akhir tahun 2005. Atas usaha-usaha restrukturisasi tersebut maka rasio NPL turun menjadi kurang dari 10% di tahun 2002 dan tahun selanjutnya. BPPN kemudian dibubarkan pada bulan Februari 2004 setelah menyelesaikan misinya. Sedangkan dalam menjalankan fungsi guna memberikan perlindungan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk pada bulan September 2005. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi sektor perbankan telah selesai pada tahun 2004 hingga 2005.

(3) Setelah Tahun 2000 Hingga Kini

Perekonomian Indonesia kembali stabil setelah tahun 2000, dengan mencapai laju pertumbuhan antara 3.8% dan 5.6% seperti pada Gambar 2.

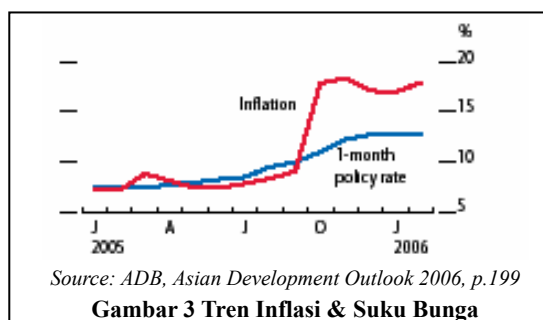
Laju pertumbuhan perekonomian yang stabil tersebut dicapai karena pemulihan kegiatan investasi dan peningkatan konsumsi swasta serta pemulihan pada kegiatan konstruksi. Sedangkan untuk kegiatan perusahaan, fasilitas investasi dan peralatan menjadi aktif selama periode ini. Di tahun 2004 dan 2005, konsumsi dan investasi memimpin pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2 Laju Pertumbuhan PDB di Indonesia (2001 - 2005) dan Kontribusi bagi Pertumbuhan

Akan tetapi, di penghujung tahun 2005, pertumbuhan ekonomi menurun karena inflasi dan suku bunga yang tinggi dipicu oleh kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memotong subsidi bahan bakar dan menaikkan harga produk bahan bakar lebih dari 120% guna menjaga kestabilan anggaran nasional. Pemerintah berupaya untuk mengurangi lonjakan jumlah rumah tangga miskin dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai dimana pada tahap distribusi pertama yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2005, Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp.4.6 triliun bagi 15.5 juta rumah tangga melalui cabang-cabang PT Pos Indonesia.

Gambar 3 menunjukkan tren terkini dari kenaikan inflasi dan suku bunga di tahun 2005 dan 2006. Walaupun pada tahun 2005 tercatat pertumbuhan PDB tertinggi pada angka 5.6%, sedangkan menuju tahun 2006, pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan. Bank Indonesia mengindikasikan bahwa stabilitas dari harga minyak yang menjadi salah satu penyebab risiko dari kondisi perekonomian negara di tahun 2006.



Gambar 3 Tren Inflasi & Suku Bunga

Tingkat suku bunga di Indonesia (ditunjukkan oleh SBI rate¹ satu bulan) selalu berkisar antara 10% hingga 15% sampai dengan pertengahan tahun 1990an. Setelah krisis nilai tukar, tingkat bunga naik tertinggi menjadi 70.6% pada bulan September 1998. Setelah mencapai puncak, tingkat bunga terus jatuh dan pada tahun 2005, yang nilainya berkisar antara 7.42% dan 12.75%.

2.2.2 Sektor Perbankan

(1) Sekilas mengenai Sektor Perbankan

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 menggolongkan bank menjadi dua kategori yaitu Bank Umum Komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kedua jenis bank

¹ Sertifikat Bank Indonesia. SBI Rate artinya "Tingkat Diskonto bagi Sertifikat Bank Indonesia". SBI diterbitkan untuk jangka waktu 1 hingga 12 bulan. SBI dijual kepada bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai bagian dari kebijakan moneter.

tersebut, umum dan BPR, menjalankan aktifitas usaha dengan menggunakan prinsip konvensional dan/atau prinsip Syariah dalam operasionalnya. Sedangkan BPR tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi pemindahan keuangan. Dari sisi operasional, bank umum di Indonesia lebih lanjut diklasifikasikan menjadi empat kategori, seperti dijelaskan dalam Tabel 10:

Tabel 10 Jumlah Bank

Keterangan	2001	2002	2003	2004	2005*
1. Bank Pemerintah	5	5	5	5	5
2. Bank Swasta Nasional	80	77	76	72	71
3. Bank Asing & Joint Venture	34	34	31	30	30
4. Bank Pembangunan Daerah (BPD)	26	26	26	26	26
Total Bank Umum	145	142	138	133	132
5. Total BPR	2,432	2,747	3,299	3,507	3,081
Jumlah Total Bank	2,577	2,889	3,437	3,640	3,213

Sumber: BI Laporan Perekonomian Indonesia 2005. * September 2005

Sebelum terjadi krisis nilai tukar, tunggakan pinjaman yang ada di bank umum berkembang cepat sehingga setelah krisis, pinjaman ini berubah menjadi NPL yang hampir seluruhnya dipindahkan ke BPPN sebagai kredit bermasalah. Setelah pemindahan tersebut, telah terjadi situasi over-likuiditas dimana jumlah simpanan jauh melampaui jumlah tunggakan pinjaman, dan melimpahnya uang tunai yang tidak dipergunakan untuk pinjaman. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi sebagai pengantara keuangan dari bank dan bank umum yang mendorong dana yang terjaring melalui simpanan di SBI, khususnya ketika tingkat suku bunga tabungan lebih rendah daripada tingkat suku bunga SBI (Tabel 11).

Tabel 11 Tren Jangka Panjang Tingkat Bunga di Indonesia

Tahun	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
SBI Rate (1-bulan)	20.0%	38.4%	12.5%	14.5%	17.6%	12.9%	8.3%	7.4%	12.3%
Bunga Deposito ^{*1}	20.0%	39.1%	25.7%	12.5%	15.5%	15.5%	10.6%	6.4%	10.7%
Bunga Pinjaman ^{*2}	21.8%	32.2%	27.7%	18.5%	18.6%	19.0%	16.9%	14.1%	15.9%

*1: Tingkat suku bunga deposito: rata-rata tahunan 3 bulan simpanan berjangka pada bank umum, *2: Tingkat suku bunga pinjaman: untuk modal kerja bagi usaha swasta, Sumber: JCIF, 2006

Perkembangan terakhir pada bank umum dijelaskan dalam Tabel 12 berikut ini. Jumlah tabungan dan pinjaman semakin meningkat. Belakangan ini, rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) kian meningkat dan lebih banyak lagi dana yang dikeluarkan untuk pinjaman.

Tabel 12 Indikator Perkembangan Bank Umum

Indikator Utama	2001	2002	2003	2004	2005
Aset Total (Triliun Rp)	1,099.7	1,112.2	1,196.2	1,272.3	1,469.8
Dana Deposito (Triliun Rp)	797.4	835.8	888.6	963.1	1,127.9
Kredit (Triliun Rp)	358.6	410.29	477.19	595.1	730.2
LDR: Loan to Deposit Ratio (Kredit/Dana)	45.0	49.1	53.7	61.8	64.7
NII: Net Interest Income (Triliun Rp)	3.1	4.01	3.2	6.3	6.2
ROA: Return on Assets (%)	1.37	1.9	2.5	3.5	2.6
NPL: (Non-Performing Loans Gross (%))	12.1	8.1	8.2	5.8	8.3
NPL net (%)	3.6	2.1	3.0	1.7	4.8
CAR: Capital Adequacy Ratio (%)	20.5	22.5	19.4	19.4	19.5

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2005, Hal. 145, Tabel 8.2

(2) Perkembangan Pinjaman bagi Usaha Mikro, Kecil and Menengah (UMKM)

Menurut Laporan Ekonomi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pengeluaran dana (pinjaman sampai dengan Rp.500 juta per nasabah) bagi UMKM meningkat tajam selama tahun 2005. Total tunggakan pinjaman UMKM mencapai Rp.354.9 triliun, naik 30.9% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau 51.0% dari total pinjaman bank. Ini menunjukkan bahwa sistem perbankan melihat pemberian pinjaman kepada sektor UMKM sebagai kegiatan yang dapat berkembang dan menguntungkan secara komersial.

Pinjaman UMKM di sektor pertanian juga berkembang dari Rp. 6.6 triliun di tahun 2001 menjadi Rp.12.6 triliun di tahun 2005. Akan tetapi, kontribusi sektor ini terhadap pinjaman UMKM menurun dari 5.5% di tahun 2001 menjadi 3.6% di tahun 2005. Pinjaman UMKM masih didominasi oleh sektor industri dan perdagangan.

(3) Upaya Menghubungkan UMKM dan Perbankan

Divisi Biro Kredit dari Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan berbagai pelatihan dan penelitian teoritis bagi bank dan Penyedia Jasa Pengembangan Usaha (BDSP: Business Development Service Providers). Dengan pelatihan tersebut, BDSP diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha mikro dan berfungsi sebagai pengantara atau fasilitator antara usaha mikro dan pihak bank. BI juga menyelenggarakan pelatihan bagi petani ternak itik dan petani ubi jalar yang bertujuan untuk meningkatkan tabungan mereka. Penelitian BI meliputi model-model pinjaman bagi 76 jenis komoditas termasuk manga dan itik dan studi mengenai kluster guna mengetahui jenis pinjaman yang tepat bagi setiap kluster. Studi mengenai kluster tersebut menyimpulkan bahwa kluster yang belum berkembang, pembiayaan harus disubsidi dengan pemberian suku bunga rendah dan tanpa agunan, serta difasilitasi oleh universitas dan BDS. Pinjaman harus ditujukan kepada kelompok bukan kepada individu.

Upaya lain yang dilakukan oleh BI adalah membentuk Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Pada tahun 2005, BI menyelenggarakan pelatihan bagi 1,605 individu KKMB yang berasal dari 780 BDSP, dan juga bagi 2,530 staf perbankan. Para peserta kebanyakan adalah Account Officer yang menangani UMKM dari bank umum dan BPR. Pelatihan BI tersebut membutuhkan 20 peserta dimana BI menanggung biaya maksimum 50% dari pelatihan bagi pegawai bank dan maksimum 30% dari pelatihan bagi BDSP.

(4) Latar Belakang Keuangan Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Sistem Perbankan, memungkinkan bank untuk melakukan kegiatan perbankan berdasarkan kepada Prinsip Islam, dan pemerintah telah membentuk perangkat dan peraturan bagi Perbankan Syariah pada tahun 1999. Saat ini ada tiga bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Disamping itu ada 19 divisi Syariah di bank nasional (bank umum yang dapat beroperasi sebagai Bank Syariah) dan 104 BPR Syariah.

Terdapat dua pertimbangan dalam memahami dan mengembangkan Bank Syariah yaitu (a) isu hukum, dimana suku bunga dilarang, dan (b) isu ekonomi, dimana keadilan dalam ekonomi ditekankan. Pada bank yang menggunakan sistem konvensional, para penabung mendapatkan bunga meskipun bank tidak mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada bank

yang menggunakan sistem Syariah, ada sistem pembagian keuntungan dan kerugian. Bank Syariah menginvestasikan dana dalam sektor riil dan tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi berdasarkan spekulasi.

(5) Jaring Pengaman Menghadapi Bencana Alam

Dalam mendukung perbaikan perekonomian pasca bencana alam, pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 31/PMK.07/2005 dan Kebijakan Pemerintah No. 14 Tahun 2005. Peraturan-peraturan tersebut menetapkan bank milik negara seperti BRI, BPD, Bank Mandiri dan BNI untuk menghapus pinjaman di Aceh pasca tsunami. Dalam hal ini, pemerintah tidak menyuntik likuiditas tetapi penghapusan hutang harus diimbangi dengan cadangan modal.

Dalam hal ini Bank Indonesia merasa perlu untuk memberikan perlakuan khusus bagi bidang perkreditan yaitu dalam bentuk pemberian pelonggaran dalam penilaian kualitas kredit dan persyaratan pelaporan berkala kepada Bank Indonesia. BI kemudian mengeluarkan beberapa peraturan guna mendukung perbaikan dari kegiatan perbankan di daerah yang terkena bencana alam.

2.2.3 Ringkasan mengenai Sektor Keuangan Mikro

(1) Latar Belakang Keuangan Mikro

Sektor keuangan mikro di Indonesia terdiri dari program pemerintah, keuangan lembaga dan keuangan informal.

Program Pemerintah

Meliputi program-program yang menargetkan keuangan mikro serta program-program pengentasan kemiskinan dengan komponen keuangan mikro.

Program pemerintah ditargetkan bagi pembiayaan pertanian dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini program pembiayaan pertanian yang terbesar adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP), yaitu pinjaman bersubsidi bagi tanaman pangan dan peternakan, dan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMAM-PMUK), dana bergulir yang diberikan kepada kelompok tani. Sedangkan untuk pembiayaan UMKM, saat ini berdasarkan pada Peraturan BI dimana pihak bank memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pinjaman kepada UMKM dan diwajibkan untuk menyertakan pinjaman UMKM dalam rencana usaha mereka.

Indonesia memiliki banyak program pengentasan kemiskinan. Menurut Laporan GTZ ProFI tahun 2005, jumlah tersebut mencapai 70 program, dan disusun dalam 16 program pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13 Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Pusat

Departemen / Lembaga	Program	Anggaran (2002) (Juta Rp)
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	1,370,833
Departemen Pertanian	Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)	19,855
Departemen Pekerjaan Umum	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	438,910
Departemen Perindustrian dan Perdagangan	1) Program Kemitraan, 2) Pengembangan Usaha Baru, 3) Pengembangan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB)	3,483
Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program Dana Bergulir bagi USP / KSP / LKM	90,000
	Penguatan Modal Usaha Kelompok melalui Modal Awal Padanan (MAP)	8,225
Departemen Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	1,028,000
	Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil	8,225
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	1) Kecamatan Development Project dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), 2) Proyek Pemberdayaan Daerah (PPD)	1,028,000
Kementerian Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)	4,000
Badan Pusat Statistik	Evaluasi Metodologi Indikator Kemiskinan, Perhitungan Daerah Penduduk Miskin dalam Survei Sosial Ekonomi 2002	206
Badan Pendayagunaan Tanah Nasional	Pengelolaan Penggunaan Lahan (redistribusi lahan) bagi Petani Pengolah	944
TOTAL		2,964,456

Sumber: ProFI (2005) Indonesia: Background Paper on Microfinance Policy and Strategy

Pada tingkat pemerintah daerah, juga terdapat banyak program pengetasan kemiskinan. Program-program yang berhubungan dengan Kabupaten dan Propinsi dari wilayah Studi dijelaskan diberikut ini. Kebanyakan dari program tersebut ditujukan bagi keuangan mikro bagi kelompok yang melakukan usaha mikro, tetapi tujuan usaha pengentasan kemiskinan dan promosi usaha mikro tersebut masih belum jelas.

Kelembagaan Keuangan Mikro

Lembaga-lembaga yang menawarkan pelayanan keuangan mikro adalah (i) Bank Umum (Unit-unit BRI), and BPR (Bank Perkreditan Rakyat, (ii) KSP (Koperasi Simpan Pinjam) and USP (Unit Simpan Pinjam) atau Koperasi Serba Usaha, (iii) BKD (Badan Kredit Desa), and LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan, dan (vi) pegadaian. Selain unit-unit BRI, bank umum lain mencoba untuk memasuki sektor keuangan mikro dengan cara menyalurkan dana melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan/atau mendirikan unit-unit sendiri.

Tabel 14 Lembaga Keuangan Mikro

Nama Lembaga	Unit	Jumlah Pinjaman (dalam .000 Rp)	Nasabah	Simpanan (dalam .000 Rp)
Unit BRI (BRI, Des 2003)	3,916	14,182,000	29,870,000	27,429,000
BPR (BI, Des 2004)	2,158	12,150,000	5,760,000	11,160,000
KSP (MENKOP, Apr 2000)	1,097	531,000	N/A	85,000
USP (MENKOP, Apr 2000)	35,218	3,629,000	N/A	1,157,000
BKD (BRI, Mar 2004)	5,345	200,000	460,000	28,500
LDKP (BI, Jun 2000)	2,272	358,000	N/A	334,000
Pegadaian ^{*1}	42	21,000	No savings	No savings
BMT ^{*2}	3,038	157,000	N/A	209,000

Nama Lembaga	Unit	Jumlah Pinjaman (dalam .000 Rp)	Nasabah	Simpanan (dalam .000 Rp)
CU ^{*3}	1,022	395,721	207,147	272,124
LSM ^{*4}	124	110,008	81,931	11,969
Total	54,232	31,733,729	36,379,078	40,686,593

1*: Lembaga Pegadaian Juli 2004, 2*: PINBUK Desember 2001, 30% dari BMT tidak terdaftar sebagai koperasi simpan pinjam. 3*: Kantor Pusat CU Desember 2002. 70% dari CU tidak terdaftar sebagai koperasi simpan pinjam, 4*: 16 LSM (dari 500) Desember 2003.

Source: ProFI (2005) Indonesia: Background Paper on Microfinance Policy and Strategy.

Keuangan Mikro pada Sektor Informal

Sektor informal terdiri dari ribuan kelompok swadaya masyarakat (KSM) baik yang dibentuk secara sukarela maupun dibawah program pemerintah, serta koperasi simpan pinjam informal, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Koperasi Kredit (Credit Unions: CU)², LSM, arisan, rentenir dan pedagang.

(2) Kerangka Hukum bagi Lembaga Keuangan Mikro

Dasar Hukum Yang Berlaku

Seluruh bank umum termasuk BPR diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1972 yang memperbolehkan bank-bank tersebut menerima simpanan publik. UU tersebut kemudian diperbaiki dengan diterbitkannya UU No.10 Tahun 1998, untuk mengakomodasi berkembangnya industri perbankan Islam dan untuk meregulasi operasional perbankan berdasarkan prinsip Syariah, dibawah pengawawan BI. Berdasar Pasal 16 UU Perbankan, lembaga keuangan non-bank non-koperasi tidak diperbolehkan untuk mengambil simpanan.

Diantara lembaga-lembaga keuangan non-bank, hanya koperasi (dibawah pengawasan Departemen Koperasi dan UKM) yang diperbolehkan untuk mengambil simpanan (tabungan), tetapi hanya dari anggota, bukan dari publik (bukan anggota), menurut UU No. 25 Tahun 1992. Beberapa koperasi ada yang mengambil simpanan dari bukan anggota dengan menyebutnya "calon anggota", yang sebenarnya dilarang secara hukum. Jenis lain dari lembaga keuangan non-bank adalah pegadaian yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi dibawah UU No.103 Tahun 2000, dengan pengawasan dari Departemen Keuangan.

Operasional Badan Kredit Desa (BKD) secara hukum disahkan oleh penerbitan Staatblad No. 137 tahun 1929 oleh Departemen Keuangan Pulau Jawa di era penjajahan Belanda. Setelah diterbitkannya UU Perbankan tahun 1992, seluruh BKD diwajibkan untuk berubah bentuk menjadi BPR, tetapi tidak ada yang sanggup melaksanakannya karena alasan tidak memenuhi persyaratan permodalan. Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) dibentuk oleh berbagai instansi pemerintah di tingkat propinsi, dibawah peraturan pemerintah propinsi. LDKP juga diharuskan untuk mengubah bentuk menjadi BPR berdasarkan UU Tahun 1992, tetapi hanya sejumlah 630 dari total 2,244 LDKP yang berhasil mengubah bentuk menjadi BPR. Baik BKD maupun LDKP berada pada zona abu-abu dalam arti bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil simpanan apabila belum mengubah bentuk menjadi BPR.

² Mayoritas tidak terdaftar dalam Undang-Undang Koperasi.

Pelaksanaan operasional LSM berada dibawah UU tentang LSM tahun 2001. LSM beroperasi di berbagai proyek atau pembentukan kelompok yang didanai oleh donor, dan menghubungkan mereka dengan lembaga perbankan formal. LSM tidak diawasi oleh badan apapun dan beberapa ada yang mengambil simpanan (tabungan) dari publik.

Berdasarkan pada UU Asosiasi tahun 1848, dua orang atau lebih dapat membentuk asosiasi untuk tujuan keuntungan (profit) atau non-profit, yang selanjutnya dapat didaftarkan pada Departemen Kehakiman untuk mendapatkan status hukum. Akan tetapi UU ini tidak dapat digunakan untuk lembaga keuangan mikro menurut Laporan Akhir ADB tahun 2003 mengenai Proyek Keuangan Mikro Pedesaan.

Perkembangan menuju Pengesahan LKM B3K

Begitu banyak Lembaga Kredit Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K), yang tidak terdaftar sebagai koperasi dan lembaga-lembaga kecil seperti kelompok, gabungan dan arisan yang tidak secara resmi tidak diperbolehkan mengambil pinjaman. Akan tetapi kenyataannya, lembaga-lembaga tersebut tumbuh subur karena kebutuhan masyarakat dan bertahan sebagai lembaga-lembaga yang mengambil simpanan (tabungan). Sebaliknya, ada pula koperasi yang mengambil simpanan (tabungan) dari yang bukan anggota, yang sebenarnya tidak diperbolehkan secara hukum yang berlaku. Dasar hukum yang ada tidak menggambarkan keadaan keuangan mikro di lapangan. Berdasarkan bukti dari hasil penelitian literatur dan survei lapangan kami, usaha mikro dan rakyat miskin benar-benar membutuhkan pelayanan keuangan dari LKM B3K karena fleksibilitas pelayanannya. Oleh karena itu, LKM B3K ini membutuhkan dasar hukum guna mendukung kegiatan operasional mereka yang kesinambungan. Tanpa status legal, lembaga-lembaga tersebut akan sulit untuk berkembang sehat dan tidak dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan baik.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut maka GTZ mengkoordinasi suatu program pendukung keuangan mikro yang dilakukan oleh Promotion of Small Financial Institutions (ProFI) atau Promosi bagi Lembaga Keuangan Kecil. Kegiatan ini membantu para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi keuangan mikro serta membantu atas disahkannya Peraturan Pemerintah oleh Keputusan MPR melalui amandemen UU Perbankan. Pada tahun 2001, Tim Inisiatif yang terdiri dari Bank Indonesia, Departemen Koperasi & UKM, Departemen Keuangan dan Sekretaris Negara mengajukan Draft UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hingga tahun 2006, status draft tersebut masih dalam tahap pembicaraan diantara para pemangku kepentingan. Kini, persiapan dalam penyelesaian draft ini melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), guna mengakomodasi kebutuhan LKM di daerah. DPD akan membuka kembali pembicaraan mengenai Draft UU tersebut melalui sosialisasi.

DPD melalui Tim Ad Hoc telah mempersiapkan ***Naskah Akademik bagi Draft UU LKM***. Tujuan dari Naskah Akademik tersebut meliputi:

- a. Untuk menyingkapkan ketidakseragaman dari peraturan yang berlaku dengan kebutuhan akan Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K).
- b. Untuk menyediakan penjelasan umum mengenai LKM B3K secara menyeluruh.

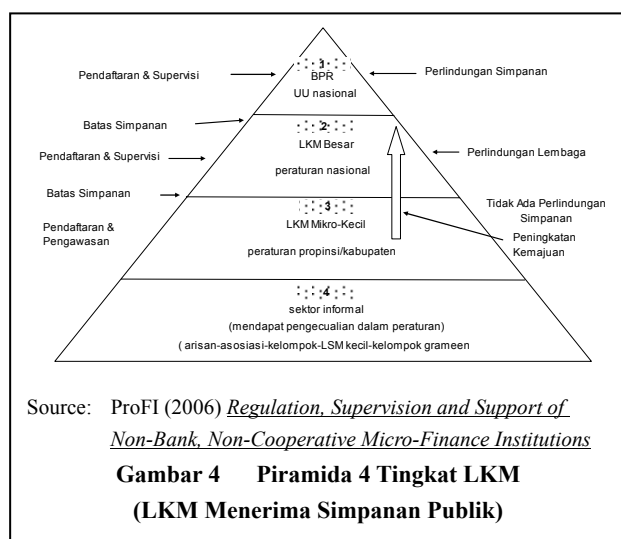
c. Untuk menyediakan masukan bagi kepastian hukum bagi LKM B3K.

Guna mengatasi kebutuhan yang mendesak akan disahkannya Undang-Undang LKM, Departemen Koperasi dan UKM telah memulai penyusunan Draft Peraturan Presiden mengenai ***Kebijakan dan Strategi Nasional bagi Perkembangan Keuangan Mikro***, yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi. Draft tersebut telah diajukan kepada Departemen Keuangan dan masih dalam proses analisa definisi, ruang lingkup, anggaran dasar dan aspek hukum dari LKM, sebelum diajukan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut akan dianggap menjadi payung bagi pertumbuhan yang pesat dari LKM yang ada serta untuk mengisi kekosongan peraturan LKM, selama ***Draft UU LKM*** masih dalam proses dan akan dijadwalkan untuk disertakan dalam Program Legislatif Nasional tahun 2007.

Kerangka hukum yang direkomendasikan meliputi tingkatan LKM sebagai berikut:

LDKP, BKD atau koperasi yang berhubungan dengan publik secara prinsip dimasukkan dalam kategori LKM Kecil Menengah (KM-LKM) pada Tingkat 3. Sedangkan lembaga yang memiliki jumlah simpanan yang besar naik menjadi LKM Besar (B-LKM) pada Tingkat 2. Kerangka hukum akan memungkinkan pelaksanaan pada tingkat nasional, yaitu amandemen

UU Perbankan (jendela hukum 1 LKM) yang mengizinkan pengesahan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden untuk menciptakan kerangka hukum bagi LKM, dan UU Koperasi (jendela hukum 2 LKM) yang mengatur kegiatan simpan pinjam koperasi, selanjutnya akan diperbaiki agar KSP/USP yang sangat besar dapat menyesuaikan dengan peraturan Badan Pengawas Nasional (NRS). Serta akan ada Peraturan LKM yang membatasi mobilisasi simpanan dari publik kepada LKM B3K (untuk menciptakan jendela hukum LKM 3). Di tingkat daerah, UU/ Peraturan Propinsi dan Peraturan/Keputusan Kabupaten perlu



disusun untuk menciptakan kerangka hukum bagi LKM Kecil Mikro.

Batas angka modal minimum (batas simpanan) bagi LKM Besar yang disarankan berkisar antara Rp. 200 juta hingga Rp. 1,500 juta.

Untuk tingkat desa, baru-baru ini UU tentang Administrasi Daerah telah diterbitkan yang mengesahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berbadan hukum. Hal ini akan memungkinkan pengelolaan kegiatan keuangan mikro, berdasarkan pada draft peraturan yang terkait yang disusun oleh Departemen Dalam Negeri.

(3) Pengantara Keuangan (Re-lending) bagi LKM

Ada beberapa bank umum yang mencoba masuk secara langsung ke dalam pasar keuangan mikro, tetapi ada pula yang mengambil langkah secara tidak langsung yaitu dengan cara memberikan pinjaman secara strategis kepada LKM. Beberapa diantara bank umum tersebut

bahkan berperan dalam peningkatan kemampuan dari LKM secara mandiri, ada pula yang bekerja sama dengan beberapa mitra dalam peningkatan kemampuan mereka. Seperti Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

(4) Peningkatan Kemampuan LKM

Selain bank, ada pula program pemerintah yang memasukan komponen peningkatan lembaga keuangan seperti: Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (RIGP atau P4K) dan Pengembangan LKM Agribisnis (LKM-A) dibawah DEPTAN, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dibawah Departemen Pekerjaan Umum, Dana Bergulir bagi USP/KSP/LKM, dan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) yang dikelola oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dibawah Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Kecamatan Development Project (KDP) dibawah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Lembaga lainnya yang memberikan fasilitas peningkatan kemampuan LKM adalah PINBUK.

(5) Program Donor di Sektor Keuangan Mikro

GTZ melaksanakan **ProFI** sejak 1999 bersama dengan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, dalam menyusun program keuangan mikro yang menyeluruh yang mencakup level mikro bagi penguatan LKM di Bali dan NTB, level meso bagi peningkatan kemampuan dan sertifikasi LKM staff, dan level makro bagi dukungan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya. ProFI juga memulai intervensi di daerah yang terkena gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk merekonstruksi sistem keuangan mikro.

World Bank (WB) mengimplementasikan dua proyek besar dalam pengentasan kemiskinan yang memasukan komponen keuangan mikro, yaitu **Kecamatan Development Project (KDP)** sejak tahun 1998, dan **Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)** atau **Urban Poverty Project (UPP)**, yang dimulai pada tahun 1999.

Asian Development Bank (ADB) mendanai **Community Empowerment for Rural Development Project (CERDP)** dari tahun 2001 hingga 2007 di 11 kabupaten, di 6 propinsi di Kalimantan dan Sulawesi, yang memiliki komponen pengembangan lembaga keuangan dan perekonomian pedesaan. ADB juga yang memulai **Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP)** di tahun 2005, yang menyediakan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami yang diterjadi di tahun 2004. ETESP memiliki komponen untuk perbaikan penghidupan termasuk keuangan mikro.

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menandatangani Paket Bantuan ODA Tahun Anggaran 2006 bagi Indonesia pada bulan Maret 2007, yang meliputi **Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project** (Proyek Infrastruktur Daerah bagi Pembangunan Sosial dan Ekonomi) guna meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan meningkatkan akses mereka terhadap pelayanan sosial melalui pembangunan infrastruktur penting yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan pembinaan keuangan mikro di daerah dengan tingkat kemiskinan yang merata.

2.3 Kebijakan Sektor Pertanian

2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2004 hingga 2009 disahkan pada tanggal 19 Januari 2005 melalui Keputusan Presiden No.7 Tahun 2005, yang berfokus pada tiga agenda sebagai tonggak utama yaitu: i) Menciptakan negara yang aman dan damai, ii) Menciptakan negara yang adil dan demokratis dan iii) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran dari RPJMN adalah untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadi 8.2% dari jumlah populasi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari 5.5% menjadi 7.6%, dan mengurangi angka pengangguran dari 9.7% tahun 2004 menjadi 5.1% sebelum tahun 2009.

Dalam agenda kerja, telah diseleksi 9 prioritas yang meliputi: 1) penanggulangan kemiskinan, 2) peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, 3) revitalisasi pertanian dan daerah pedesaan, 4) peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan, 5) pembenahan sistem hukum, birokrasi dan pemberantasan korupsi, 6) peningkatan kemampuan ketahanan negara, stabilisasi keamanan dan ketertiban serta penanggulangan konflik, 7) penanggulangan dan pengelolaan bencana, 8) percepatan pembangunan infrastruktur, dan 9) pembangunan pedesaan dan daerah tertinggal. Poin utama dari tiap prioritas dijelaskan pada Tabel 2.3.1.

Dalam prioritas “revitalisasi pertanian dan pengembangan daerah pedesaan”, fokus utama dari sektor pertanian diberikan kepada: i) ketahanan pangan nasional, ii) peningkatan kualitas pertumbuhan produksi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan, iii) pengembangan ekonomi pedesaan dan infrastruktur pedesaan dan iv) pengembangan sumber daya alam bagi sumber energi terbarukan, seperti dijelaskan pada Tabel 2.3.2.

2.3.2 Rencana Pembangunan Pertanian 2005 – 2009

Agenda utama sektor pertanian pada RPJMN adalah “Revitalisasi Pertanian” guna meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pedesaan dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Dalam agenda tersebut, DEPTAN telah menyusun Rencana Pembangunan Pertanian tahun 2005 hingga 2009 sebagai rencana pembangunan jangka menengah yang telah diterbitkan bulan Januari 2005.

Rencana Pembangunan Pertanian menekankan terhadap peningkatan: 1) Ketahanan Pangan, 2) Nilai tambah dan daya saing bagi produk hasil pertanian dan 3) Kesejahteraan petani. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada periode ini meliputi i) Laju pertumbuhan rata-rata PDB menjadi 3.3% per tahun di sektor pertanian, ii) Menciptakan lapangan kerja menjadi 44.5 juta di tahun 2009, iii) Meningkatkan nilai tambah pada tingkat 5% per tahun, iv) Pertumbuhan produktifitas tenaga kerja pada tingkat 1.4% per tahun, v) Pengurangan kemiskinan di pedesaan menjadi 15.0% sebelum 2009. Guna mencapai sasaran tersebut diatas, maka tiga program pembangunan telah disusun yang mencakup 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, 2) Program Pengembangan Agribisnis dan 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan merupakan komponen utama dalam Program Pengembangan Agribisnis.

2.3.3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (DG P2HP) telah menyusun kebijakan dan rencana strategis untuk tahun 2006 – 2009 berdasarkan pada visi dan misi dari Departemen Pertanian dan Rencana Pembangunan Nasional. Rencana strategis tersebut meliputi tujuan dan sasaran dari pengolahan dan pemasaran hasil pertanian seperti yang dirangkum dibawah ini:

Tujuan:

- (a) Untuk mendorong petani dan pelaku agribisnis untuk dapat mengakses teknologi dari pengolahan produk dan pasca panen, serta informasi pasar.
- (b) Untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian ke tingkat desa guna meningkatkan kemampuan persaingan dan nilai tambah, serta untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (c) Untuk mendorong masyarakat untuk menyukai hasil pertanian domestik.
- (d) Untuk menambah volume, nilai dan keragaman produk segar dan olahan.

Sasaran:

- (a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam melakukan usaha mereka,
- (b) Menurunkan kerugian produk hasil pertanian,
- (c) Meningkatkan swadaya dan ketahanan pangan,
- (d) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari hasil pertanian,
- (e) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan
- (f) Meningkatkan nilai tukar mata uang dari ekspor hasil pertanian.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, strategi dan kebijakan harus dipersiapkan bagi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, seperti terangkum dibawah ini:

- (a) Meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta lembaga dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (b) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan dan pasca panen.
- (c) Meningkatkan efisiensi pemasaran, pengolahan dan pasca panen dari hasil pertanian.
- (d) Meningkatkan pemasaran domestik dan internasional.
- (e) Pendekatan pembangunan industri melalui konsep kluster untuk mendukung kesinambungan.

Dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut diatas, kegiatan-kegiatan pelaksanaan dijelaskan dalam tiga program utama seperti: i) program peningkatan ketahanan pangan, ii) program pengembangan agribisnis dan iii) program peningkatan pendapatan petani, seperti dijelaskan pada Tabel 2.3.3.

Mengenai perbaikan masalah kelembagaan dari pemasaran, “Studi tentang Peningkatan Sistem Kelembagaan dan Informasi Pasar bagi Produk Pertanian” telah dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan atas bantuan JICA pada tahun 2004. Hasil Studi tersebut memberikan rekomendasi untuk (i) membentuk pusat distribusi lokal dan regional; (ii) memperbaiki pasar tradisional; (iii) memperbaiki sistem informasi pasar melalui pendekatan menyeluruh; dan (iv) menyusun kerangka hukum yang tepat.

2.3.4 Keuangan Mikro Pedesaan dan Pembiayaan Pertanian

(1) Kebijakan dan Program Departemen Pertanian

Kebijakan keuangan Departemen Keuangan (DEPTAN) dijelaskan dalam Rencana Strategis 2005-2009 dan Pusat Pembiayaan Pertanian DEPTAN.

Pemerintah selama ini telah menyediakan likuiditas kredit melalui Bank Indonesia (BI) sampai dengan tahun 1999, yang kemudian dihentikan. Pada prinsipnya kini, faktor utama dalam membantu petani adalah melalui pembiayaan komersial, dan peran pemerintah dalam hal ini adalah memfasilitasi, meregulasi, memotivasi dan mempromosikan akses terhadap pelayanan keuangan bagi petani.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian adalah sebesar Rp.77 triliun untuk jangka 5 tahun, tetapi hanya 6% diperkirakan akan dibiayai oleh lembaga perbankan. Menurut analisa masalah yang dilakukan DEPTAN, akses yang tidak memadai dalam permodalan, terutama bagi petani pemilik lahan kecil dan petani tanpa lahan di daerah pedesaan adalah disebabkan oleh, pertama, keterbatasan lembaga keuangan formal yang sudah terbentuk; kedua, prosedur dan persyaratan yang diperlukan oleh lembaga keuangan formal sangat sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat pedesaan; dan ketiga, petani tidak dapat mengakses kredit karena peraturan dan tingginya suku bunga yang diterapkan bagi usaha komersial. Sistem perbankan selama ini tidak mendukung perekonomian pedesaan, terutama pertanian dan cenderung untuk menguras modal dari daerah pedesaan.

Esensi dari kebijakan keuangan DEPTAN adalah untuk menstimulasi dana masyarakat melalui penggunaan alokasi anggaran dari APBN dan APBD, dalam bentuk program kredit, intervensi pada kredit komersial dan fasilitasi akses permodalan melalui pembiayaan non-bank. Guna mewujudkan mandat tersebut, Pusat Pembiayaan Pertanian dibentuk pada tahun 2005 dibawah Sekretariat Jenderal, yang terdiri dari beberapa seksi yaitu program kredit, keuangan Syariah, keuangan komersial, dan administrasi. Sedangkan strategi yang diterapkan oleh Pusat Pembiayaan Pertanian DEPTAN adalah sebagai berikut:

- (i) Modifikasi kebijakan pendanaan yang ada
- (ii) Meningkatkan aksesibilitas petani/pemangku kepentingan terhadap pembiayaan bank atau non-bank
- (iii) Sosialisasi sumber-sumber pembiayaan yang ada
- (iv) Intensifikasi kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor

- (v) Pengembangan dari: (a) skema kredit yang ada bagi pertanian/agribisnis; (b) skema subsidi bunga kredit, (c) skema penjaminan kredit, (d) skema keuangan Syariah, (e) LKM bagi daerah pedesaan dan UKM pertanian, (f) konsep lembaga pembiayaan agribisnis, (g) kebijakan asuransi komoditas pertanian dan lembaga asuransi.

Program pembiayaan utama yang dikelola oleh DEPTAN dijelaskan bawah ini dan diringkas dalam Gambar 2.3.1.

- (a) Kredit BIMAS (Bimbingan Masal)
- (b) KUT (Kredit Usaha Tani)
- (c) KKP (Kredit Ketahanan Pangan)
- (d) DPM-LUEP (Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan)
- (e) P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil)
- (f) BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
- (g) BPLM (Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat)
- (h) PMAM-PMUK (Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok)
- (i) LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)
- (j) SP-3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian)

Disamping itu, DEPTAN mengelola program kecil lainnya untuk meningkatkan akses keuangan dalam sektor pertanian seperti Studi tentang Perbankan Syariah pada Komoditas Pertanian dan program yang menghubungkan agribisnis dengan pelayanan pemanfaatan modal ventura.

Rangkaian dari program pembiayaan DEPTAN dapat dikategorikan dalam dua kategori berdasarkan tujuan: (i) peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan (ii) promosi agribisnis, dengan tujuan utama ketahanan pangan. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbagai usaha telah dilakukan tidak saja oleh pihak DEPTAN tetapi juga oleh Kementerian lain dan pemerintah daerah, yang juga termasuk berbagai jenis program pembiayaan.

Pelajaran yang didapat dari pengkajian ulang dari program pembiayaan yang dikelola oleh DEPTAN adalah bahwa bantuan untuk pengembangan kemampuan kelompok tani sangat dibutuhkan sehingga dapat membantu kelompok tani untuk dapat mengelola dana serta berfungsi sebagai kelompok usaha.

(2) Kebijakan dan Program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten

Kebijakan keuangan mikro pedesaan dan pertanian dari pemerintah Propinsi dan Kabupaten masih berfokus kepada ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah telah membiayai program-program bagi budidaya tanaman pangan dan KUKM termasuk usaha agribisnis. Ini juga bertujuan untuk membina pembentukan LKM koperasi. Secara umum, program-program tersebut bertumpu hanya kepada dukungan modal saja tetapi kurang dalam pembinaan teknis.

2.3.5 Penyuluhan Pertanian

(1) Latar Belakang Penyuluhan Pertanian

Sebelum periode 1980-an, prioritas sektor pertanian diberikan untuk mencapai swadaya pangan nasional. Sesuai dengan kebijakan tersebut, kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk mencapai target utama tersebut melalui inisiatif kuat pemerintah. Program Bimas dari Badan Intensifikasi Pertanian sebagai contoh, dinyatakan sangat berhasil dengan revolusi hijau melalui program pengembangan beras. Selanjutnya, Kelompok Tani sebagai unit dari penyuluhan, secara aktif telah terbentuk.

Setelah tercapainya swadaya pangan dan sejak dikeluarkannya Keputusan Bersama Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertanian No. 54 Tahun 1996 dan No. 301/Kpts/LP.120/4/1996 mengenai pedoman umum bagi penyuluhan pertanian, fokus sektor pertanian pertanian lebih banyak diberikan kepada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi petani sesuai dengan kebijakan desentralisasi, yang mendasari penyusunan metodologi dan pedoman umum.

Program utama dalam kegiatan penyuluhan pertanian pada tahun-tahun terakhir ini adalah untuk melayani kebutuhan petani dengan lebih baik dan untuk mengakomodasi perbedaan yang ada di daerah seperti: (i) Proses Penyuluhan Kemitraan (PROSPEK), (ii) Proyek Pengembangan Sistem KUF (Kalimantan Upland Farming), (iii) Program DELIVERI (Decentralized Livestock Services Project in Eastern Indonesia), (iv) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT), (v) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) dan (vi) Program DAFED (Decentralized Agriculture and Forestry Extension Project).³

(2) Proses Pendaftaran Kelompok Tani

Jumlah Kelompok Tani dan Pusat Penyuluhan Pertanian yang dibentuk selama tahun 1990-an hingga 2001 dirangkum dalam Tabel 15 dibawah ini:

Tabel 15 Jumlah Kelompok Tani dan Badan Penyuluhan Pertanian

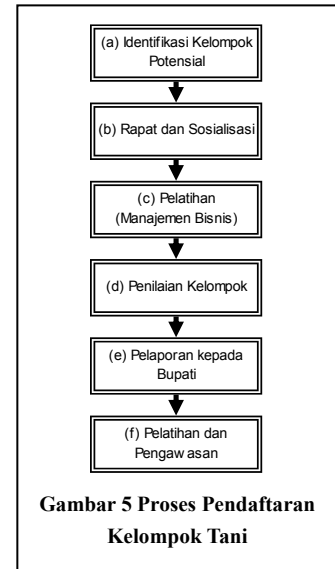
	1997	1998	1999	2000	2001
1. Kelompok Tani / Nelayan					
- Pemula	117,542	127,339	123,064	122,344	338,975
- Madya	108,073	119,971	117,597	119,812	122,344
- Lanjut	71,288	73,814	77,597	73,802	119,812
- Mandiri	21,800	23,016	27,379	23,017	73,802
Total Kelompok Tani	318,703	344,140	345,637	338,975	654,933
2. Badan Penyuluhan Pertanian	50	58	60	121	137

Sumber: JICA (2002), Basic Study for Vitalization of Rural Economy in Indonesia (Present Situation, Direction and Key Issues of Agribusiness, Marketing and Financial System)

³ Dijelaskan dalam *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Partisipatif Spesifik Lokal*, oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia (2001).

Proses pendaftaran sebagai Kelompok Tani, diilustrasikan pada Gambar 5 dan dijelaskan berikut ini:⁴

- (a) **Identifikasi Kelompok Potensial:** Kelompok-kelompok tani yang berpotensi akan diidentifikasi oleh Dinas, Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) melalui penilaian profil kelompok, termasuk lokasi, kegiatan kelompok, jumlah anggota dan sebagainya.
- (b) **Musyawarah dan Sosialisasi:** Musyawarah diselenggarakan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan petani di tempat calon kelompok. Pamong desa dan pemuka masyarakat ikut menghadiri musyawarah tersebut. Topik dari musyawarah meliputi: tujuan dari kelompok tani, keuntungan menjadi anggota kelompok, proses pembentukan kelompok, kegiatan bernilai tambah dan lain sebagainya.



- (c) **Pelatihan:** Pelatihan khusus diberikan oleh PPL dan Dinas sedangkan topik dari pelatihan tersebut meliputi: kelompok dan pengelolaan usaha (1 hingga 2 minggu). Rapat anggota harus dilakukan secara berkala segera setelah pelatihan tersebut.
- (d) **Penilaian Kelompok:** Penilaian kelompok tani dibuat berdasarkan pada hasil pelatihan oleh Dinas (4 peringkat).
- (e) **Pelaporan kepada Bupati:** Hasil pelatihan tersebut dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas. Pendaftaran dan persetujuan dilakukan oleh Bupati.
- (f) **Pelatihan Berkala dan Pengawasan:** Pelatihan secara berkala (setengah hari) diadakan setiap dua minggu demikian halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh PPL.

(3) Badan Penyuluhan Pertanian

Badan Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) merupakan lembaga penting yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian yang berada pada setiap kabupaten sebelum desentralisasi. BIPP bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan supervisi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), untuk menyetujui rencana tindakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun oleh kantor kecamatan, dan untuk mengevaluasi dan memonitor kegiatan penyuluhan pertanian. Saat ini, beberapa kabupaten telah mengubah keorganisasian badan ini menjadi badan, kantor, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sub-divisi, seksi atau kelompok fungsional atau bentuk lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

⁴ Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka dan Departemen Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian (1997), Pembinaan Kelompoktani-Nelayan

Tabel 16 Badan Penyuluhan Pertanian

Propinsi	BIPP	Badan	Kantor	UPTD	Sub-divisi	Seksi	Kelompok Fungsional	Others
Jawa Barat	1	0	7	1	5	0	9	1
Jawa Timur	4	0	7	0	7	2	17	1

Sumber: JICA (2005), the Support Program for Agriculture and Fisheries Development in the Republic of Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian tersebut, DEPTAN bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman umum, pelaksanaan pengawasan dan penyediaan bantuan teknis bagi PPL melalui Dinas Kabupaten. Sistem pengorganisasian seperti ini sebenarnya berbeda di setiap kabupaten. Beberapa kabupaten tetap menggunakan BIPP sedangkan kabupaten yang lain memiliki keduanya, BIPP dan UPTD. Hal tersebut pula yang kemudian menyebabkan kebingungan dalam pembagian tanggung jawab bagi kegiatan penyuluhan pertanian. Guna memperbaiki situasi tersebut, akan sangat penting untuk menyusun ulang kerangka kerja penyuluhan pertanian secara sistematis dengan mempertimbangkan desentralisasi.

BAB 3 KONDISI WILAYAH STUDI SAAT INI

3.1 Prosedur Pelaksanaan Survei

3.1.1 Survei Lapangan dan Seleksi Kelompok Tani

Kelompok Tani yang disurvei pada Studi ini diseleksi melalui diskusi dengan Dinas dan berdasarkan pada data produksi komoditas contoh di tingkat kecamatan. Secara umum, 5 sampai 9 Kelompok Tani dipilih untuk komoditas contoh sedangkan 2 atau 3 Kelompok Tani lain dipilih untuk sub komoditas sebagai referensi bagi kabupaten lain.

Di tiap kabupaten, survei lapangan pada Kelompok Tani terpilih dilaksanakan lebih dari seminggu. Berdasarkan survei ini, evaluasi kualitatif disusun menurut kategori: (i) keuangan, (ii) sosial-ekonomi, (iii) organisasi, (iv) tingkat teknologi produksi dan pengolahan, (v) potensi pemasaran dan (vi) rencana ke depan. Tiap kategori tersebut diatas memiliki sub kategori seperti ditunjukkan pada Tabel 16:

Tabel 17 Kategori Evaluasi dalam Pemilihan Kelompok Tani

Kategori	Sub Kategori
a Keuangan	1) Pengalaman Simpan Pinjam, 2) Kemampuan Mengelola Pinjaman dan/atau Hibah dari Pemerintah, 3) Keberadaan Laporan Keuangan & Laba Rugi, 4) Akses ke Lembaga Keuangan
b Sosial-Ekonomi	1) Rasio Populasi Miskin, 2) Keseimbangan Gender dalam Kelompok, 3) Dampak pada Lingkungan
c Organisasi	1) Kepemimpinan, 2) Bagi Hasil, 3) Fungsi, 4) Tingkat Kegiatan Kelompok, 5) Hubungan dengan Kelompok Lain
d Tingkat Teknologi Produksi dan Teknologi Pengolahan	1) Tingkat Teknologi Produksi, 2) Tingkat Teknologi Pengolahan, 4) Kemampuan Mengadopsi Teknologi Baru pada Produksi & Pengolahan, 5) Kemampuan Merawat Peralatan Produksi dan Pengolahan
e Potensi Pemasaran	1) Konsep Pasar, 2) Kemampuan Mengembangkan Pasar, 3) Ketersediaan Pasar
f Rencana ke Depan	1) Keberadaan Rencana Pengembangan Kelompok, 2) Fisibilitas Rencana
6 Kategori	21 Sub Kategori

Melalui proses penyaringan dengan memberikan bobot penilaian pada setiap sub kategori, 2 atau 3 Kelompok Tani dipilih sebagai kelompok model di tiap kabupaten untuk dilakukan survei yang mendalam, termasuk survei rumah tangga dan wawancara mengenai pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, tingkat kekayaan, latar belakang pendidikan dan pengalaman simpan pinjam. Kategori ini dikonfirmasi melalui kegiatan survei tingkat kemiskinan. Seminar lapangan diselenggarakan pada tiap kelompok untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi guna memperoleh masukan dari masyarakat.

3.1.2 Seminar Lapangan dan Survei Tingkat Kemiskinan

Umum

Seminar lapangan diselenggarakan di Kelompok Tani terpilih. Melalui seminar, informasi dibawah ini dikumpulkan untuk menilai kebutuhan dan mengumpulkan masukan dari kelompok sasaran mengenai pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan.

- Kebutuhan, kendala dan persepsi peserta mengenai produksi, pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan keuangan pedesaan
- Identifikasi masalah dan tingkat pengalaman yang dimiliki kelompok sasaran untuk membantu meningkatkan pendapatan mereka
- Identifikasi solusi bagi masalah-masalah yang ada dengan: (i) mempertimbangkan solusi jangka pendek dan jangka panjang; (ii) memprakarsai inisiatif yang muncul dari kelompok sasaran sendiri; dan (iii) menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan ini dan yang diharapkan dapat bekerjasama.

Seminar lapangan ini diselenggarakan selama satu hari. Tiap sesi dimulai dengan penjelasan kepada peserta mengenai tujuan dan metodologi seminar, seperti pendekatan partisipasi aktif petani. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah dan kendala (sensus masalah), hubungan kelembagaan dan dilanjutkan dengan persiapan kegiatan selanjutnya seperti, diskusi kelompok dan diskusi kelompok yang terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan menggunakan metode Pemetaan Mobilitas dan Diagram Kelembagaan.

Penilaian tingkat kemiskinan (*Poverty Ranking*) dilaksanakan secara terpisah selama setengah hari pada tiap masyarakat dari Kelompok Tani terpilih. Pada sesi ini, kemiskinan diklasifikasikan dalam 4 kategori: (i) Melarat (paling miskin), (ii) Miskin, (iii) Sedang, dan (iv) Kaya. Kemiskinan memiliki multi-dimensi, rumit, dan tiap masyarakat memiliki konsep tentang risiko yang berbeda. Oleh karenanya, klasifikasi dibuat berdasarkan pada (i) tingkat pendapatan, (ii) aset yang dimiliki, (iii) tingkat pendidikan, (iv) tingkat kepuasan dari kebutuhan dasar, dan (v) transaksi keuangan dengan lembaga keuangan. Pemberian peringkat dari tiap kategori ini ditentukan oleh setiap peserta seminar.

Seperti yang diringkas dalam Tabel 18, 23 Kelompok Tani telah disurvei di Propinsi Jawa Barat dan 11 Kelompok Tani di Propinsi Jawa Timur. Dari Kelompok-kelompok Tani tersebut, seminar lapangan dan survei tingkat kemiskinan dilakukan pada 8 Kelompok Tani di Jawa Barat dan 5 Kelompok Tani di Jawa Timur.

Tabel 18 Jumlah Kelompok Tani yang Disurvei

Propinsi	Kabupaten	Kelompok Tani	
		Penelitian Dasar	Seminar Lapangan
Jawa Barat	Cirebon	9	3
	Kuningan	7	2
	Majalengka	7	3

Propinsi	Kabupaten	Kelompok Tani	
		Penelitian Dasar	Seminar Lapangan
	Total Jawa Barat	23	8
Jawa Timur	Mojokerto	5	3
	Kediri	6	2
	Total Jawa Barat	11	5
Total		34	13

3.2 Kondisi Umum

3.2.1 Lokasi dan Administrasi

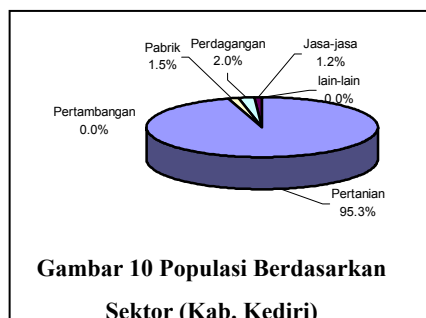
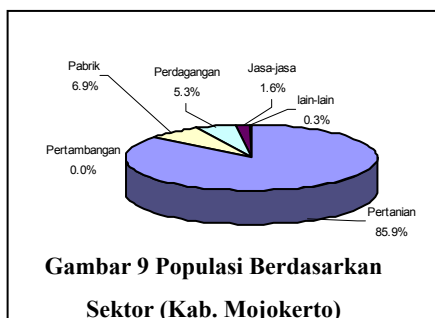
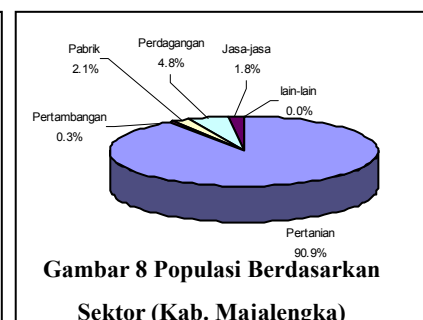
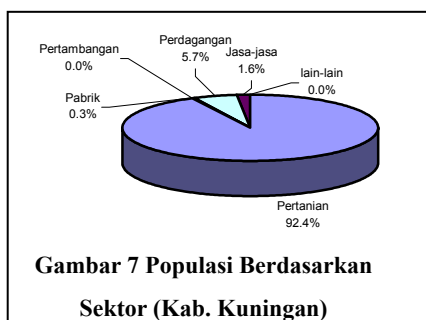
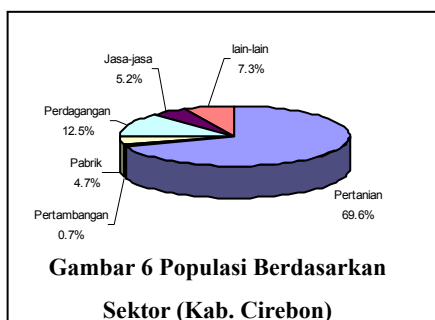
Gambaran ringkas administratif dari kabupaten sasaran ditunjukkan pada Tabel 18. Populasi penduduk tiap kabupaten yang dilakukan Studi jumlahnya mulai dari 981,900 jiwa di Mojokerto sampai dengan lebih dari 2 juta jiwa di Cirebon, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan.

Tabel 19 Gambaran Ringkas Administratif

Propinsi	Kabupaten	Populasi	Kepadatan Populasi	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Jawa Barat	Cirebon	2,057,000	2,076 per km ²	31	424
	Kuningan	1,056,100	1,309 per km ²	29	373
	Majalengka	1,166,600	969 per km ²	23	331
Jawa Timur	Mojokerto	981,900	1,368 per km ²	18	304
	Kediri	1,513,500	1,092 per km ²	26	332

Sumber: Data and Kode Wilayah Administratif Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur (2005)

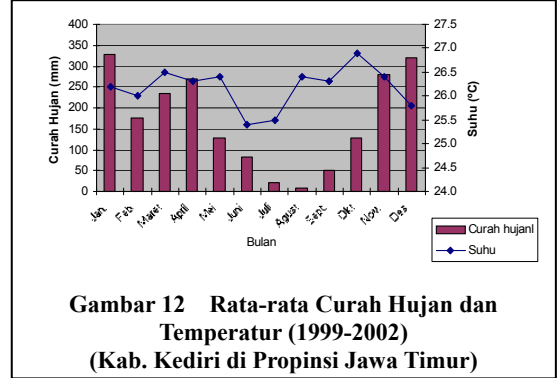
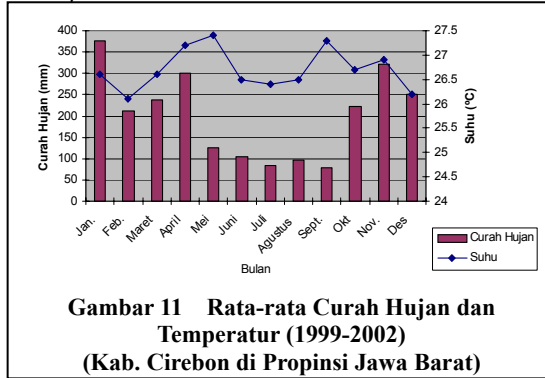
Menurut data populasi berdasarkan sektor yang dicatat BPS (2003) dalam *Statistik Potensi Desa 2003*, meskipun porsi sektor pertanian dalam GRDP akhir-akhir ini menurun, namun populasi pertanian masih dominan di wilayah Studi seperti yang terlihat dalam Gambar 6 sampai Gambar 10:



3.2.2 Kondisi Alam

(1) Temperatur dan Curah Hujan

Rata-rata curah hujan dan temperatur di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kediri ditunjukkan dalam Gambar berikut ini:

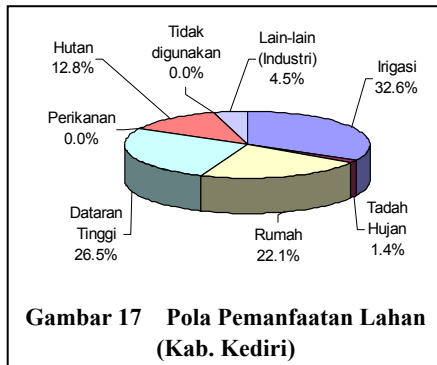
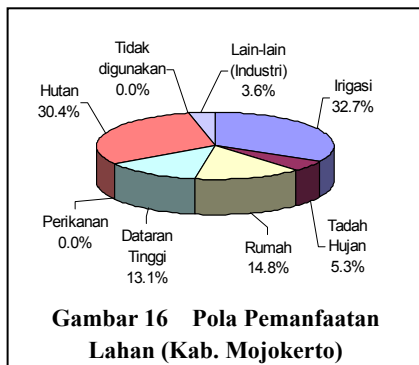
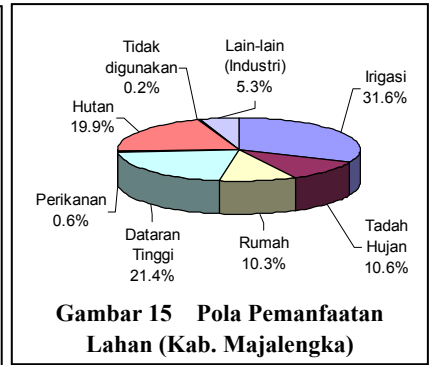
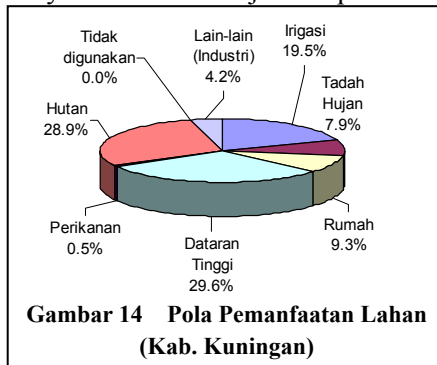
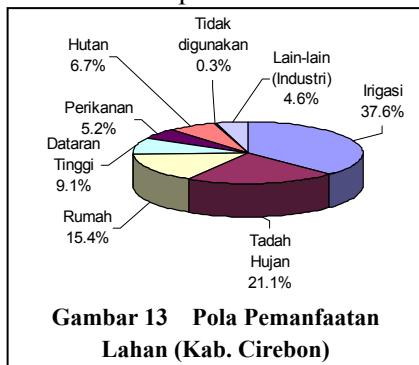


Karakteristik iklim di wilayah Studi pada umumnya bertemperatur tinggi dan lembab. Musim kering mulai dari Mei sampai September, sementara musim hujan mulai dari Oktober sampai April. 80% dari curah hujan terjadi pada musim hujan. Temperatur rata-rata mendekati 26 derajat Celsius.

Pola curah hujan antara propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan sedikit perbedaan. Secara perbandingan, curah hujan tahunan di Jawa Timur lebih sedikit, sekitar 2,000 mm, dibanding Jawa Barat yang curah hujannya antara 2,400 sampai 2,600 mm. Di Jawa Timur antara musim panas dengan musim dingin terlihat jelas berbeda. Seluruh kabupaten contoh menghadapi kekeringan serius di tahun 2002 karena rata-rata curah hujan turun sampai 30% sehingga menyebabkan turunnya produksi hasil pertanian.

(2) Pemanfaatan Lahan

Pola pemanfaatan lahan di wilayah sasaran ditunjukkan pada Gambar 13 - Gambar 17:



Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang irigasinya paling maju, ini disebabkan oleh kondisi topografi yang rata. Selain itu, Cirebon juga merupakan daerah perikanan yang maju dengan memanfaatkan daerah pantai. Sedangkan, Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kediri merupakan daerah pegunungan sehingga sebagian besar lahannya berupa hutan dan ladang dataran tinggi.

3.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS didasarkan pada tingkat pengeluaran kebutuhan untuk membeli 2,100 kkal makanan dan kebutuhan dasar lain yang bukan makanan. Garis kemiskinan secara nasional adalah sekitar Rp.152,847 per bulan per orang pada Maret 2006.

Pada umumnya, rasio kemiskinan di Propinsi Jawa Timur lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat. Untuk daerah studi, yaitu 5 kabupaten, memiliki rasio populasi miskin yang lebih tinggi daripada rata-rata rasio tiap propinsi. Garis kemiskinan, populasi miskin dan rasio populasi miskin di tiap kabupaten ditunjukkan pada Tabel 19.

Tabel 20 Indeks Kemiskinan

Propinsi	Kabupaten	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bulan)	Populasi Miskin (orang)	Rasio Populasi Miskin
Jawa Barat	Cirebon	120,074	352,400	17.3%
	Kuningan	123,267	201,700	19.5%
	Majalengka	129,547	203,700	17.7%
	Rata-rata Jawa Barat	-	-	12.9%
Jawa Timur	Mojokerto	140,862	166,100	17.2%
	Kediri	112,907	289,200	19.6%
	Rata-rata Jawa Timur	-	-	20.9%

Sumber: UNDP (2004), National Human Development Report 2004.

Sebagai tambahan, indikator dasar sosial dari lima kabupaten, harapan hidup, tingkat keaksaraan orang dewasa, rata-rata lama sekolah dan tingkat kematian bayi, ditunjukkan pada Tabel 20:

Tabel 21 Indikator Dasar Sosial

Propinsi	Kabupaten	Harapan Hidup	Tingkat Keaksaraan	Rata-rata Lama Sekolah	Kematian Bayi (per 1,000)
Jawa Barat	Cirebon	63.3 tahun	87.0%	6.0 tahun	55.5
	Kuningan	65.1 tahun	90.5%	6.4 tahun	48.4
	Majalengka	63.5 tahun	91.0%	6.4 tahun	54.7
	Rata-rata Jawa Barat	64.5 tahun	93.1%	7.2 tahun	47.0
Jawa Timur	Mojokerto	68.1 tahun	89.4%	6.6 tahun	35.8
	Kediri	68.1 tahun	87.5%	6.6 tahun	36.3
	Rata-rata Jawa Timur	-	83.2%	6.5 tahun	47.0

Sumber: UNDP (2004), Laporan Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia 2004

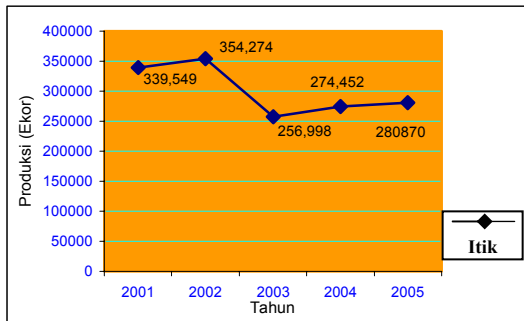
Sebagian besar indikator di tiga kabupaten di Jawa Barat terlihat lebih rendah dibanding rata-rata propinsi, sementara dua kabupaten di Jawa Timur terlihat lebih tinggi dari rata-rata propinsi. Untuk memperbaiki situasi ini, program pengentasan kemiskinan menjadi hal yang utama untuk dilakukan di wilayah studi.

3.3 Kabupaten Cirebon

3.3.1 Umum

(1) Kebijakan Kabupaten pada Pengembangan Ternak dan Komoditas Contoh

Sesuai dengan Rencana Strategis 2005-2009, untuk meningkatkan pendapatan petani, Kabupaten Cirebon memfokuskan diri kepada usaha mempromosikan agribisnis yang berbasis peternakan. Sejalan dengan visi ini, Cirebon bermaksud meningkatkan produksi ternak sebesar 1.8% sampai 12.2% dari 2005 sampai 2009. Dari persentase tersebut, perhatian utama diberikan kepada daging itik, DOD (*Day Old Duck*) dan itik dara (*pullet*) sebagai produk ternak yang berpotensi ekspor. Karena itu, investasi di sektor peternakan direncanakan bisa ditingkatkan sampai 12.2% selama periode 2005-2009. Untuk mewujudkan visi ini, 4 program diprioritaskan: i) program program pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur.



Sumber: Peternakan Dalam Angka (2005), Dinas Peternakan Kab. Cirebon, 74-75

Gambar 18 Produksi Itik, Cirebon

Kapetakan (48,220 ekor), Losari (39,900 ekor) dan Cirebon Utara (17,600 ekor), yang merupakan 81% total produksi.

(2) Administrasi Lokal

Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon terdiri dari 5 divisi: (i) Divisi Produksi Ternak, (ii) Divisi Pengembangan Usaha Ternak, (iii) Divisi Kesehatan Hewan, (iv) Divisi Infrastruktur Peternakan, dan (v) Divisi Administrasi. Kelompok fungsional dikelola secara terpisah dari kelima divisi ini untuk mendukung kegiatan teknis Dinas yang diinstruksikan oleh Kepala Dinas.

3.3.2 Karakteristik Kelompok Tani

(1) Survei Lapangan Kelompok Tani dan Hasil Evaluasi

Sembilan Kelompok Tani yang disurvei, dan karakteristiknya disajikan dalam Tabel 21:

Tabel 22 Ringkasan Kelompok Tani di Kabupaten Cirebon

	Karakteristik Utama	
	Keunggulan	Kelemahan
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Dari 9 kelompok, 6 kelompok memiliki pengalaman simpan pinjam. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan dan transaksi keuangan sebelumnya tidak tercatat. Dana bergulir tidak berjalan sebagaimana mestinya.

	Karakteristik Utama	
	Keunggulan	Kelemahan
Sosial-Ekonomi: Rasio Populasi Miskin: 0.28 - 0.47 ^{1*}	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan dampak negatif pada lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan wanita relatif kurang terlihat di hampir semua kelompok (kurang dari 20% anggota).
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan kerjasama dibuat oleh 4 kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> Keuntungan dari kegiatan kelompok dikuasai oleh beberapa anggota. Mekanisme bagi hasil tidak jelas.
Tingkat Teknologi Produksi dan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan kerjasama di antara kelompok berjalan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseminasi sistem seperti ini sulit dilakukan pada kelompok lain karena terbatasnya anggaran Dinas.
Potensi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Pemasaran di antara 4 kelompok seperti dalam kesepakatan kerjasama berjalan cukup efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasaran dilakukan oleh individu bukan kelompok di hampir semua kelompok.
Rencana Ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana ke depan dalam pengembangan usaha itik telah dipersiapkan dengan baik, khususnya pada 4 kelompok tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa kelompok masih lemah dalam mempersiapkan rencana ke depan. Dukungan Dinas pada kelompok kecil masih kurang.

1*: Smeru Research Institute (2000), Peta Kemiskinan Indonesia 2000

Tiap Kelompok Tani memiliki tingkat produksi dan pengolahan yang berbeda, demikian juga hubungan dengan target pemasaran mereka. Beberapa Kelompok Tani menjual produk mereka di sekitar desa. Sementara itu, Kelompok Tani Tigan Mekar terfokus pada pasar yang lebih luas termasuk di luar propinsi. Berdasarkan target pasarnya, Kelompok Tani diklasifikasikan menjadi 3 kategori: (i) di sekitar desa, (ii) di kabupaten dan (iii) lintas propinsi. Penilaian kualitatif hasil evaluasi untuk ketiga jenis kelompok ini disusun dalam Tabel 22 berikut:

Tabel 23 Hasil Evaluasi Kelompok Tani (Kabupaten Cirebon)

Tipe Pemasaran	Kelompok Tani	Keuangan		Sosial-Ekonomi		Organisasi		Produksi & Pengolahan		Potensi Pemasaran		Rencana Kedepan		Total	
		Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase
	(Nilai Penuh)	18.0		9.0		26.5		16.0		18.5		12.0		100.0	
Pasar di Sekitar Desa	Jambul Jaya 7 Kec. CRBN Utara Desa Babadan	4.8	27%	5.4	60%	9.0	34%	10.4	65%	10.5	57%	7.2	60%	47.3	47%
	Jambul Jaya 6 Kec. Panguragan	4.8	27%	4.2	47%	14.5	55%	8.8	55%	12.5	68%	6.0	50%	50.8	51%
	Sigranala Indah Kec. Kaliwedi	4.8	27%	5.4	60%	20.6	78%	12.8	80%	16.1	87%	10.8	90%	70.5	71%
Pasar di Kabupaten	Trubus Kec. Kapetakan	4.8	27%	5.4	60%	9.0	34%	10.4	65%	10.5	57%	7.2	60%	47.3	47%
	Bebek Jaya Kec. CRBN Utara	13.8	77%	4.2	47%	23.2	88%	11.2	70%	11.1	60%	7.2	60%	70.7	71%
	Branjangan Putih Kec. Losari	18.0	100%	4.8	53%	22.2	84%	13.6	85%	14.8	80%	9.6	80%	83.0	83%
Pasar Lintas Provinsi	Syeh Magelung Sakti Kec. Kapetakan	8.4	47%	5.4	60%	15.8	60%	12.0	75%	13.8	75%	6.0	50%	61.4	61%
	Tigan Mekar Kec. Panguragan	9.0	50%	5.4	60%	23.2	88%	11.2	70%	14.5	78%	9.6	80%	72.9	73%
	Sari Sejahtera Kec. Gebang	11.4	63%	4.8	53%	19.8	75%	12.8	80%	14.8	80%	8.4	70%	72.0	72%

Berdasarkan hasil penilaian dan hasil diskusi dengan Dinas, dipilih tiga Kelompok Tani yaitu Sigranala Indah untuk mewakili kelompok yang memiliki target pasar di sekitar desa, Bebek Jaya yang mewakili target pasar di dalam kabupaten dan Tigan Mekar

mewakili target pasar lintas propinsi untuk segera dilakukan studi lanjutan, seminar lapangan dan mempersiapkan rencana perbaikan sebagai model Kelompok Tani itik di Cirebon.

Dari tiap kategori, Sigranala Indah (kelompok yang pasarnya di sekitar desa), Bebek Jaya (kelompok yang pasarnya di dalam kabupaten) dan Tigan Mekar (kelompok yang pasarnya lintas propinsi) dipilih untuk segera melaksanakan studi dan seminar lapangan yang lebih rinci, dan mempersiapkan rencana perbaikan sebagai model Kelompok Tani itik di Cirebon.

(2) Hubungan Kelembagaan dan Alur Produksi-Pemasaran

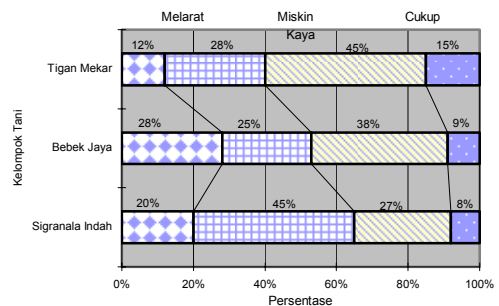
Peta hubungan kelembagaan disusun untuk menjelaskan lembaga apa yang berhubungan dengan masyarakat di sekitar kelompok, dan sejauh mana kedekatannya dengan lembaga tersebut. Tiap kelompok memiliki hubungan kelembagaan yang berbeda. Di Sigranala Indah, masyarakatnya memiliki hubungan yang dekat dengan lembaga keuangan seperti BRI dan BPR. Meski letaknya jauh dari kelompok, pegadaian juga menjadi salah satu lembaga penting seperti yang diakui oleh anggota kelompok.

Anggota masyarakat Desa Babadan, lokasi Bebek Jaya, mengakui bahwa mereka memiliki kedekatan dengan Dinas Peternakan Kabupaten, Koperasi Perambabulan “Al-Qomariyah”, Dinas Pengairan Kabupaten dan pedagang pakan ternak.

Di sisi lain, Tigan Mekar mendapat manfaat dan/atau pengaruh khususnya dari Dinas Peternakan Kabupaten dan Koperasi “Sumber Rejeki”.

(3) Survei Tingkat Kemiskinan

Hasil survei tingkat kemiskinan pada masyarakat di tiga Kelompok Tani ini ditunjukkan pada Gambar 19 di sebelah kanan. Di Sigranala Indah persentase kategori melarat dan miskin sangat tinggi menurut pemahaman peserta seminar.



Gambar 19 Persentase Kemiskinan Masyarakat, Cirebon

(4) Masalah, Solusi & Tindak Lanjut

Selama seminar lapangan, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat ini dicatat dan diberi peringkat seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 23 sampai Tabel 25:

Tabel 24 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Sigranala Indah)

Peringkat	Masalah
I	Kekurangan modal untuk mendanai usaha
II	Ketergantungan bahan baku (pakan) pada penggilingan padi
III	Selama musim panas kesulitan mendapatkan pasokan air
IV	Kandang yang kurang memadai yang disebabkan tidak adanya lokasi permanen
V	Biaya transportasi tinggi

Tabel 25 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Bebek Jaya)

Peringkat	Masalah
I	Harga telur yang rendah
II	Populasi itik yang dimiliki masih rendah
III	Harga pakan ternak yang tinggi
IV	Kesulitan dalam mengakses pasar
V	Batas kredit dari Koperasi al-Qomariah masih terbatas (batas kredit Rp. 1 000 000,-)

Tabel 26 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Tigan Mekar)

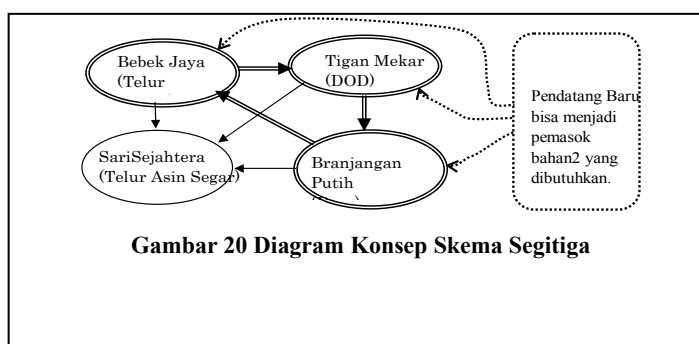
Peringkat	Masalah
I	Belum ada tempat khusus yang direncanakan untuk lokasi peternakan itik
II	Modal untuk meningkatkan skala usaha dan skala pemasaran masih kurang
III	Pasokan air masih kurang
IV	Fasilitas transportasi masih terbatas
V	Pemasaran ke luar pulau terkendala oleh isu flu burung dan fluktuasi harga

Masalah yang dihadapi Kelompok Tani terfokus pada: (i) keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha, (ii) keterbatasan kegiatan pemasaran dan (iii) harga telur dan produk itik yang tidak stabil. Kendala fisik adalah masalah yang dihadapi kelompok dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka, seperti keterbatasan fasilitas pasokan air dan akses ke pasar. Berdasarkan diskusi ini, tiap kelompok mempersiapkan solusi dan tindak lanjut bagi masalah-masalah berperingkat tinggi.

3.3.3 Pengolahan Hasil Pertanian

Di Cirebon, sistem pembagian kerja di antara kelompok tani sudah dimulai sejak tahun 1990 dan metode ini memberikan kontribusi pada pengembangan usaha itik di Kabupaten Cirebon. Sistem ini dikenal dengan “*Triangle System/Scheme*” (Skema Segitiga). MOU (*Memorandum of Understanding*) telah disepakati bersama dalam pembagian kelompok penghasil dan pemasok telur fertile, kelompok pemasok DOD (*Day Old Duck*) dan kelompok pemasok dara (pullet)

Skema Segitiga ini efektif dalam memberi peluang kepada pendatang baru untuk memulai usaha itik dengan memasok produk-produk inti. Sebelum terbentuknya skema segitiga ini, banyak produk itik masuk ke



Gambar 20 Diagram Konsep Skema Segitiga

Cirebon dari kabupaten lain di sekitar Cirebon. Kemudian, sejumlah produk itik dari Cirebon mengalir keluar ke kabupaten lain. Sebuah reputasi dari kesuksesan sebuah pendekatan di negara ini berkat usaha Dinas Peternakan melalui dukungan berupa peralatan seperti mesin penetasan kepada Kelompok Tani.

Kegiatan utama dari usaha itik ini bisa dikategorikan menjadi lima: (i) Produksi dan Pemasok Telur Fertile, (ii) Produksi dan Pemasok DOD (*Day Old Duck*) (iii) Produksi dan Pemasok Dara (*Pullet*), (iv) Produksi dan Pemasok Telur Asin, dan (v) Kegiatan lain: Itik Pedaging, Bulu, Itik Asap dan lain-lain.

Varitas itik di Cirebon pada umumnya adalah Rambon Aking yang membutuhkan banyak air sehingga disebut sebagai itik basah (*wet duck*). Ada dua tipe sistem beternak itik di Cirebon yaitu sistem tradisional (*angon*) dan sistem kandang. Perbedaan kedua sistem ini ditunjukkan pada Tabel 26.

Tabel 27 Metode Peternakan Itik

Tradisional	Semi-Intensif	Intensif
Menggunakan sistem <i>angon</i>	Kadang menggunakan sistem <i>angon</i>	Tidak menggunakan sistem <i>angon</i>
100% pakan dari sawah	50% pakan dari sawah 50% pakan pabrik	100% pakan pabrik
Kandang sederhana tanpa saluran air	Kandang dekat sungai	Kandang kering dilengkapi saluran air
Tidak menggunakan obat maupun vaksin	Kadang-kadang menggunakan obat dan vaksin	Obat dan vaksin diberikan secara intensif

Sumber: Bank Indonesia

Beternak itik dengan sistem tradisional *free-range* (*angon*) adalah beternak itik dengan membawa itik ke sawah setelah masa panen dimana tersedia sisa gabah dan keong sebagai makanan. Petani dan itiknya berpindah-pindah dari desa ke desa atau malah ke kabupaten atau propinsi lain.

3.3.4 Pemasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas dan perantara (bandar, tengkulak, dan lain-lain) terlibat dalam sejumlah besar transaksi produk-produk berkaitan dengan itik (lebih dari 60%) yang dilakukan kelompok tani. Pemain utama yang menghubungkan peternak (perseorangan/kelompok) dengan pengecer produk itik di Cirebon adalah 1) bandar dan tengkulak, 2) pengepul, 3) pengolah, dan 4) pedagang dan grosir.

Bandar dan tengkulak membeli produk itik dari peternak atau pengepul kemudian mengolah dan atau menjualnya ke pembeli lain. Bandar bertindak sebagai penyedia dana dalam bentuk pinjaman kepada peternak atau pengepul. Banyak petani dan pengepul terikat kepada sistem pembiayaan semacam ini dalam menjual produknya hanya kepada pemberi pinjaman: Bandar. Pinjaman ini bisa dalam bentuk uang tunai atau sarana produksi seperti pakan itik dan pembayaran dilakukan dengan telur. Biasanya bandar memiliki posisi yang lebih tinggi dan skala usahanya lebih besar daripada tengkulak dan pengepul.

Dalam melakukan transaksi, pengepul adalah pihak yang paling dekat dengan peternak dan tinggal di desa yang sama. Para pengepul ini membeli produk dari peternak dan menjualnya ke tengkulak atau bandar. Di Cirebon, pengepul di tingkat desa terbatas jumlahnya, karena (a) Kelompok tani ternak relatif kuat seperti direpresentasikan dalam bentuk kerjasama antara kelompok tani, (b) Lebih banyak persaingan yang disebabkan

oleh tidak adanya pasar yang didominasi oleh kelompok tengkulak dan (c) tidak seperti buah atau sayuran, produk itik tidak banyak bergantung pada musim.

Para pengolah atau kelompok mereka mengolah produk itik seperti telur asin, DOD dan pullet untuk dipasarkan.

Pedagang dan grosir adalah pihak yang paling dekat dengan pengecer dalam bertransaksi. Dibanding dengan bandar, pedagang dan grosir menangani lebih banyak produk tetapi tidak menyediakan pinjaman seperti bandar.

Para pelaku pasar di atas (termasuk peternak dan pengecer) pada beberapa kasus memiliki peran ganda, kadang sebagai peternak kadang juga sebagai pedagang. Karena itu, jalur pemasaran usaha itik di Cirebon agak rumit. Contoh aktualnya adalah:

- (i) Peternak, ketua dan anggota kelompok = bandar atau tengkulak
- (ii) Bandar atau tengkulak = pengepul
- (iii) Bandar atau tengkulak = pengolah
- (iv) Pengecer = pengolah

Menurut Dinas Peternakan Cirebon, 55% sampai 60% peternak itik bergabung dalam kelompok tani, sedangkan 30% sampai 40% merupakan peternak perseorangan dan 5% sampai 10% sisanya merupakan peternak yang diorganisasikan oleh bandar/tengkulak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bisnis itik dilakukan melalui bandar/tengkulak, dan lebih banyak yang dilakukan oleh peternak secara perseorangan daripada oleh kelompok. Lebih dari 60% transaksi produk itik dilakukan melalui bandar/tengkulak.

Mengenai penawaran dan permintaan produk itik di Cirebon, karena kekurangan pasokan/penawaran, banyak telur itik segar masuk ke Cirebon dari kabupaten dan propinsi lain. Sementara untuk produk DOD dari Cirebon keluar ke daerah lain. Setiap pergerakan suatu produk memberi peluang bisnis bagi bandar/tengkulak. Permintaan dan penawaran produk telur asin dan dara secara keseluruhan dilaporkan seimbang (*equilibrium*). Tabel 27 menyajikan estimasi kasar permintaan dan penawaran produk itik di Cirebon yang dibuat oleh Dinas Peternakan tahun 2005.

Tabel 28 Permintaan dan Penawaran Produk Itik di Kabupaten Cirebon (2005)

Produk Itik	Penawaran (Jumlah)	Permintaan (Jumlah)
Telur segar (fertile 80%, tidak fertile 20%)	1,200,000	4,000,000
DOD	2,600,000	650,000
Cakupan wilayah (Kabupaten/Propinsi: Subang, Kerawang, Indramayu, Garut, Bekasi dan Majalengka (Jawa Barat), Mojokerto (Jawa Timur), Brebes, Tegal dan Cilacap (Jawa Tengah), Lampung, Riau, Kalimantan Tengah dan Irian Barat (Propinsi lain)		

Jangkauan harga dan rata-rata harga produk itik diringkas dalam Tabel 29. Margin keuntungan yang diperoleh bandar dan pengecer adalah sekitar 10 sampai 15% (keuntungan kotor) dan 5 sampai 10% (keuntungan bersih), dengan asumsi biaya adalah Rp.50/telur). Terlihat persentase keuntungan yang diambil bandar dan pengecer masih dalam jangkauan yang sesuai.

Tabel 29 Ringkasan Data Harga Jual Telur Itik di Cirebon (Rp./butir)

	Telur Segar			Telur Asin		
	Petani	Pengepul	Pengecer	Petani	Pengepul	Pengecer
Jangkauan Harga	600 – 850	740 – 900	Tidak Ada	Tidak Ada	575 – 1,100	950 – 1,150
Harga Rata-rata	697	789	Tidak Ada	Tidak Ada	916	1,064

Sumber Data: wawancara langsung dengan KT, Tengkulak, Pasar antara Agustus-November 2006.

Harga eceran telur asin di Jakarta lebih mahal 50% dibanding harga eceran lokal di Cirebon.

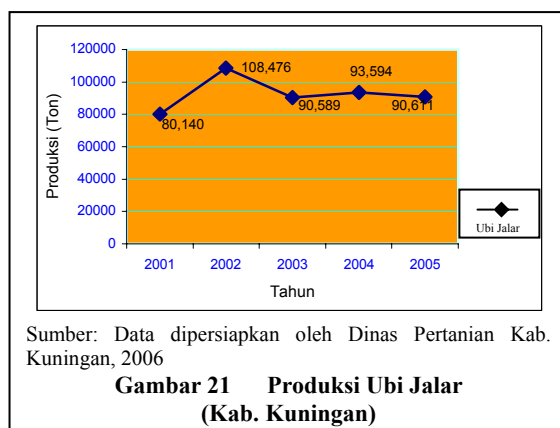
3.4 Kabupaten Kuningan

3.4.1 Umum

(1) Kebijakan Kabupaten dalam Pengembangan Pertanian dan Komoditas Contoh

Menurut BAPPEDA, pengembangan komoditas berbasis pertanian diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kuningan. BAPPEDA mempersiapkan kebijakan “Pengembangan wilayah Agropolitan” di 2006. Kebijakan ini membagi Kabupaten menjadi empat zona/wilayah yang dipusatkan pada empat Kecamatan: Cilimus, Ciawigebang, Luragung dan Kuningan. Tiap zona memiliki perbedaan fokus dan target komoditas tergantung pada potensi yang mereka miliki. Dari empat zona tersebut, Zona Cilimus diarahkan menjadi pusat produksi ubi jalar.

Di dalam Rencana Strategis 2004-2008, Kabupaten Kuningan memprioritaskan program-program berikut: (i) Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, (ii) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan (iii) Program Pengembangan Agribisnis, sesuai dengan Rencana Strategis 2004 - 2008.



Ubi jalar, komoditas contoh di kabupaten ini, merupakan salah satu komoditas yang mendapat prioritas di Kuningan. Produksi ubi jalar di Kuningan diilustrasikan pada Gambar 21. Dari Gambar 21 terlihat bahwa tahun 2002 memiliki produksi yang lebih baik, sementara produksi di tiga tahun sebelumnya mengalami stagnasi. Menurut *Buku Statistik Tahunan Kabupaten Kuningan 2003*, pusat produksi ubi jalar adalah di Kecamatan Cilimus dan Cigandamekar. Keduanya memproduksi 59,500 ton ubi jalar

atau setara dengan 54.8% dari total produksi di Kabupaten diikuti oleh Kecamatan Jalaksana (16,500 ton), Pancalang (9,900 ton) dan Cipicung (7,100 ton).

Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan terdiri dari lima divisi: (i) Divisi Ketahanan Pangan dan Penyusunan Program, (ii) Divisi Tanaman Pangan dan Perkebunan, (iii) Divisi Peternakan dan Perikanan, (iv) Divisi Pengembangan Petugas Lapangan dan Sumber Daya, dan (v) Divisi Administrasi. Dinas Pertanian menangani dua sektor yaitu

pertanian dan peternakan. Kelompok fungsional dikelola secara terpisah dari lima divisi ini untuk mendukung kegiatan teknis Dinas berdasarkan instruksi Kepala Dinas.

3.4.2 Karakteristik Kelompok Tani

(1) Survei Lapangan dan Hasil Evaluasi Kelompok Tani

Survei telah dilakukan di tujuh Kelompok Tani ubi jalar yang tersebar di empat kecamatan, termasuk pusat produksi ubi jalar Kecamatan Cilimus dan Cigandamerkar. Karakteristik Kelompok Tani tersebut diringkas dalam Tabel 29:

Tabel 30 Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Kuningan

	Karakteristik Utama	
	Keunggulan	Kelemahan
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa Kelompok memiliki potensi melakukan kegiatan simpan pinjam karena organisasinya cukup kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Sedikit pengalaman simpan pinjam, hanya 4 kelompok memiliki pengalaman dengan kinerja masih rendah.
Sosial-Ekonomi: Rasio Populasi Miskin: 0.31 - 0.50	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan dampak negatif pada lingkungan untuk produksi ubi jalar maupun aktifitas pengolahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota wanita masih terbatas di semua kelompok.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelompok, yaitu Andayarasa, memiliki ikatan Kelompok yang kuat dan berpotensi. 	<ul style="list-style-type: none"> Hampir semua kelompok lainnya masih lemah dari sudut pandang bagi hasil dan fungsi kelompok.
Tingkat Teknologi Produksi dan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Dari 8 kelompok, 4 kelompok merupakan kelompok produksi sementara 4 kelompok lainnya melakukan pengolahan. Pembagian tugasnya cukup jelas. Terdapat dua pabrik pengolahan ubi jalar di kabupaten, yang memungkinkan adanya kerjasama dengan kelompok tani. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi lokal hanya sekitar 30 % dari total produksi. Kelompok belum mendapatkan teknologi pengawetan ubi jalar.
Potensi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada "dominasi" bandar di sini, dan merupakan pasar bersaing yang terbuka. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasaran masih tergantung pada perseorangan, pemasaran kelompok masih merupakan tantangan.
Rencana Ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> Dua pabrik ubi jalar berskala besar ada di Kuningan. 	<ul style="list-style-type: none"> Hanya ada 2 kelompok yang memiliki rencana ke depan.

Kelompok Tani yang disurvei dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok: (i) Kelompok Tani yang menangani produksi dan (ii) Kelompok Tani yang melakukan pengolahan. Pertama-tama Kelompok Tani diklasifikasikan menjadi kelompok sebagaimana telah disebutkan, kemudian dari tiap kategori dilakukan evaluasi kualitatif untuk memilih Kelompok Tani model seperti yang disusun dalam Tabel 30:

Table 31 Hasil Evaluasi Kelompok Tani di Kabupaten Kuningan

Kegiatan Utama	Kelompok Tani		Keuangan	Sosial-Ekonomi	Organisasi	Produksi & Pengolahan	Potensi Pemasaran	Rencana Kedeapan	Total
	(Nilai Penuh)		7.2	3.6	10.6	6.4	7.4	4.8	40.0
Produksi	2 Meksari	Kec. Cigandamekar Desa Indrapatna	1.2 17%	1.2 33%	0.0 0%	1.6 25%	3.7 50%	0.0 0%	7.7 19%
	3 Harapanmulya 1	Kec. Jalaksana Desa Manisior	1.2 17%	1.2 33%	3.7 35%	2.4 38%	3.7 50%	2.4 50%	14.6 37%
	5 Tiltamulya	Kec. Cipicung Desa Cimaranten	0.0 0%	1.2 33%	2.4 23%	0.8 13%	1.4 19%	0.0 0%	5.8 15%
	7 Andayarasa	Kec. Cilimus Desa Bandorasa Wetan	4.8 67%	1.8 50%	10.0 94%	1.6 25%	7.4 100%	4.8 100%	30.4 76%
Pengolahan	1 Harapanmulya	Kec. Cigandamekar Desa Indrapatna	0.6 8%	1.2 33%	4.4 42%	2.4 38%	3.7 50%	0.0 0%	12.3 31%
	4 Binakarya	Kec. Jalaksana Desa Manisior	0.6 8%	1.2 33%	2.4 23%	4.8 75%	4.7 64%	4.8 100%	18.5 46%
	6 Jatimulya	Kec. Cipicung Desa Cimaranten	0.0 0%	1.8 50%	0.0 0%	1.6 25%	1.4 19%	2.4 50%	7.2 18%
	8 Linggasari 2	Kec. Cilimus Desa Lingga Indah	4.2 58%	1.8 50%	7.3 69%	5.6 88%	3.8 51%	0.0 0%	22.7 57%

Berdasarkan hasil penilaian, Kelompok Tani Andayarasa di Kecamatan Cilimus mencapai nilai yang tinggi di hampir semua aspek sehingga dipilih untuk mewakili kelompok yang menangani produksi. Sementara dua kelompok tani lainnya, Bina Karya dan Linggasari 2 dipilih mewakili kelompok yang pada saat ini menangani pengolahan.

(2) Hubungan Kelembagaan dan Alur Produksi-Pemasaran

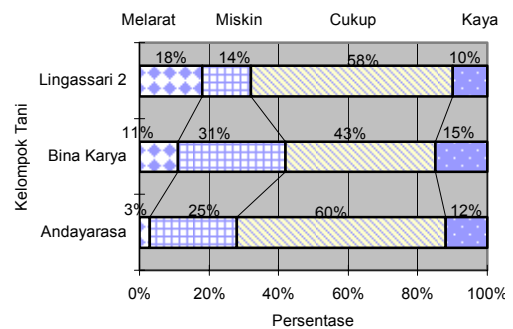
Gambaran hubungan kelembagaan dan alur produksi-pemasaran dipersiapkan dalam seminar lapangan yang diselenggarakan di tiap kelompok tani terpilih, yaitu Andayarasa, Bina Karya dan Linggasari 2. Di Andayarasa, lembaga keuangan seperti BPP Cilimus dan BRI Cilimus telah memberi manfaat dan pengaruh terhadap kelompok ini. Selain itu, sejak kelompok ini dipromosikan sebagai kelompok produksi ubi jalar karena memiliki fasilitas irigasi yang terawat, kelompok ini memberi perhatian besar pada Asosiasi Pengguna Air.

Menurut peserta seminar lapangan pada kelompok Bina Karya, dukungan instansi-instansi pemerintah termasuk dari petugas penyuluh lapangan dan Dinas Pengairan memberikan manfaat/pengaruh yang cukup besar.

Satu hal yang perlu diperhatikan dari hasil temuan di Linggasari 2 adalah bahwa banyak pihak yang berhubungan dengan kelompok dan masyarakat desa ini, seperti pamong desa, pedagang, lembaga keuangan merupakan pihak utama yang memberikan pengaruh pada kelompok.

(3) Peringkat Kemiskinan

Hasil survei tingkat kemiskinan yang dilakukan pada tiga kelompok tani ini ditunjukkan pada Gambar 22 sebelah kanan yang menunjukkan persentase kategori “melarat” dan “miskin” mencapai 30% sampai 40%, yang dianggap relatif



Gambar 22 Persentase Kemiskinan Masyarakat, Kuningan

lebih rendah dibanding dengan kelompok tani ternak di Kabupaten Cirebon.

(4) Masalah, Solusi dan Tindak lanjut

Selama seminar lapangan, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dicatat dan diberi peringkat seperti terlihat pada Tabel 31, Tabel 32 dan Tabel 33:

Tabel 32 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Lingassari 2)

Peringkat	Masalah
I	Harga pupuk yang tinggi
II	Kekurangan modal untuk pengolahan lahan (menyewa buruh)
III	Kesulitan dalam menyelenggarakan pertemuan rutin
IV	Kesulitan dalam menangani hama lanas (borer)
V	Tidak ada kontrol pemerintah untuk menstabilkan harga ubi jalar

Tabel 33 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Andayarasa)

Peringkat	Masalah
I	Kekurangan modal untuk membeli pupuk dan pestisida
II	Harga pupuk dan pestisida yang tinggi
III	Harga ubi jalar ditentukan oleh bandar (pedagang)
IV	Hama lanas tidak bisa ditangani
V	Pendapatan dari hasil produksi tidak memuaskan

Tabel 34 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Bina Karya)

Peringkat	Masalah
I	Produksi yang cenderung turun karena turunnya pasokan air
II	Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam teknologi pengolahan
III	Lembaga keuangan belum menjangkau (memberi manfaat) pada Kelompok Bina Karya
IV	Karena harga pupuk yang tinggi, Kelompok tidak mampu melakukan pemupukan yang seimbang
V	Turunnya harga produk tanaman selama masa panen

Melalui diskusi, masalah-masalah terkait dengan produksi diberi peringkat lebih tinggi seperti, (i) harga pupuk yang tinggi, (ii) modal untuk membeli pupuk terbatas, (iii) produksi yang tidak stabil dan cenderung turun, dan (iv) keterbatasan modal untuk mengolah lahan. Berdasarkan hasil diskusi ini, tiap Kelompok Tani menyiapkan solusi masalah dan tindak lanjut bagi masalah-masalah berperingkat tinggi.

3.4.3 Pengolahan Hasil Pertanian

Produktivitas dan produksi ubi jalar di Kabupaten Kuningan adalah cukup bagus, hasil perhektarnya mencapai 20 ton/ha. Kebanyakan lokasi daerah ubi jalar terletak di kaki Gunung Ciremai yang lerengnya merupakan tanah subur dan memiliki sistem pengairan yang bagus.

Kelompok Tani mengolah berbagai produk dari ubi jalar dan yang populer adalah keremes, dodol, tepung dan keripik. Beberapa Kelompok Tani, di bawah pimpinan ketuanya, mengolah ubi jalar menjadi produk olahan yang unik seperti es krim dan saus sambal. Semua usaha pengolahan ini masih berskala kecil dan pasarnya masih terbatas di daerah sekitar kelompok. Masalah utama usaha skala kecil adalah kurangnya modal untuk pengembangan usaha, kemampuan pemasaran yang masih rendah dan kesempatan dalam mengenal produk maupun teknologi baru yang masih kurang.

Kelompok tani yang mengolah produk tradisional seperti ini di desanya, lebih bisa menjaga kepaduan di antara mereka karena tingkat kemampuan mereka dalam pengolahan hampir sama seperti di KT Jatimulya dan KT Tiltamulya. Akan tetapi, apabila ada teknologi pengolahan yang dibutuhkan tidak biasa dan masih menjadi milik pribadi, pelaksanaannya cenderung sebagai usaha pribadi meski telah mendapatkan bantuan resmi, seperti pada KT Binakarya untuk produksi saus sambal dan KT Lingasari 2 untuk pembuatan es krim.

Untuk mengembangkan operasional pengolahan yang modern pada Kelompok Tani, ada beberapa kendala yang dihadapi seperti pengembangan rasa kepemilikan dan kerjasama anggota, kemampuan manajemen, keahlian dalam pemasaran, transparansi dalam pembukuan, bagi hasil yang adil dan lain-lain.

Ada dua pabrik skala besar pengolahan ubi jalar yang beroperasi di Kabupaten Kuningan. Salah satunya adalah PT. Galih Estetika yang terletak di Kecamatan Cilimus. Pabrik ini memproduksi pasta ubi jalar untuk diekspor ke Jepang, Korea dan Cina. Pabrik ini mempekerjakan 250 karyawan dari daerah sekitar pabrik. Galih Estetika mengolah sekitar 10,000 ton ubi jalar segar pertahunnya. Mereka menggunakan ubi Varitas Bogor sebagai bahan bakunya. Varitas ini kaya akan zat gula dan dibeli dari Kabupaten Majalengka melalui pengepul. Petani di Kuningan menyatakan bahwa kondisi iklim dan tanah di sawahnya tidak cocok untuk ditanami Varitas Bogor sehingga menyebabkan rendahnya hasil produksi. Karena itu, petani ubi jalar di Kuningan tidak menanam varitas ini.

Menurut manajer pabrik, dia keberatan untuk membeli bahan baku langsung dari petani atau kelompok tani. Alasan utamanya adalah bahwa petani tidak dapat memenuhi janji dalam memasok bahan baku sesuai dengan kualitas permintaan, mengirimkan pasokan tepat waktu dan dengan harga yang sesuai.

Pabrik pengolahan ubi jalar yang lain adalah PT Global Agro-Inti terletak di Kecamatan Ciganda Mekar. Produknya adalah tepung ubi jalar. Sejak mulai beroperasi pada Desember 2005, mereka belum beroperasi secara penuh, tetapi mereka berencana untuk memproduksi 3,500 ton tepung ubi jalar dengan menggunakan 10,000 ton bahan baku ubi jalar setiap tahunnya. Varietas ubi jalar yang diminta adalah AC putih atau AC merah yang sangat populer di Kuningan.

Global Agro-Inti menggunakan mesin modern skala besar seperti mesin pengiris berkecepatan tinggi, pengering putar besar dilengkapi tabung minyak dan penggilingan gantung (*pin mill*). Tepung ubi jalar memiliki permintaan pasar sebagai tambahan tepung terigu. Sehingga harga tepung terigu sangat berpengaruh pada harga tepung ubi jalar. Jika harga tepung terigu bergerak turun, harga tepung ubi jalar juga bergerak turun. Harga tepung terigu di Indonesia saat ini berkisar Rp.4,000/kg, harga tepung ubi jalar yang bisa diterima pasar adalah lebih rendah dari Rp. 3,500/kg. Perusahaan ini memiliki niat baik untuk menampung irisan ubi kering dari petani sebagai bahan baku pengolahan. Tetapi, dari pengalaman mereka menunjukkan bahwa irisan ubi kering yang dihasilkan

oleh petani dikeringkan di atas penampungan bambu di udara yang terbuka, sehingga mudah terkontaminasi oleh debu dan pasir. Standar kualitas adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh petani ketika mereka mulai menghasilkan produk.

Di sisi lain, tenaga matahari sebagai sumber panas menarik perhatian untuk diteliti dan dicoba di Indonesia. Sebagai contoh, IPB (Institut Pertanian Bogor) telah mengembangkan beberapa tipe pengering tenaga surya yang bisa digunakan untuk pengeringan sayur, buah, umbi-umbian dan ikan. Pengembangan dan teknologi baru seperti ini perlu disebar ke daerah pedesaan. Rencana konkret dan pengaturan dukungan teknis dan keuangan dibutuhkan untuk peningkatan pendapatan petani lewat pengolahan hasil pertanian.

3.4.4 Pemasaran

(1) Jalur Pemasaran

Menurut hasil wawancara dengan Dinas, perantara seperti bandar terlibat dalam sebagian besar transaksi yang terkait dengan produk ubi jalar (sekitar 80%). Pelaku utama yang menghubungkan petani dengan pengecer di pasar ubi jalar di Kuningan adalah 1) bandar, 2) pengepul, 3) pengolah dan 4) pedagang dan grosir. Pelaku pasar pada beberapa kasus memiliki peran ganda.

Banyak petani yang terikat dalam perjanjian pinjaman dengan perantara, harus menjual produknya kepada pihak yang memberikan pinjaman tersebut (biasanya perantara/bandar). Bandar besar memiliki toko sendiri di pasar-pasar besar (pasar induk).

Pengepul desa adalah pihak yang paling dekat dengan petani dalam melakukan transaksi dan tinggal di sekitar desa. Biasanya pengepul menjadi penghubung antara petani dan bandar. Karena pasar ubi jalar di Kuningan tidak didominasi kelompok bandar, pengepul desa di kabupaten ini lebih bebas jika dibandingkan dengan kasus di Majalengka.

Menurut perkiraan Dinas Pertanian, 40% petani ubi jalar tergabung dalam kelompok. Usaha produk ubi jalar di Kuningan kebanyakan (80%) dilakukan melalui pengepul dan bandar, dan dilakukan anggota kelompok tani (termasuk ketua) secara perseorangan daripada lewat kelompok. Dari transaksi yang dilakukan melalui perantara, 90% dikirim ke grosir atau pengolah di kabupaten lain atau di luar provinsi. Jadi, lebih dari 70% produksi ubi jalar di Kuningan dijual keluar kabupaten melalui perantara dalam bentuk ubi segar. Sisanya, 30% didistribusikan ke pengolah dan grosir lokal. Seperti dijelaskan sebelumnya, tidak ada kelompok bandar yang mendominasi pasar ubi jalar di Kuningan, karena itu pasar lebih terbuka dan kompetitif di antara para pelaku pasar (perantara).

Jangkauan harga dan rata-rata harga dan keuntungan diringkas pada Tabel 34. Dari tabel menunjukkan keuntungan yang diperoleh perantara dan bandar adalah sekitar 5-10%. Keuntungan sebesar ini bisa diterima dari sisi petani, dan menggambarkan situasi pasar yang kompetitif diantara perantara di Kuningan.

Tabel 35 Harga Jual dan Keuntungan Bandar di Kabupaten Kuningan (Rp./segar kg)

	Harga Jual	Keuntungan Bersih
Jangkauan Harga	1,300 – 1,450	40 – 150
Harga Rata-rata	1,380	93

Sumber: Wawancara dengan KT / Bandar / Pasar dari Agustus-November 2006.

Data harga di Jakarta menunjukkan bahwa perbedaan harga pada harga eceran antara supermarket di kota dengan pasar lokal lebih besar dibanding perbedaan harga di tingkat grosir.

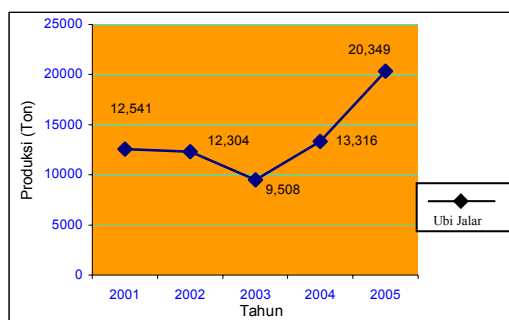
3.5 Kabupaten Majalengka

3.5.1 Umum

(1) Kebijakan Kabupaten dalam Pengembangan Pertanian dan Komoditas Contoh

Kebijakan pengembangan pertanian Kabupaten Majalengka terfokus pada dua hal utama: ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis melalui integrasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkesinambungan sesuai dengan rencana strategis tahun 2003 dan 2004.

Kebijakan ini memprioritaskan tujuh program di bawah dua kategori program, program umum dan program khusus. Program umum mencakup dua program: (i) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan (ii) Program Pengembangan Agribisnis. Program khusus terdiri dari: (i) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Pertanian, (ii) Program Pengembangan Potensi Daerah Agribisnis, (iii) Program Pemetaan Daerah Komoditas Kompetitif Agribisnis, (iv) Program Pengembangan Produksi Pertanian dan (v) Program Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur.



Sumber: Lampiran Laporan Tahunan 2005; Biro Pusat Statistik Kab. Majalengka

Gambar 23 Produksi Ubi Jalar, Majalengka

Data produksi ubi jalar, sebagai komoditas contoh di Majalengka, diilustrasikan pada Gambar 23. Meski mengalami depresi pada tahun 2003 karena kondisi musim yang tidak mendukung, produksi ubi jalar di Majalengka menunjukkan kenaikan sebesar 60% sejak 2001.

Produksi ubi jalar terpusat pada lima kecamatan. Menurut data Buku Tahunan Statistik Kabupaten 2004, daerah yang paling besar produksinya adalah Kecamatan Maja sebesar 4,018 ton, 30% dari total produksi. Kemudian

diikuti oleh Kecamatan Cigasong (2,130 ton), Argapura (1,352 ton) dan Majalengka (952 ton).

(2) Administrasi Lokal

Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka terdiri dari lima divisi: (i) Divisi Padi dan Palawija, (ii) Divisi Perkebunan, (iii) Divisi Peternakan, (iv) Divisi Perikanan, dan (v) Divisi Administrasi. Dinas Pertanian menangani baik sektor pertanian maupun

peternakan. Kelompok fungsional dikelola secara terpisah dari lima divisi ini untuk mendukung kegiatan teknis Dinas sesuai instruksi dari Kepala Dinas.

3.5.2 Karakteristik Kelompok Tani

(1) Survei Lapangan dan Hasil Evaluasi Kelompok Tani

Delapan Kelompok Tani yang tersebar di empat kecamatan yang disurvei di Majalengka. Karakteristik Kelompok Tani tersebut diringkas pada Tabel 35:

Tabel 36 Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Majalengka

	Karakteristik Utama	
	Keunggulan	Kelemahan
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman simpan pinjam Kelompok GPK Mitra Binangkit dan Delima 2 cukup terkenal. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecuali dua kelompok tersebut, kelompok lain kurang pengalaman dan kinerjanya kurang bagus dalam mengelola keuangan.
Sosial-Ekonomi: Rasio Penduduk Miskin: 0.18 - 0.32	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan dampak negatif pada lingkungan untuk produksi ubi jalar maupun aktifitas pengolahannya. Anggota wanita aktif berpartisipasi ditemukan pada 3 kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio irigasi tidak pada tingkat rendah, sebagian besar kelompok yang disurvei terletak di daerah pegunungan yang menghadapi kekurangan fasilitas irigasi dan pasokan air yang tidak stabil untuk bercocok tanam.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Tiga kelompok yang disebut di atas lebih transparan dalam melakukan kegiatan. Bagi hasil akan lebih baik. Kelompok yang didukung oleh P4K menunjukkan kinerja yang lebih baik (Delima 2). 	<ul style="list-style-type: none"> Kecuali 3 kelompok yang dipimpin wanita tersebut, tidak ditemukan kegiatan menonjol yang dilakukan sebagai sebuah kelompok.
Tingkat Teknologi Produksi dan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Varitas Bogor cocok untuk ditanam di sini, dan memiliki potensi pasar ekspor melalui perusahaan swasta (P.T. Galih Estetika). 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pengolahan masih bersifat industri rumah tangga. Teknologi pengawetan ubi jalar belum sampai ke kelompok. Produksi dipengaruhi oleh buruknya fasilitas pengairan.
Potensi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman disediakan dan pemasaran dijamin oleh kelompok bandar yang berpengaruh. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasaran ubi jalar sangat didominasi kelompok bandar. Hampir 60% dari total produksi diperdagangkan melalui kelompok ini.
Rencana Ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> Tiga kelompok yang dipimpin oleh wanita memiliki rencana ke depan yang jelas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok lainnya tidak memiliki rencana ke depan yang jelas.

Kelompok tani yang disurvei dibagi menjadi dua kategori: (i) Kelompok Tani “Produksi” dan (ii) Kelompok Tani “Pengolah”. Evaluasi yang dibuat mempertimbangkan kategori ini dan mempertimbangkan kelompok-kelompok yang dipilih. Hasil penilaian diringkas pada Tabel 36.

Tabel 37 Hasil Evaluasi Kelompok Tani Kabupaten Majalengka

Kegiatan Utama	Kelompok Tani		Keuangan		Sosial-Ekonomi		Organisasi		Produksi & Pengolahan		Potensi Pemasaran		Rencana Kedepan		Total	
	(Nilai Penuh)		18.0		9.0		26.5		16.0		18.5		12.0		100.0	
Produksi	1 Sawah Lega	Kec. Majalengka Desa Kawunggirang	3.6	20%	4.2	47%	9.4	35%	7.2	45%	5.1	28%	4.8	40%	34.3	34%
	2 Ciminyak	Kec. Majalengka Desa Kawunggirang	3.6	20%	4.2	47%	8.0	30%	4.0	25%	5.1	28%	2.4	20%	27.3	27%
	3 Serang	Kec. Maja Desa Banjaran	3.6	20%	4.2	47%	8.0	30%	8.0	50%	5.1	28%	4.8	40%	33.7	34%
	4 Sawah Loa	Kec. Maja Desa Cihaur	3.6	20%	4.2	47%	11.4	43%	8.0	50%	5.1	28%	8.4	70%	40.7	41%
Pengolahan	5 GPK Mitra Binangkit	Kec. Cigasong Desa Tajur	11.4	63%	6.6	73%	19.2	72%	7.2	45%	13.5	73%	7.2	60%	65.1	65%
	6 Sindang Mulya	Kec. Maja Desa Sindang Kerta	3.6	20%	6.6	73%	19.2	72%	6.4	40%	5.1	28%	4.8	40%	45.7	46%
	7 Delima 2	Kec. Telega Desa Tarikolot	12.0	67%	7.2	80%	20.1	76%	7.2	45%	14.8	80%	9.6	80%	70.9	71%

Kelompok Tani Delima 2 di Kecamatan Telaga dan GPK Mitra Binangkit di Kecamatan Cigasong diseleksi mewakili kategori kelompok “Pengolah”. Kelompok tani yang dikategorikan sebagai Kelompok “Produksi” adalah kelompok yang masih sederhana dan tingkat produksinya tidak stabil dan baru memulai pengolahan. Karena itu, mereka perlu menstabilkan produksinya dengan dukungan dari Dinas, kemudian pada tahap selanjutnya mulai melakukan pengolahan.

(2) Hubungan Kelembagaan dan Alur Produksi-Pemasaran

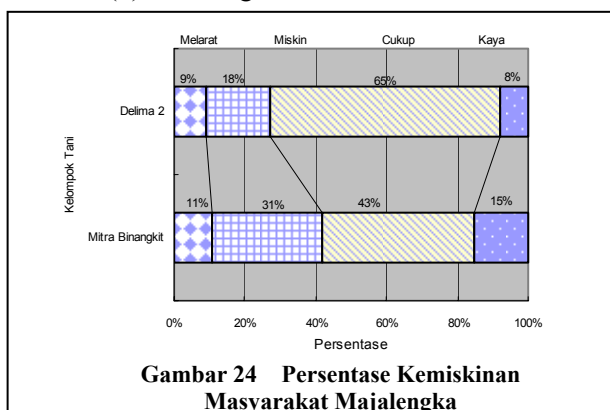
Hubungan kelembagaan dan alur produksi-pemasaran menunjukkan bahwa Kelompok Mitra Binangkit mendapatkan manfaat, khususnya dari lembaga pemerintah yang terdiri dari Dinas pertanian, BPP dan Kantor Penyuluh Lapangan. Lembaga keuangan seperti BRI Cabang Majalengka juga merupakan lembaga yang penting bagi kelompok. Meskipun BPR tercatat sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga ini memiliki pengaruh yang rendah terhadap kelompok.

Di Kelompok Delima 2, peserta seminar juga memperoleh manfaat dan/atau pengaruh dari instansi-instansi pemerintah termasuk Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Pengairan dan Dinas Perkebunan. Berbeda dengan Kelompok Mitra Binangkit, pengaruh LPM “sangat besar” bagi Kelompok Delima 2. Lembaga keuangan, yaitu BRI Cabang Majalengka tercatat sebagai lembaga yang bermanfaat dan berpengaruh pada Kelompok Mitra Binangkit.

Dari pemetaan kelembagaan yang disusun bagi tiga kabupaten di Propinsi Jawa Barat, ditemukan kesamaan pola yaitu kedekatan Kelompok Tani dengan lembaga yang ada. Kelompok tani memiliki hubungan yang dekat dengan lembaga pemerintah khususnya dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, serta petugas penyuluh lapangan. Lembaga keuangan juga dimasukkan dalam pemetaan, meskipun akses ke lembaga keuangan berbeda diantara anggota kelompok. Banyak kelompok yang menyatakan bahwa rekening yang dimiliki kelompok menggunakan nama ketuanya. Dalam hal ini kemampuan akses sebagai sebuah kelompok tidak begitu dibutuhkan. Pengembangan pemasaran pada hampir semua kelompok masih dalam proses pengembangan, karena itu

pedagang merupakan salah satu pihak penting yang menghubungkan kegiatan pemasaran Kelompok Tani.

(3) Peringkat Kemiskinan



Hasil survei tingkat kemiskinan dua Kelompok Tani ditunjukkan pada Gambar 24. Gambar ini menunjukkan bahwa populasi penduduk miskin di masyarakat sekitar Kelompok Tani Delima 2 persentasinya lebih rendah dibanding dengan Mitra Binangkit.

(4) Masalah, Solusi dan Tindak Lanjut

Selama seminar lapangan, masalah-masalah yang saat ini dihadapi masyarakat dicatat dan diberi peringkat seperti diringkas pada Tabel 37 dan Table 37:

Tabel 38 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Delima 2)

Peringkat	Masalah
I	Keterbatasan modal untuk meningkatkan penjualan
II	Tidak ada alat transportasi yang dimiliki oleh kelompok
III	Peralatan pengolahan masih sederhana (tidak ada manual dan metode pengamanan)
IV	Kemampuan anggota dalam melakukan pengolahan masih terbatas
V	Keterbatasan bahan baku

Tabel 39 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Mitra Binangkit)

Peringkat	Masalah
I	Keterbatasan modal untuk membeli bahan baku
II	Tingkat keuntungan masih rendah
III	Pemasaran masih terbatas (warung, pedagang keliling dan berdasar pesanan)
IV	Keterbatasan kemampuan (dalam pengolahan dan pemasaran)
V	Pengemasan produk yang kurang menarik

Kedua Kelompok Tani mengemukakan masalah “keterbatasan modal” sebagai masalah yang paling utama. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran juga didata terutama masalah masih rendahnya kemampuan pengolahan dan pengemasan. Berdasarkan diskusi ini, tiap Kelompok Tani mempersiapkan solusi dan tindak lanjut bagi masalah-masalah yang berperingkat tinggi.

3.5.3 Pengolahan Hasil Pertanian

Produksi dan produktivitas ubi jalar di Kabupaten Majalengka lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan. Di daerah ini (Majalengka), biasanya petani hanya menanam ubi jalar sekali dalam setahun yaitu saat musim hujan. Mayoritas lahan penanaman ubi jalar tidak memiliki saluran irigasi, oleh karena itu petani hanya menanam ubi jalar dan padi selama musim hujan. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, produktivitas ubi jalar per hektar pada musim hujan lebih rendah dibanding pada musim

kering. Dilaporkan juga bahwa petani-petani di sini tidak menggunakan bibit unggul secara intensif sehingga produktifitas dan daya tahan ubi jalar dari serangan penyakit menurun dari tahun ke tahun. Karena itu, penting untuk membangun sistem pembibitan dan pasokan bibit ubi jalar yang bisa dilakukan oleh Dinas.

Di Majalengka, banyak kelompok kecil wanita melakukan pengolahan dan penjualan produk tradisional ubi jalar. Sebagai contoh, 37 wanita (tidak ada anggota pria) dibentuk KT Mitra Binangkit di Kecamatan Cigasong pada 1992, dan memulai mengolah makanan tradisional seperti keremes, kecemplung dan papais. Peralatan pengolahan yang digunakan merupakan peralatan rumah tangga biasa seperti kompor minyak, alat pengiris manual, penggorengan dan pisau dapur. Di sini, ketua kelompok bertanggung jawab dalam pemasaran dengan menggunakan angkutan umum ke pasar untuk mengirim produk mereka ke pengecer dan mengambil pembayarannya. Karena skala produksi dan pemasarannya cukup kecil, pemasukan tambahan yang diperoleh tiap anggotanya terbatas, sekitar Rp 400,000/tahun. Kelompok Tani Mitra Binangkit berharap mendapatkan bantuan keuangan secara resmi untuk meningkatkan skala usaha mereka.

Kelompok Tani Delima 2 terletak di Kecamatan Talaga dengan memiliki 16 anggota (5 pria dan 11 wanita) memproduksi keripik ubi jalar, keripik pisang, keripik singkong, taro dan keremes setiap hari. Mereka menjual produknya ke sekitar Pasar Talaga dan memasok secara rutin ke 20 warung di pasar. Sistem pembayarannya adalah tunai saat pengiriman. Mereka bisa mengolah 23 makanan tradisional tetapi biasanya mereka hanya memproduksi 10 jenis makanan. Masalah utama yang dihadapi pada produksi dan pemasaran produk tradisional adalah kesulitan dalam mendapat bahan baku seperti pisang muda. Delima 2 juga berharap mendapatkan pinjaman lunak dari pemerintah untuk pengembangan usaha.

Kegiatan-kegiatan petani untuk menghasilkan pemasukan ini masih dalam skala kecil dilihat dari fasilitas pengolahan dan dari skala usaha pemanfaatan bahan baku lokal yang ada. Pengembangan daerah pemasaran untuk produk semacam ini masih sulit. Tipe usaha ini diklasifikasikan sebagai “Produksi Lokal dan Konsumsi/Pemasaran Lokal dengan memanfaatkan Produk Lokal”.

Kelompok wanita lain yang bernama Asri Rahayu memproduksi bermacam produk pertanian olahan seperti manisan mangga kering (diolah menggunakan *vacuum fryer*), keripik-keripik tradisional, dodol, keremes dan lain-lain. Daerah pemasaran mereka tersebar di Cirebon dan Bandung. Pengemasannya lebih baik dibanding kelompok lain. Mereka mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian.

3.5.4 Pemasaran

Satu kelompok bandar mendominasi lebih dari 70% pasar ubi jalar di Majalengka. Dinas Pertanian Majalengka memperkirakan bahwa dari seluruh produksi ubi jalar, 3% adalah untuk bibit musim tanam berikutnya, 2% untuk konsumsi petani sendiri dan sisanya 95% adalah untuk didistribusikan di pasar. Pasar utama dari produk olahan ubi jalar masih terbatas di pasar pedesaan.

Pelaku pasar utama yang menghubungkan petani dan pengecer pasar ubi jalar di Majalengka adalah 1) bandar dan tengkulak, 2) pengepul, 3) pengolah, 4) pedagang dan grosir. Pelaku pasar ubi jalar ini pada banyak kasus memiliki peran ganda.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk bandar dan tengkulak, kelompok perantara khusus (“Sinar Ubi”) mendominasi sebagian besar pasar ubi jalar di Majalengka. Banyak petani (pada banyak kasus termasuk pengepul) sejak awal terikat dalam menjual produknya kepada pihak yang memberikan pinjaman (perantara/bandar).

Pengepul desa adalah pihak yang paling dekat dengan petani dalam melakukan transaksi dan tinggal di sekitar desa. Biasanya pengepul menjadi penghubung antara petani dan bandar. Di daerah-daerah yang didominasi oleh kelompok bandar ini, pengepul desa juga terikat oleh mereka.

Menurut Dinas, satu kelompok bandar yang dominan ini menguasai 70% total produksi ubi jalar. Pasar utama ubi jalar yang melalui kelompok bandar ini adalah pengolah besar untuk diekspor di kabupaten lain dan keluar provinsi. Sementara itu permintaan ubi jalar di majalengka sendiri terbatas. Di daerah yang didominasi kelompok bandar ini, petani ubi jalar menjual komoditasnya ke pengepul desa yang terhubung dengan kelompok bandar ini sebelum panen. Panen dilakukan dan dibiayai oleh pengepul-pengepul ini. Layanan keuangan (pinjaman) disediakan oleh kelompok bandar ke kolektor, selanjutnya pengepul meminjamkannya kepada petani. Harga ditentukan oleh kelompok bandar ini. Petani tidak punya pilihan lain dalam memasarkan produk mereka. Di daerah lain pemasaran yang dilakukan oleh petani terlihat lebih terbuka.

Harga jual produk ubi jalar pada tiap titik jalur pemasaran dikumpulkan. Meskipun jumlah contohnya terbatas, rata-rata harga jual yang didapat diringkas pada Tabel 39. Data ini menunjukkan rendahnya harga jual di tingkat petani dan tingginya keuntungan yang diperoleh perantara di daerah yang didominasi kelompok bandar dibanding dengan Kuningan atau daerah yang tidak didominasi oleh mereka di Majalengka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak rendahnya tingkat persaingan di antara perantara malahan tidak menguntungkan buat para petani.

Tabel 40 Data Harga Penjualan di Majalengka (Rp/kg)

	Daerah yang dikuasai “Sinar Ubi”			Daerah yang tidak dikuasai “Sinar Ubi”		
	Petani	Pengepul*	Bandar	Petani	Pengepul	Bandar
Rata-rata	565	800	1,250	989	(N.A.)	1,137

* Transaksi yang dilakukan pengepul hampir semuanya dilakukan sebelum panen, sehingga harga termasuk biaya panen dan biaya transportasi.

Sumber: wawancara dengan petani dan bandar dari Agustus sampai November 2006.

Data harga di Jakarta menunjukkan bahwa perbedaan harga pada harga eceran antara supermarket di kota dengan pasar lokal (Majalengka) lebih besar dibanding perbedaan harga di tingkat grosir.

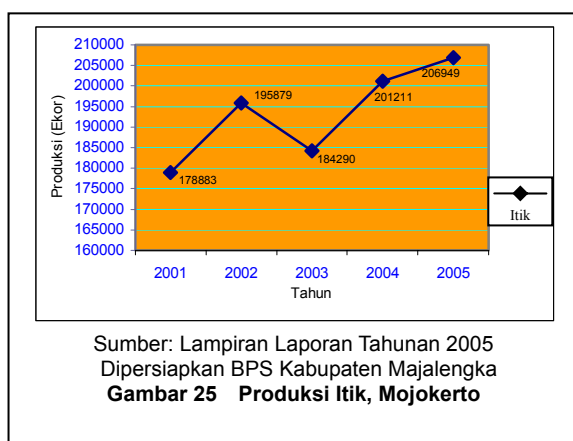
3.6 Kabupaten Mojokerto

3.6.1 Umum

(1) Kebijakan Kabupaten dalam Pengembangan Ternak dan Komoditas Contoh

Menurut rencana strategis 2001–2005 yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, satu dari enam visinya adalah “meningkatkan produksi dan produktifitas ternak melalui pemuliaan ternak, pengembangan pakan dan penerapan teknologi peternakan.” Pada visi ini, Dinas bermaksud meningkatkan populasi ternak sampai 2.1% per tahun untuk ternak besar dan 1.6% per tahun untuk ternak kecil serta meningkatkan produksi telur dan susu sebesar 2%. Dari komoditas contoh, itik merupakan salah satu fokus yang harus dikembangkan.

Ada lima program yang diprakarsai oleh Dinas: (i) program pengembangan produksi ikan dan ternak, (ii) program satu juta ternak melalui inseminasi buatan, (iii) Program peningkatan ketahanan pangan melalui pasokan sumber protein hewani dan pemberdayaan kegiatan nelayan, (iv) Program pemberdayaan infrastruktur dan fasilitas pembenihan ikan. (v) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, vaksinasi dan pemeriksaan rutin kualitas daging dan susu ternak.



Selain itu, Dinas Pertanian memberikan perhatian kepada pengembangan masyarakat melalui promosi pasar yang berorientasi pertanian, khususnya pengembangan agribisnis, yang kompetitif dan berkesinambungan. Produksi dan pengolahan itik jelas sesuai dengan rencana strategis ini.

Produksi itik di Kabupaten ini dirangkum dalam Gambar 25. Gambar ini menunjukkan pertumbuhan produksi bertahap selama lima tahun terakhir, meski tidak ada data di tingkat

kecamatan. Total produksi itik di kabupaten pada tahun 2005 adalah 206,900 ekor naik sekitar 15% dari tahun 2001.

(2) Administrasi Lokal

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto terdiri dari enam divisi: (i) Divisi Program dan Petugas Lapangan, (ii) Divisi Produksi dan Pengembangan, (iii) Divisi Kesehatan Hewan, (iv) Divisi Sistem Pemuliaan dan Pengolahan, (v) Divisi Pengembangan Perikanan dan (vi) Divisi Administrasi. Kelompok profesional Dinas fungsional dibentuk terpisah dari keenam divisi ini untuk mendukung kegiatan teknis Dinas yang diinstruksikan oleh Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berada langsung di bawah pengawasan Kepala Dinas, yang bertugas sebagai penyuluh lapangan.

3.6.2 Karakteristik Kelompok Tani

(1) Seminar Lapangan dan Hasil Evaluasi Kelompok Tani

Lima Kelompok Tani di lima kecamatan telah disurvei dan karakteristik kelompok dirangkum dalam Tabel 40:

Tabel 41 Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Mojokerto

	Karakteristik Utama	
	Keunggulan	Kelemahan
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Akses ke lembaga finansial lebih baik meski masih dalam tingkat perseorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Selain Kelompok Tani Lestari Sejahtera, kegiatan simpan pinjam tidak begitu aktif.
Sosial-Ekonomi: Rasio Populasi Miskin: 0.21 - 0.27	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada dampak negatif yang serius terhadap lingkungan yang disebabkan oleh produksi maupun pengolahan itik. 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi wanita pada Kelompok Lestari Sejahtera aktif sedangkan pada kelompok lain tidak.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan kelebihan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan adanya kesepakatan kerjasama seperti di Cirebon. Jaringan kerjasama dengan kelompok lain lemah.
Tingkat Teknologi Produksi dan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Berbeda dengan Kabupaten Cirebon, permintaan DOD jantan tinggi dan harga cukup bagus. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kesepakatan kerjasama (MOU) di antara kelompok tani seperti di Cirebon.
Potensi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan pengembangan pemasaran kelompok cukup kuat. Pengepul itik cukup aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan produk itik di dalam Kabupaten kecil. Produk dipasarkan ke kabupaten dan propinsi lain.
Rencana Ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> DOD jantan berpotensi untuk pengembangan masa depan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ide pengembangan ke depan yang spesifik dari Dinas Peternakan.

Berdasarkan survei lapangan, evaluasi kualitatif dibuat untuk memilih Kelompok Tani sebagaimana ditunjukkan Tabel 41:

Table 42 Hasil Evaluasi Kelompok Tani Kabupaten Mojokerto

Kelompok Tani		Keuangan	Sosial-Ekonomi	Organisasi	Produksi & Pengolahan	Potensi Pemasaran	Rencana Kedepan	Total
(Nilai Penuh)		18.0	9.0	26.5	16.0	18.5	12.0	100.0
1 Karya Tani	Kec. Pungging Desa Pungging Dusun Pungging	9.6 53%	4.2 47%	18.3 69%	11.2 70%	11.1 60%	8.4 70%	62.8 63%
2 Tani Mulyo	Kec. Bangsal Desa Mejoyo Dusun Jumpang	12.6 70%	6.6 73%	16.6 63%	9.6 60%	12.1 65%	8.4 70%	65.9 66%
3 Mulyo Tani	Kec. Mojo Anyar Desa Sadar Tengah Dusun Sadar	4.8 27%	4.2 47%	9.7 37%	9.6 60%	11.1 60%	4.8 40%	44.2 44%
4 Basuki	Kec. Bagnal Desa Salen Dusun Dadapan	10.2 57%	4.2 47%	11.7 44%	9.6 60%	11.1 60%	4.8 40%	51.6 52%
5 Lestari Sejahtera	Kec. Mojo Sari Desa Modopuro Dusun Gedung	12.0 67%	6.6 73%	10.5 40%	11.2 70%	14.8 80%	7.2 60%	62.3 62%

Hasil survei lapangan menjelaskan bahwa, saat ini, pasar itik di Mojokerto secara aktif dikuasai oleh pengepul dan permintaan komoditas itik cukup tinggi, sehingga disebut sebagai pasar penjual (*sellers' market*). Dengan bantuan pengepul aktif ini, pasar produk itik Mojokerto berkembang sampai ke Surabaya dan daerah sekitarnya. Seleksi dilakukan, hanya berdasarkan penilaian kualitatif. Dari hasil evaluasi ini, tiga Kelompok Tani dipilih

sebagai kelompok model, yaitu Kelompok Tani Karya Tani, Lestari Sejahtera dan Tani Mulyo.

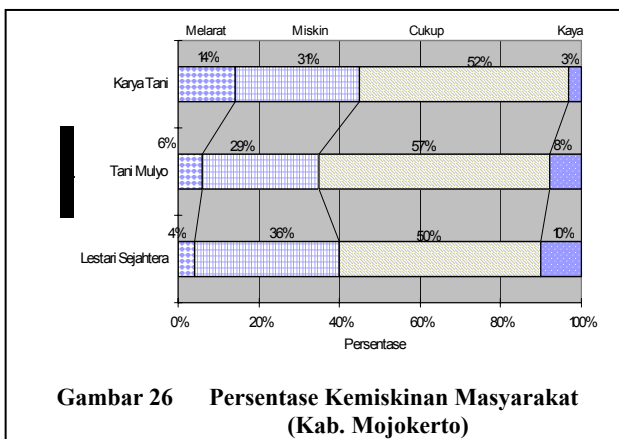
(2) Hubungan Kelembagaan dan Alur Produksi-Pemasaran

Di Karya Tani, layanan dari instansi pemerintah memberikan manfaat dan pengaruh ke kelompok, jasa layanan ini termasuk PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), pamong desa dan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Sedangkan P4K, yang memberi dukungan kepada kelompok, juga diakui memiliki hubungan penting dengan kelompok. Untuk lembaga keuangan, BRI Pungging dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memiliki hubungan sangat penting dengan kelompok.

Peserta seminar dari Lestari Sejahtera juga mengemukakan pentingnya layanan dari instansi pemerintah. Berbeda dengan Karya Tani, di sini juga disebutkan pentingnya peran organisasi keagamaan, Muslimat NU. Manfaat dari lembaga keuangan yang dirasakan Kelompok Karya Tani relatif masih kecil.

Hubungan “paling dekat” yang dirasakan masyarakat Tani Mulyo adalah dengan pamong Alur produksi-pemasaran yang dibuat petani dalam seminar, menunjukkan arah dan alur

proses produksi-pemasaran sebagai sebuah sistem.



Gambar 26 Persentase Kemiskinan Masyarakat (Kab. Mojokerto)

(3) Peringkat Kemiskinan

Hasil survei tingkat kemiskinan di tiga Kelompok Tani ini diringkas pada Gambar 26 di sebelah kiri. Persentase kategori melarat dan miskin di masyarakat Kelompok Tani Tani Mulyo secara komparatif lebih rendah.

(4) Masalah, Solusi dan Tindak Lanjut

Selama seminar lapangan, masalah-masalah yang saat ini dihadapi masyarakat di tiga Kelompok Tani dicatat dan diberi peringkat seperti yang diringkas pada Tabel 42, 43 dan 44:

Tabel 43 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Karya Tani)

Peringkat	Masalah
I	Keterbatasan dana untuk meningkatkan jumlah kandang itik Keterbatasan dana untuk meningkatkan populasi itik
II	Peralatan untuk mencampur pakan masih sederhana
III	Tingkat kematian yang tinggi (10-15% pada umur 0 – 20 hari)

Tabel 44 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Lestari Sejahtera)

Peringkat	Masalah
I	Harga pakan yang tinggi
II	Kekurangan modal untuk membeli pakan dan bahan bakar
III	Naiknya harga bahan bakar
IV	Harga DOD yang tidak stabil
V	Perubahan cuaca

Tabel 45 Peringkat Masalah (Kelompok Tani Tani Mulyo)

Peringkat	Masalah
I	Keterbatasan modal untuk mengembangkan produksi itik
II	Produksi telur yang tidak stabil
III	Harga pakan dan bahan bakar yang tinggi
IV	Harga produk (DOD, telur dan itik) yang tidak stabil
V	Populasi itik yang jumlahnya masih terbatas

Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha merupakan masalah peringkat utama pada semua kelompok tani. Dalam sesi ini, “kenaikan harga bahan bakar” meski merupakan faktor eksternal juga didiskusikan dan diberi peringkat sebagai masalah serius. Solusi masalah dan tindak lanjut dari masalah-masalah yang berperingkat tinggi tersebut disiapkan oleh peserta.

3.6.3 Pengolahan Hasil Peternakan

Teknologi dasar peternakan itik dan rasio penanganan usaha, seperti pemeliharaan itik, produksi DOD dan pengolahan telur asin setingkat dengan di Cirebon. Proses penentuan harga juga hampir sama. Akan tetapi, ditemukan beberapa perbedaan yang selanjutnya akan dijelaskan.

Tidak ada sistem pemasok utama yang definitif untuk produk telur fertile, DOD dan itik dara seperti di Cirebon. Ini menyebabkan terhambatnya pengembangan usaha peternakan itik di Mojokerto. Sulit bagi pendatang baru untuk masuk ke usaha itik, demikian juga peternak yang sudah ada kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Dinas Peternakan direkomendasikan untuk mulai membangun skema segitiga (seperti di Cirebon) di Mojokerto untuk pengembangan industri itik.

Ada kelompok tani terbesar (di Mojokerto) yang menangani usaha itik di Desa Modopuro, yaitu Kelompok Tani Lestari Sejahtera. Semua anggota kelompok (47 orang) memiliki alat penetasan sendiri sehingga mereka bisa memproduksi DOD untuk memenuhi kebutuhan usaha sendiri dan bisa memenuhi permintaan telur fertile, telur asin dan itik pedaging. Pengolahan bebek asap merupakan produk spesial mereka. Kelompok tani lain yang terletak dekat KT Lestari Sejahtera pernah mencoba untuk mengembangkan usaha itik dengan dukungan teknis dan keuangan dari Dinas sejak 2001, tetapi usaha mereka ini belum tumbuh dan berkembang di desa ini sampai sekarang. Desa ini terdiri dari 200 rumah tangga tetapi jumlah petani yang dipilih oleh Dinas untuk memulai usaha itik hanya 28 keluarga. Disamping itu, rumah-rumah di desa ini agak tertutup dan petani yang tidak terpilih tidak menyukai bau dan suara itik yang berisik. Jadi, pengenalan usaha baru perlu mempertimbangkan semua aspek seperti lokasi, lingkungan, hubungan

antar warga, kepemimpinan, kemampuan manajerial, akuntansi, transparansi usaha, kondisi pemasaran, infrastruktur dan lain-lain.

Untuk proses penetasan, peternak di kabupaten ini juga masih menggunakan teknologi sederhana yaitu menggunakan lampu minyak untuk pemanas dan menggunakan tangan untuk mengetahui temperatur. Akan tetapi, untuk mengontrol temperatur telur, mereka tidak hanya mematikan lampu minyak dan membuka pintu alat penetasan, tetapi mereka juga membalik telur dengan kain basah atau menyiprat air pada setiap telur dengan menggunakan *hand-sprayer*. Peternak memutar telur dalam alat penetasan 3 kali dalam sehari (pagi, siang dan malam). Teknologi baru seperti alat penetasan semi-otomatis dengan pemanas listrik belum diperkenalkan di daerah ini.

Hampir semua varitas itik adalah Mojosari (varitas lokal dan tercatat sebagai varitas unggulan). Varitas ini disebut sebagai itik kering yang tidak membutuhkan banyak air. Pasokan itik pedaging adalah sangat aktif di Mojokerto. DOD jantan dipelihara untuk dijadikan itik pedaging sampai usia 40 – 60 hari, sehingga harga jual DOD jantan dan betina kadang sama persis, tidak seperti di Cirebon.

Untuk pengolahan telur asin, disamping menggunakan metode kering seperti di Cirebon, beberapa kelompok peternak menggunakan metode basah. Dengan metode basah, telur mentah direndam dalam air asin selama 10-12 hari tanpa dilumuri dengan campuran garam dan tanah. Metode basah ini lebih mudah meski kualitasnya lebih rendah dibanding dengan metode pelumuran, tetapi harga di pasar hampir sama. Meski menggunakan metode kering, peternak di daerah ini tidak menggunakan abu sebagai bahan adonan. Alasannya bahwa dengan maupun tanpa abu rasanya tidak berbeda, tetapi dengan tidak menggunakan abu mereka bisa mengurangi biaya produksi dan beban kerja. Pendekatan baru seperti ini perlu diuji oleh lembaga yang berkompeten dan perlu disebarkan ke daerah lain jika diterima.

Para petani di Mojokerto biasanya mengangon itiknya pada usia 20 hari sampai 5 bulan (siap bertelur). Saat itik siap bertelur, peternak akan memeliharanya di kandang. Kandang itik terbuat dari batu bata dan atap terbuat dari ubin, sehingga tampak seperti bangunan semi permanen dan lebih bersih dibanding dengan kandang itik di Cirebon.

Kendala utama yang dihadapi peternak dalam beternak itik di Mojokerto sama dengan yang dihadapi peternak di Cirebon, yaitu bahwa harga pakan relatif tinggi tetapi harga telur mentah relatif rendah. Mereka juga membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usah itik mereka, karena sebagian besar kelompok tani kekurangan modal.

3.6.4 Pemasaran

(1) Saluran Pemasaran

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas menunjukkan bahwa perantara terlibat dalam sebagian besar transaksi berkaitan dengan itik. Produk utama usaha itik yang didistribusikan di Mojokerto adalah telur segar, telur asin, DOD dan itik pedaging.

Pelaku utama yang menghubungkan peternak dengan pengecer produk itik di pasar Mojokerto adalah 1) bandar dan tengkulak, 2) pengepul dan pengepul desa 4) pedagang. Pelaku pasar produk itik ini, dalam banyak kasus memiliki peran ganda. Bukan hal yang aneh apabila pegawai pemerintah kabupaten juga merangkap sebagai bandar atau pengepul.

Banyak peternak terikat untuk menjual produk mereka ke perantara karena pinjaman yang diberikan oleh perantara.

Pengepul desa dan pengepul biasa adalah pelaku pasar di beberapa kecamatan, dan ditemukan beberapa jenis transaksi yang terjadi antara peternak itik dengan pengepul seperti:

- (i) Berdagang dengan komitmen – sebagai contoh pengepul menjual DOD untuk dipelihara oleh peternak, selanjutnya setelah menjadi dara, pengepul membelinya dari peternak. Perhitungan bagi hasil dan biaya pemeliharaan dihitung pada akhir komitmen.
- (ii) Pengepul membeli bermacam produk pakan sortiran (*reject*) dari pabrik makanan di kabupaten lain untuk dibuat pakan itik dan dijual ke peternak dengan harga lebih murah.

Di Mojokerto, tidak ada pasar produk inti yang didominasi kelompok perantara (bandar). Di bawah situasi kompetitif ini, perantara (khususnya pengepul desa) harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari peluang pasar dan segala risiko agar bertahan sebagai pelaku pasar.

Menurut perkiraan Dinas Peternakan Mojokerto, peternak itik yang tergabung dalam Kelompok Tani adalah 70%. Kelompok Tani yang dimiliki perantara terbatas jumlahnya. Usaha itik dilakukan sebagian besar dilakukan oleh perantara dan bandar, dan lebih banyak yang dilakukan anggota kelompok tani termasuk ketua secara perseorangan daripada melalui kelompok.

Meski data resmi tidak tersedia, pada tahun-tahun terakhir, banyak telur segar, DOD dan telur asin yang dijual keluar kabupaten dan propinsi lain karena tingginya permintaan di Surabaya dan daerah sekitarnya.

Harga jual tiap produk itik dikumpulkan dari tiap titik alur pemasaran. Meski jumlah contoh terbatas, jangkauan harga dan rata-rata harga diringkas pada Table 45. Dari data yang ada terlihat bahwa margin keuntungan para perantara adalah kurang dari 5%, dapat diterima oleh peternak, dan menunjukkan situasi yang kompetitif di antara perantara (khususnya pengepul) di Mojokerto.

Tabel 46 Ringkasan Data Harga Jual di Mojokerto (Rp/butir)

	Telur Segar		Telur Asin	
	Peternak	Perantara	Peternak	Perantara
Jangkauan Harga	620 - 760	680 – 700	800 – 850	-
Harga Rata-rata	671	695	833	-

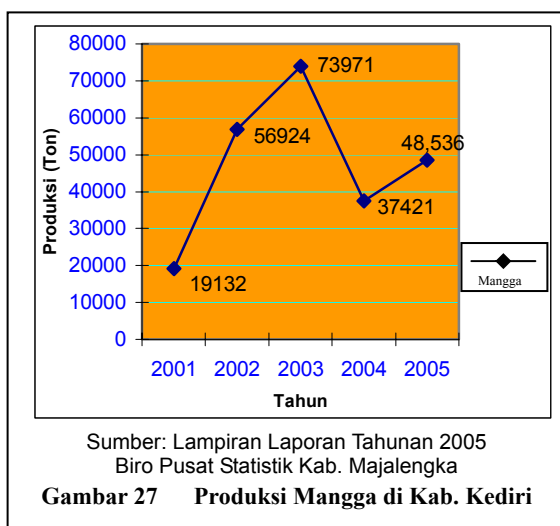
Sumber: Wawancara dengan KT / Perantara / Pasar, Agustus-November 2006

Kesepakatan kerjasama antara Kelompok Tani Itik sebagaimana dijumpai di Cirebon saat ini belum dijumpai di Mojokerto.

3.7 Kabupaten Kediri

3.7.1 Umum

Kebijakan pengembangan pertanian di Kabupaten Kediri memberi prioritas pada: (i) peningkatan produktivitas pertanian, (ii) promosi industri pengolahan khususnya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk primer, (iii) pengembangan sentra produksi untuk produk-produk potensial, dengan memfasilitasi keikutsertaan kelompok tani. Lima program berikut ini merupakan prioritas pada kebijakan pertanian kabupaten: (i) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (ii) Program Pengembangan Agribisnis dan Agro-industri, (iii) Program Pengembangan Kualitas Unggul untuk Buah-buahan dan Sayuran, (iv) Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan (v) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Produksi komoditas contoh dari Kabupaten Kediri, yaitu mangga ditunjukkan dalam Gambar 27. Meski mangga merupakan satu jenis tanaman yang berusia panjang, produksinya menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Produksi pada tahun 2003 terlihat merupakan produksi tertinggi dalam 5 tahun belakangan, sementara produksi tahun 2005 hanya mencapai 66% dari produksi tahun 2003.

Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Tarokan adalah kecamatan yang paling tinggi produksi (10,100 ton), Grogol (7,700 ton) dan Banyakan (7,600 ton). Produksi mangga di 4 kecamatan

ini mendominasi sekitar 84% dari total produksi mangga di Kediri.

Di antara banyak varietas mangga yang dihasilkan di Kediri, Kabupaten Kediri memberikan prioritas pada varietas Mangga Podang sebagai komoditas strategis yang belakangan ini ditanam di kecamatan sepanjang Sungai Brantas. Varietas Podang secara resmi diakui sebagai varietas mangga terbaik seperti yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 336/Kpts/TP. 240/6/2003.

(2) Administrasi Lokal

Dinas Pertanian Kabupaten Kediri terdiri dari lima divisi: (i) Divisi Produksi Pertanian, (ii) Divisi Usaha Pertanian, (iii) Divisi Perlindungan Lahan dan Tanaman, (iv) Divisi Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian, dan (v) Divisi Administrasi. Kelompok fungsional profesional dibentuk secara terpisah dari 5 divisi ini untuk mendukung kegiatan teknis Dinas yang diinstruksikan oleh Kepala Dinas.

3.7.2 Karakteristik Kelompok Tani

(1) Survei Lapangan Kelompok Tani dan Hasil Evaluasi

Enam Kelompok Tani yang tersebar di empat kecamatan telah disurvei, dan karakteristiknya diringkas pada Tabel 46:

Tabel 47 Ringkasan Kelompok Tani yang Disurvei di Kabupaten Kediri

	Karakteristik Utama	
	Keunggulan	Kelemahan
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Kelompok, Budi Daya dan Makmur Jaya, didukung oleh P4K, kegiatan simpan pinjam lebih baik, khususnya Makmur Jaya praktek keuangannya dievaluasi oleh BRI, hasilnya lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses ke lembaga keuangan secara fisik tidak bagus karena kondisi daerah topografinya yang merupakan daerah perbukitan.
Sosial-Ekonomi: Rasio Populasi Miskin: 0.31 - 0.50	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada dampak negatif pada lingkungan. • Partisipasi wanita relatif lebih tinggi dibanding kabupaten lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses fisik saat ini menghambat akses pasar, perlu ada perbaikan akses fisik.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok yang anggota wanitanya aktif terlibat dikelola dengan baik dan aktif dalam kegiatan pemuliaan mangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan adanya hubungan kerjasama seperti kelompok tani itik Cirebon.
Tingkat Teknologi Produksi dan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dukungan teknis dari Universitas Brawijaya di Malang untuk mendukung pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya 2 kelompok (Budi Daya dan Lestari) melakukan pengolahan, dan teknologi pengolahan belum diperoleh kelompok. • Tidak ada industri pengolahan mangga. • <i>Vacuum fryer</i> yang disediakan Dinas tidak berfungsi di Kelompok Budi Daya.
Potensi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ada opsi pemasaran untuk petani, yaitu melalui penebas dan pengepul, 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan mangga dalam kabupaten kecil, dan lebih dari 50% produksi dijual keluar kabupaten. • Pemasaran kelompok masih menjadi tantangan. • Harga mangga murah khususnya saat puncak panen.
Rencana Ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> • Varitas Podang pilihan dan Gedhong Gincu berpotensi untuk meningkatkan pendapatan kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana ke depan sebagian besar kelompok tidak jelas.

Berdasar hasil survei lapangan, evaluasi kualitatif berikut ini dibuat untuk memilih model Kelompok Tani di Kabupaten Kediri:

Tabel 48 Hasil Evaluasi Kelompok Tani di Kabupaten Kediri

Kelompok Tani		Keuangan	Sosial-Ekonomi	Organisasi	Produksi & Pengolahan	Potensi Pemasaran	Rencana Kedepan	Total
(Nilai Penuh)		18.0	9.0	26.5	16.0	18.5	12.0	100.0
1 Budi Daya	Kec. Banyak Ds. Tiron	15.0 83%	6.6 73%	17.9 68%	11.2 70%	9.2 50%	7.2 60%	67.1 67%
2 Lestari	Kec. Semen Ds. Pugung	6.6 37%	5.4 60%	15.9 60%	9.6 60%	10.1 55%	4.8 40%	52.4 52%
3 Karya Makmur II	Kec. Tarokan Ds. Bulusari	10.2 57%	5.4 60%	13.9 52%	6.4 40%	8.8 48%	4.8 40%	49.5 50%
4 Makmur Jaya	Kec. Tarokan Ds. Tarokan	10.2 57%	6.6 73%	13.9 52%	7.2 45%	11.4 62%	4.8 40%	54.1 54%
5 Sri Rejeki I	Kec. Grogol Ds. Kalipang	4.2 23%	5.4 60%	14.3 54%	8.8 55%	11.4 62%	4.8 40%	48.9 49%
7 Sumber Makmur	Kec. Grogol Ds. Kalipang	5.4 30%	4.2 47%	13.3 50%	6.4 40%	10.1 55%	4.8 40%	44.2 44%

Sebagaimana disebutkan di atas, dari enam kelompok tani yang disurvei, hanya dua kelompok, Budi Daya dan Lestari, yang melakukan pengolahan. Pengolahan mangga masih dalam tahap pengembangan, sehingga sebagian besar Kelompok Tani umumnya memiliki tingkat yang sama dalam pengolahan. Karena itu, berbeda dengan ubi jalar di Kuningan dan Majalengka, Kelompok Tani tidak diklasifikasikan menjadi kelompok produksi dan pengolahan tetapi hanya menggunakan penilaian kualitatif untuk menyeleksi kelompok model. Dari penilaian ini, Kelompok Tani Budi Daya yang kompetitif di sebagian besar aspek dan Makmur Jaya yang menonjol di pemasaran dipilih sebagai kelompok model.

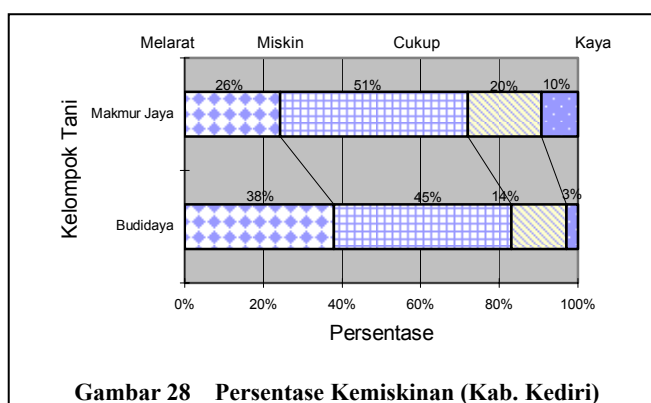
(2) Hubungan Kelembagaan dan Alur Produksi-Pemasaran

Gambaran hubungan kelembagaan dan alur produksi-pemasaran dipersiapkan dalam seminar yang diselenggarakan di Kelompok Tani Budi Daya dan Makmur Jaya. Masyarakat di Kelompok Tani Budi Daya mendapatkan manfaat dan pengaruh khususnya dari Muslimat NU (organisasi keagamaan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan Kelompok Tani Hutan yang terletak dekat kelompok dan memiliki beberapa hubungan usaha. Saat ini hubungan dengan lembaga keuangan masih relatif kecil. Ini disebabkan bahwa petani harus menunjukkan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan resmi. Karena itu, petani di Budi Daya sangat tergantung pada lembaga keuangan tidak resmi seperti tengkulak dan rentenir.

Sedangkan masyarakat di Kelompok Tani Makmur Jaya, mendapat manfaat dan pengaruh “sangat besar” dari lembaga keuangan, BRI Tarokan. Hubungan dengan layanan instansi pemerintah juga cukup berperan termasuk LMDH, Dinas Pertanian Kabupaten bersama dengan petugas penyuluh lapangan, pamong desa dan layanan lembaga pendidikan. Disamping itu, alur produksi-pemasaran yang dibuat petani dalam seminar, menunjukkan arah dan alur dari proses produksi-pemasaran sebagai sebuah sistem. Petani mangga bergantung kepada perantara dan pedagang dalam memasarkan komoditas mereka.

(3) Peringkat Kemiskinan

Hasil survei tingkat kemiskinan pada dua Kelompok Tani ditunjukkan pada Gambar 28 di sebelah kanan. Persentase kategori melarat dan miskin cukup tinggi yaitu 70 sampai 80% dari anggota masyarakat, di dua Kelompok Tani tersebut dibanding dengan Kabupaten lain.



Gambar 28 Persentase Kemiskinan (Kab. Kediri)

(4) Masalah, Solusi dan Tindak Lanjut

Selama seminar lapangan di dua Kelompok Tani, masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat didata dan diberi peringkat seperti diringkas pada Tabel 48 dan Tabel 49 berikut ini:

Tabel 49 Peringkat Kemiskinan (Kelompok Tani Budidaya)

Peringkat	Masalah
I	Kekurangan alat transportasi dan kondisi jalan yang rusak
II	Dalam melakukan budidaya kurang menggunakan pupuk dan menggunakan pestisida Kelompok belum sepenuhnya memanfaatkan lembaga keuangan yang ada
III	Pengemasan masih sederhana (keranjang bambu, kotak kayu)
IV	Kekurangan arahan/dukungan dari instansi pemerintah terkait
V	Pemasarannya masih di pasar lokal dengan harga jual kurang menguntungkan

Tabel 50 Peringkat Kemiskinan (Kelompok Tani Makmur Jaya)

Peringkat	Masalah
I	Harga pasar yang tidak stabil
II	Pengetahuan dan kemampuan menangani hama mangga dan penggunaan pestisida masih kurang
III	Kondisi jalan yang rusak (dari Geneng ke Banyakan Market) mengakibatkan tingginya biaya transportasi
IV	Kesulitan mendapatkan modal untuk produksi
V	Kesulitan mendapatkan pupuk

Akses fisik dari kedua Kelompok Tani menuju pasar kondisinya parah, karena itu, dapat dimengerti bahwa para peserta seminar memberi peringkat tinggi pada masalah kekurangan transportasi dan kondisi jalan. Masalah-masalah yang biasa dihadapi kelompok juga mengemuka (i) kemampuan dalam budidaya mangga yang belum cukup dan (ii) kegiatan pemasaran yang tidak memadai. Berdasarkan hasil diskusi, tiap Kelompok Tani menyiapkan solusi masalah-masalah yang berperingkat tinggi dan tindak lanjutnya baik untuk jangka panjang dan jangka pendek.

3.7.3 Pengolahan Hasil Pertanian

Dinas Pertanian Jawa Timur mempromosikan Mangga Podang sebagai komoditas utama Kabupaten Kediri, tapi sampai saat ini, tidak banyak perhatian yang diberikan pada masalah penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran oleh lembaga terkait.

Karenanya, selama masa panen harga mangga turun drastis (sebelum puncak panen harga mangga podang Rp.2.000/kg tapi akan turun tajam sampai Rp.300-400/kg pada masa puncak panen).

Pengolahan Mangga Podang belum dikembangkan di daerah produksi mangga (Kecamatan Tarokan, Semen, Grogol, dan Banyak). Beberapa kelompok tani berkeinginan melakukan pengolahan Mangga Podang, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan dalam mengolah dan memasarkan produknya. Di samping itu, sebagian besar kelompok kekurangan modal untuk mengolah mangga. Sampai saat ini, sebagian besar petani menjual mangga dalam bentuk mangga segar ke pengepul. Konsekuensinya, pada puncak panen mereka tidak mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya panen karena harganya begitu rendah.

Sebuah Kelompok Tani Wanita (KT Budidaya) pernah memperoleh *vacuum fryer* untuk mangga dan pelatihan dari BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Malang. Akan tetapi, pengolahan mangganya masih dalam tahap percobaan. Mereka memproduksi jus mangga dengan menggunakan metode sederhana tanpa melalui proses pasteurisasi, dan hanya bertahan (masa kadaluwarsanya) 1 hari saja.

Karena petani sangat ingin menjual seluruh mangga hasil produksinya, 75% produksi mangga dijual ke pengepul sebelum masa panen. Transaksi semacam ini disebut sistem ijon dan banyak dipraktekkan di Jawa terutama pada beberapa komoditas seperti mangga, buah-buahan lain, ubi-ubian seperti ubi jalar dan ubi kayu, sayuran dan kadang juga padi. Perantara dan pengepul membuat kesepakatan lisan dengan para petani untuk membeli komoditas-komoditas semacam ini berdasarkan ukuran pohon atau berdasarkan luas area tanaman, tidak berdasar berat atau volume komoditas. Pola pembayaran ditentukan sebelum panen. Petani bisa mendapat pembayaran uang tunai sebagian di muka sebelum panen tanpa resiko adanya kegagalan panen. Sewa buruh untuk memanen dilakukan oleh pengepul, petani tidak terlibat dalam panen ini.

Jumlah pembayaran dari penjualan mangga yang diterima petani diperkirakan dan ditentukan oleh pembeli (pengepul) melalui perkiraan di lahan panen berdasar pengalamannya. Sistem ini sangat berisiko tetapi juga bisa sangat menguntungkan bagi pengepul karena dia bisa memastikan kondisi komoditas di lahan panen dan bisa menegosiasikan harga dengan petani sejak awal. Untuk panen buah di negara-negara lain, kematangan buah berbeda waktunya tiap batangnya, dan petani bisa memilih buah yang matang untuk dipanen duluan, dia tidak pernah memanen semua buah dalam satu kali panen. Terlihat sistem ijon ini merupakan kasus yang jarang, dimana petani menjual buah berdasarkan pohon atau berdasarkan luas lahan tanpa petani terlibat dalam panen. Perilaku dan kebiasaan petani yang menjual dengan sistem ijon ini perlu diubah sebelum teknologi baru untuk panen dan pemasaran diperkenalkan pada mereka.

Ada dua kegiatan penting yang perlu dicatat yang sudah dimulai di Kabupaten Kediri. Salah satunya adalah pengolahan manisan mangga kering pada tingkat Kelompok Tani. Sebuah LSM bernama REI Indonesia (*Resource Exchange International*) yang berlokasi

di Bandung memulai mengolah mangga di KT Sumber Mulyo, Desa Tiron, Kec. Banyakan. REI memasang alat pengering buah (fruit dryer) dengan kompor tabung dan melakukan pengawasan teknis pada anggota. Selain itu REI Indonesia juga mendapat dukungan teknis dari BPTP, Malang. Usaha ini baru dimulai pada Oktober 2006, dan REI berencana mengeksport manisan mangga kering ini ke Amerika Serikat dan Jepang di masa depan.

Kegiatan lain yang layak dicatat adalah pengolahan nanas oleh Kelompok Tani Lohjinawi, yang terletak di Kecamatan Ngancar. Para petani muda dari kelompok ini mulai membuat jus nanas, nanas kering, minyak kelapa murni dan produk lain sejak 2002. Mereka mendapat bantuan teknis dari BPTP Malang, Universitas Brawijaya dan Dinas Perindustrian Kediri. Peralatan mereka sederhana dan tidak mahal tetapi menggunakan *heat-sealer* terbaru untuk kemasan botol plastik. Kelompok Tani memiliki 75 anggota dan 10 anggota muda yang menangani usaha baru ini untuk menghasilkan pendapatan. Mereka pernah memasok jaringan supermarket tetapi karena pembayarannya tidak beres, saat ini mereka berhenti memasok produk itu, tetapi menunjuk 4 agen yang tinggal di daerah perkotaan untuk bertanggung jawab dalam pengembangan pasar. Pembagian tugas, yaitu petani berkonsentrasi untuk menangani produksi dan menunjuk tim lain untuk pemasaran di daerah perkotaan akan menjadi solusi bagi ketakutan petani akan terjaminnya pasar bagi komoditas olahan yang mereka hasilkan.

Mangga Podang adalah buah musiman, sehingga kegiatan pengolahan mangga hanya dilakukan pada musim panen, hanya 3 bulan dari November sampai Januari. Pada saat tidak musim mangga peralatannya tidak berfungsi dan dari sisi bisnis ini tidak menguntungkan. Karena itu, pengolahan mangga perlu dikombinasikan dengan pengolahan buah-buah lain untuk memperpanjang waktu operasinya. Untuk kelangsungan pengolahan komoditas pertanian (*agro processing*), kemampuan pemasaran dan kapasitas usaha kelompok diidentifikasi sebagai langkah awal untuk memulai mendapat pinjaman lunak.

3.7.4 Pemasaran

(1) Jalur Pemasaran

Perantara, bandar dan pengepul terlibat dalam sebagian besar transaksi produk mangga yang dilakukan petani anggota Kelompok Tani maupun petani bukan anggota Kelompok Tani.

Pelaku utama yang menghubungkan antara petani (perseorangan/kelompok) dan pengecer di pasar mangga di Kediri adalah 1) bandar dan tengkulak, 2) pengepul desa dan pengepul, 3) pedagang. Pelaku pasar dalam beberapa kasus berperan ganda. Banyak pengepul desa memiliki dua peran yaitu sebagai penebas dan pengepul.

Bandar di Kediri biasanya membeli mangga segar dari pengepul desa dan menjualnya ke kabupaten lain. Mereka dapat dikatakan memiliki posisi yang lebih tinggi, volume usaha lebih besar dan area pemasaran lebih luas dibanding dengan pengepul.

Pengepul desa adalah pihak yang paling dekat dengan petani dalam bertransaksi dan tinggal di desa yang sama, biasanya menjadi penghubung antara petani dan bandar. Ciri khusus transaksi mangga dengan petani di Kediri adalah adanya “penebas”, yaitu pengepul desa yang membeli mangga dari petani sebelum panen (disebut “sistem tebas”). Mayoritas transaksi mangga segar di Kediri dilakukan antara petani dengan penebas, karena kuatnya keinginan petani untuk mendapatkan kepastian terjualnya produk mereka. Pengepul biasa yang membeli produk setelah panen disebut “pengepul”.

Proporsi Tiap Jalur dan Sistem Transaksi

Menurut Dinas Pertanian Kediri, petani mangga yang menjadi anggota Kelompok Tani adalah sebanyak 60% dari total petani mangga. Bisnis mangga di Kediri sebagian besar dilakukan melalui perantara, bandar, pengepul, dan anggota kelompok tani termasuk ketua sebagai perseorangan, tidak sebagai kelompok.

Dari mangga segar yang diproduksi di Kediri, sekitar 75% dijual petani ke penebas sebelum panen, 15% dijual ke pengepul setelah panen dan 10% ke bandar. Pengepul menjual 80% ke bandar dan 20% ke pengecer.

Harga jual dari petani ke pengepul sepenuhnya ditentukan oleh pengepul dengan pembayaran tunai. Harga menjadi paling rendah pada saat musim panen (biasanya dari November sampai Desember), dan mencapai puncaknya sebelum musim panen (Oktober sampai November). Pada musim panen, pengepul desa menjadi sedikit jumlahnya karena harga mangga di pasar rendah. Sehingga, terpaksa petani menjual sendiri ke pasar dengan resiko kerugian (busuk dan tidak laku). Situasi seperti ini mendorong munculnya “sistem tebas” (transaksi sebelum panen) yang dilakukan oleh penebas dan petani.

Pada kasus “sistem tebas”, kriteria untuk menentukan harga jual petani ke penebas adalah (a) jumlah dan ukuran pohon per unit area, (b) kualitas buah, (c) waktu panen, dan lain-lain. Akan tetapi tidak ada standar baku dalam menentukan kualitas buah. Pembayaran biasanya dilakukan secara berangsur dengan persyaratan yang berbeda pada tiap kasus. Menurut Dinas, kebanyakan kasus adalah 10 % pada saat kontrak (sebagian besar dalam bentuk kesepakatan lisan, 1 sampai 2 dua bulan sebelum panen), 50 % pada permulaan panen dan 40 % setelah panen selesai. Karena jarak antara waktu kontrak dan penjualan komoditas, penebas juga menghadapi beberapa resiko. Meskipun demikian, tidak aneh ada penebas yang secara sepihak mengubah harga yang telah disepakati untuk mendapatkan keuntungan dengan mengikuti situasi pasar. Meski transaksi dengan penebas lebih memberi ruang negosiasi bagi petani dibanding dengan transaksi dengan pengepul, inisiatif penentuan harga biasanya tetap datang dari penebas.

Lebih dari 50% mangga segar dijual keluar kabupaten/propinsi melalui perantara (bandar), karena permintaan mangga di Kediri terbatas. Di Kediri ada sebuah “pasar buah” yang terletak di Kecamatan Banyakan, pusat daerah produksi mangga di Kediri. Sekitar 80% mangga segar lokal masuk ke pasar ini pada musim panen, tetapi pembeli dari luar kabupaten/propinsi lebih banyak daripada pembeli lokal.

Harga jual produk mangga telah dikumpulkan dari tiap titik jalur pemasaran. Meski jumlah contoh terbatas, jangkauan harga dan rata-rata harganya diringkas pada Tabel 50. Dari data ini menunjukkan bahwa margin keuntungan yang diperoleh perantara (khususnya pengepul, termasuk “penebas”) sekitar 30-35% (kotor) dan sekitar 20% (bersih) dengan asumsi biaya yang dikeluarkan Rp.300-400/kg. Dari data terlihat pengepul mengambil keuntungan besar untuk menutup risiko seperti yang dijelaskan di atas. Sementara petani terpaksa menjual produknya dengan harga relatif rendah. Untuk analisis yang lebih akurat, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan, mengingat perbedaan harga yang cukup besar meski dengan basis yang sama, ditambah terbatasnya jumlah contoh.

Tabel 51 Data Harga Jual Mangga di Kabupaten Kediri (Rp/kg)

	Mangga Podang Segar	
	Petani	Perantara
Jangkauan Harga	750 – 2,500	2,000 – 2,700
Harga Rata-rata	1,583	2,425

Sumber: wawancara dengan kelompok tani, perantara/dan pasar dari Agustus-November 2006.

Sebagai informasi tambahan, dari data harga yang didapat di Jakarta, menunjukkan bahwa perbedaan harga eceran mangga segar antara daerah perkotaan (supermarket) dan pasar lokal (Kediri) lebih besar daripada perbedaan harga grosirnya.

3.8 Lembaga Keuangan Mikro

3.8.1 Latar Belakang Layanan Keuangan yang Tersedia bagi Masyarakat Tani

(1) Akses Fisik

Penelitian awal yang dilakukan oleh Studi mengungkapkan bahwa kebanyakan petani dan penduduk pedesaan telah memiliki akses fisik ke beberapa bank umum, kecuali untuk beberapa Kelompok Tani di Mojokerto, serta akses ke layanan keuangan mikro dan layanan keuangan informal lainnya. Layanan keuangan mikro yang dapat diakses oleh Kelompok Tani yang terseleksi adalah (i) bank (Unit BRI, BPD, dan BPR), (ii) koperasi berbadan hukum (KSP, USP, KUD), (iii) BKD, pegadaian, dan (iv) layanan dari sektor informal termasuk Kelompok Tani dan koperasi tani yang belum berbadan hukum, arisan, pedagang, rentenir dan warung. Layanan keuangan yang secara fisik terdapat di masyarakat dimana Kelompok Tani yang terseleksi berada, dirangkum dalam Tabel 51 berikut ini.

Tabel 52 Layanan Keuangan yang Tersedia bagi Masyarakat Kelompok Tani di Propinsi Jawa Barat

	Kelompok Tani	Bank dan BPR	Non-Bank	Lainnya
Cirebon, Itik	Tigan Mekar Desa Karanganyar Kec. Panguragan	▪ <i>BRI Unit Panguragan</i> ▪ BRI Unit Gegesik ▪ BPR Panguragan	▪ <i>Koperasi Sumber Rejeki</i> ▪ Pegadaian ▪ Bank Desa	▪ <i>Pedagang</i>
	Bebek Jaya Desa Bayalangu Kec. Cirebon Utara	▪ BRI Unit Kapetakan ▪ <i>BPR Cirebon Utara</i> (ditangani oleh BPR Kapetakan)	▪ <i>KSP Syariah Prambabulan Al Qomariyah</i> ▪ KUD* ¹ Mina Waluya	▪ Pedagang Pakan
	Sigranala Indah Desa Bayalangu	▪ BRI Unit Gegesik ▪ BRI Unit Cilimus	▪ Pegadaian ▪ Bank Desa	▪ <i>Perantara</i> ▪ Arisan

	Kelompok Tani	Bank dan BPR	Non-Bank	Lainnya
	Kec. Ge gesik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPR Kapetakan ▪ BPR Ge gesik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KUD Karya Bakti ▪ <i>Rentenir</i> 	
Kuningan, Ubi Jalar	Andayarsa Desa Bandu Rasa Wetan Kec. Cilimus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BNI Kuningan</i> ▪ BRI Unit Cilimus ▪ Bank Jabar Cilimus ▪ BPR Cilimus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>KUD Bangkit Abadi</i> ▪ Rentenir ▪ Pegadaian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pedagang</i> ▪ Arisan
	Binakarya Desa Manis Lor Kec. Jalaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BRI Unit Jalaksana</i> ▪ BRI Unit Cilimus ▪ BRI Unit Kramat Mulya ▪ <i>Bank Jabar Cilimus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KUD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pedagang</i> ▪ Warung
	Linggasari 2 Desa Lingga Indah Kec. Cilimus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BRI Unit Cilimus ▪ BPR Cilimus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KUD Gemah Ripah ▪ Pegadaian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pedagang</i> ▪ Arisan
Majalengka Ubi Jalar	Mitra Binangkit 2 Desa Tajur Kec. Cigasong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BRI Majalengka (jauh dari masyarakat tetapi P4K)</i> ▪ BPR Cigasong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KUD Mekar Tani 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arisan
	Delima 2 Desa Lampuyang Kec. Talaga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BRI Majalengka (jauh dari masyarakat tetapi P4K)</i> ▪ BRI Unit Talaga 	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arisan

* Lembaga keuangan yang *miring tebal* adalah yang digunakan satu atau lebih anggota Kelompok Tani untuk mendanai kegiatan produksi / pengolahan, disamping untuk kegiatan simpan pinjam KT.

Tabel 53 Layanan Keuangan yang Tersedia bagi Masyarakat Kelompok Tani di Propinsi Jawa Timur

	Masyarakat Kelompok Tani	Bank dan BPR	Non-Bank	Lainnya
Mojokerto, Itik	Lestari Sejahtera Desa Modopuro Kec. Mojosari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BNI Mojokerto</i> ▪ <i>BRI Unit Mojosari</i> ▪ <i>BRI Unit Wonokusumo</i> ▪ Bank Danamon ▪ BCA Mojosari ▪ Bank Syariah Mandiri ▪ Bank Jatim Mojokerto ▪ BUKOPIN ▪ BPR Mojosari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi Ternak Sejahtera ▪ Bank Kredit Desa (BKD) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengepul Pakan ▪ Arisan ▪ Rentenir
	Karya Tani Desa Pungging Kec. Pungging	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BRI Unit Pungging</i> ▪ <i>Bank Jatim Mojokerto</i> ▪ BPR Pungging 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KUD Pungging 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perantara
	Tani Mulyo Desa Mejoyo Kec. Bangsal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BRI Unit Bangsal</i> ▪ BRI Unit Mojosari ▪ BNI Mojokerto ▪ Bank Danamon ▪ BUKOPIN ▪ BCA Mojosari ▪ Bank Jatim Mojokerto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank Kredit Desa (BKD)*1 ▪ Koperasi ▪ Pegadaian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengepul Pakan ▪ Rentenir
Kediri, Mangga	Budi Daya Desa Tiron Kec. Banyakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BRI Kediri (untuk P4K)</i> ▪ BRI Unit Banyakan (10km) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Koperasi Budi Daya (berbadan hukum tapi tidak aktif, sebagai unit simpan pinjam dari Kelompok Tani)</i> 	-
	Makmur Jaya Desa Tarokan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BRI Kediri (untuk P4K)</i> ▪ <i>BRI Unit Kaliboto (6km)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KSP Bina Usaha Makmur ▪ Pegadaian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Warung ▪ Arisan

	Masyarakat Kelompok Tani	Bank dan BPR	Non-Bank	Lainnya
	Kec. Tarokan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPR Grogol (Bank Pasar) (Bank yang jauh dari desa: ▪ BNI ▪ Bank Mandiri ▪ BCA ▪ Bank Jatim Kediri) 		

* 1 BKD tidak diakui oleh UU Perbankan, maka disini dikategorikan sebagai Non-Bank.

* 2 Lembaga keuangan yang ditulis dengan **tebal miring** digunakan oleh satu atau lebih dari anggota Kelompok Tani dalam membiayai kegiatan produksi dan pengolahan, serta simpan pinjam.

Dua Kelompok Wanita Tani (Mitra Binangkit 2 dan Delima 2) untuk pengolahan ubi jalar, dan satu Kelompok Tani mangga (Budi Daya) di Kediri berlokasi di daerah pengunungan yang terpencil dan hanya memiliki akses ke satu atau dua bank dan lembaga non-bank, yaitu Unit-unit BRI atau BPR. Akan tetapi Delima 2 mengemukakan masalah transportasi, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 10,000 untuk ongkos pulang pergi ke Unit BRI terdekat, yang menghabiskan jumlah simpanan atau pinjaman mereka.

Sumber keuangan lain yang tersedia bagi para petani adalah dari program bantuan pemerintah bagi sektor pertanian, koperasi dan UMKM.

(2) Akses Keuangan menurut Tingkat Kemiskinan

Meskipun terdapat banyak layanan keuangan, dari hasil wawancara, seminar, survei tingkat kemiskinan, dan survei rumah tangga telah terungkap bahwa tidak semua layanan tersebut digunakan oleh semua tingkat masyarakat, apalagi petani dalam Kelompok Tani.

Dari survei tingkat kemiskinan, secara umum, penduduk sedang dan kaya sudah memiliki akses ke lembaga perbankan. Pengecualian pada masyarakat Bebek Jaya (Cirebon, itik), Linggasari 2 (Kuningan, ubi jalar) dan Mitra Binangkit 2 (Majalengka, ubi jalar), dimana hanya penduduk kaya yang memiliki akses ke bank. Sebaliknya, pada masyarakat Tani Mulyo (Mojokerto, itik), yang memiliki akses ke bank adalah penduduk miskin, menengah dan kaya.

Untuk kategori lain, kebanyakan penduduk miskin dan sangat miskin, hanya memiliki akses ke rentenir, arisan, pegadaian, warung dan pedagang. Bahkan pada beberapa kasus terburuk (masyarakat Linggasari 2 di Kuningan, Delima 2 di Majalengka, Lestari Sejahtera, Tani Mulyo, Karya Tani di Mojokerto, Budi Daya dan Makmur Jaya di Kediri), penduduk pada kategori sangat miskin sama sekali tidak memiliki akses ke layanan keuangan manapun.

Akses keuangan berdasarkan survei tingkat kemiskinan dirangkum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 54 Akses Keuangan berdasarkan Survei Tingkat Kemiskinan

	Masyarakat Kelompok Tani	Melarat	Miskin	Sedang	Kaya
Cirebon	Tigan Mekar	12%	28%	45%	15%
		Rentenir	Rentenir	Bank Koperasi Arisan	Bank Koperasi Arisan
	Bebek Jaya	28%	25%	38%	9%
		Simpanan Rp. 10.000,-per bulan	Arisan Rp.50.000,-per bulan	Koperasi	BRI Cirebon Utara, BPR
	Sigranala Indah	20%	45%	27%	8%
		Rentenir	Pegadaian Rentenir	BRI unit Desa BPR Arisan	BRI Unit BPR Arisan
Kuningan	Andayarasa	3%	25%	60%	12%
		Rentenir	Rentenir Pegadaian	BRI Cilimus BPR Cilimus Kelompok Tani	Bank
	Bina Karya	11%	31%	42%	15%
		Warung	Kredit	BRI	BRI
	Lingasari 2	18%	14%	58%	10%
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tabungan Kelompok	BRI Cilimus
Majalengka	Delima 2	9%	18%	65%	8%
		Tidak Ada	Tidak Ada	BRI Unit Talaga Warung	BRI
	Mitra Binangkit 2	11%	31%	42%	15%
		Warung	Kredit	Kelompok Tani	BRI Majalengka
Mojokerto	Lestari Sejahtera	4%	36%	50%	10%
		Tidak Ada	Tidak Ada atau Rentenir	Arisan Bank	Arisan Bank
	Karya Tani	14%	31%	52%	3%
		Rentenir	Rentenir Pegadaian	Arisan Kelompok Tani Bank	Bank
	Tani Mulyo	6%	29%	57%	8%
		Tidak Ada	Arisan Bank Rentenir	BRI Kelompok Tani Pedagang Pegadaian	Bank Pedagang
Kediri	Budi Daya	38%	45%	14%	3%
		Tidak Ada	Kelompok Tani	BPR	BNI, BRI
	Makmur Jaya	26%	51%	20%	3%
		Tidak Ada	Tidak Ada atau Pedagang	BRI, BPR Kelompok Tani	BRI, BCA, Bank Mandiri

3.8.2 Kondisi Layanan Keuangan

(1) Kelembagaan Keuangan

Simpanan

Tingkat suku bunga yang diberikan bagi tabungan di unit-unit BRI adalah 0 hingga 6% per tahun, dengan jumlah tabungan awal mulai dari Rp.25,000 dan persyaratan sisa minimum sebesar Rp.10,000. Sedangkan cabang-cabang BRI menentukan persyaratan sejumlah Rp.200,000 bagi tabungan awal, dan sisa minimum sebesar Rp.50,000. Sedangkan bank umum lain seperti BNI menentukan jumlah sebesar Rp.150,000 bagi tabungan awal dan Rp.10,000 bagi sisa minimum, dengan suku bunga antara 0 hingga 4% per tahun. Tabungan minimum di Bank Jabar ditentukan sebesar Rp.25,000 dan jumlah yang sama untuk sisa tabungan dengan tingkat suku bunga antara 5 hingga 7% per tahun. Penabung di koperasi yang juga merupakan anggotanya, biasanya memiliki tabungan wajib pada saat pendaftaran dan simpanan wajib bulanan mulai dari Rp.5,000. Para penabung mendapatkan pembagian hasil dari koperasi sebagai anggota.

Tabel 55 Persyaratan Tabungan

Bank	BNI	Cabang BRI	Bank Jabar	Unit BRI	Koperasi / Kelompok Tani
Jumlah Awal	Rp.150,000	Rp.200,000	Rp.25,000	Rp.25,000	mulai dari Rp.5,000 bagi simpanan wajib bulanan
Sisa Minimum	Rp.10,000	Rp.50,000	Rp.25,000	Rp.10,000	Uang pendaftaran mulai dari Rp.5,000
Suku Bunga	0-4% p.a.	rata-rata 5.5%	5-7% p.a.	0-6% p.a.	Sistem Bagi Hasil

*Selain tabungan, bank umum juga menawarkan deposito berjangka, dengan tingkat suku bunga lebih tinggi.

Pinjaman

Persyaratan pinjaman tanpa agunan yang diberikan oleh unit-unit BRI adalah sampai dengan Rp.3 juta (lebih dari jumlah tersebut harus memberikan agunan), dengan jumlah minimum sebesar Rp.0.1 juta hingga maksimum Rp.100 juta dan suku bunga antara 1.0 sampai 1.5% per bulan. Sedangkan pada cabang-cabang BRI, jumlah pinjam yang diberikan dimulai dari Rp.0.2 hingga Rp.2 triliun, dengan tingkat suku bunga 9 sampai 24% per tahun. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh BNI dimulai dari Rp.5 juta hingga Rp.350 juta, dengan tingkat suku bunga 14 sampai 22% per tahun. Sedangkan jumlah pinjaman dari Bank Jatim dimulai dari Rp.1 juta hingga Rp.350 juta, dengan tingkat suku bunga sebesar 6 sampai 22% per tahun. BPR sanggup memberikan pinjaman minimum sebesar Rp.15 juta dan maksimum Rp.50 juta, dengan suku bunga sebesar 1.95% per bulan. Sedangkan pada KSP, jumlah pinjaman minimum adalah Rp. 0.1 juta dan maksimum Rp.5 juta, dengan suku bunga sebesar 2.75% per bulan untuk maksimum 4 bulan.

Tabel 56 Persyaratan Pinjaman

Bank	BNI	Cabang BRI	Bank Jatim	Unit BRI	Koperasi
Jumlah Pinjaman	Rp.5 juta - Rp.350 juta	Rp. 0.2 juta - Rp.2 triliun	Rp.1 juta - Rp.350 juta	Rp.0.1 juta - Rp.100 juta	Rp.0.1 juta - Rp.5 juta
Jumlah Pinjaman tanpa agunan berupa sertifikat tanah atau kendaraan bermotor	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	sampai dengan Rp.3,000,000	Rp.0.1 juta - Rp.1,000,000 tergantung situasi
Suku Bunga	14-22% per tahun, menurun	9-24% per tahun, menurun	14 % per tahun, menurun	1.0 to 1.5% per bulan, flat	Bagi Hasil atau 2.75% per bulan, flat (tergantung situasi)

Pilihan Lembaga Keuangan

Keberadaan bank yang dekat dengan masyarakat tidak selalu berarti dapat membantu mengurangi kesenjangan antara permintaan dan persediaan. Bank-bank umum komersial secara umum hanya terbatas untuk melayani para nasabah yang berada dalam radius 5 km dari cabang atau unit mereka. Sedangkan BPD (Bank Jabar dan Bank Jatim) melayani nasabah mereka yang berada pada radius 10 km dari kantor kas mereka. Adanya kebijakan tersebut dan kenyataan bahwa BPD menangani lebih banyak program pemerintah, menjadi penyebab sedikitnya jumlah cabang mereka (baik kantor cabang maupun kantor kas) di daerah pedesaan, untuk mencapai jumlah cabang seperti yang telah dicapai oleh unit-unit BRI.

Dari sisi dunia perbankan, setiap bank memiliki wilayah prioritas yang berbeda, yang tidak selalu berarti pada sektor pertanian. Baru-baru ini, bank mulai meningkatkan pinjaman bagi UMKM tetapi dana masih belum cukup mengalir untuk agribisnis.

Perbankan telah melakukan analisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pinjaman kepada petani yaitu: (i) rendahnya kemampuan petani dalam bidang pemasaran, pengelolaan dana (berapa banyak pinjaman yang dapat dikelola) dan pembukuan, (ii) risiko panen, (iii) marjin keuntungan yang menurun akibat dampak kenaikan harga bahan bakar dan (iv) risiko wabah flu burung. Kendala-kendala tersebut yang menyebabkan penundaan dalam melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. Akibat merebaknya kasus flu burung, beberapa bank bahkan menghentikan pemberian dana bagi peternak ayam dan unggas yang baru.

Selain elemen-elemen tersebut diatas, Bank Jatim Cabang Kediri menganalisa kesulitan yang mereka hadapi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin di pedesaan yaitu (i) jaringan transportasi yang buruk, (ii) dukungan yang terbatas dari instansi-instansi pemerintah yang terkait kepada UMKM, dan (iii) kurangnya koordinasi diantara instansi-instansi tersebut dalam memberikan dukungan kepada UMKM.

Unit-unit BRI mengemukakan bahwa beberapa nasabah UMKM hanya baru bisa menangani pembukuan yang sederhana dan untuk tujuan aplikasi pinjaman dan administrasi, staf mereka harus membantu nasabah untuk menyiapkan data yang diperlukan bagi rencana usaha dan perkembangan usaha mereka. Masih terkait masalah

tersebut, unit-unit BRI juga menyatakan bahwa beberapa nasabah UMKM tidak paham berapa banyak pinjaman yang dapat mereka kelola.

Bank BRI memiliki jangkauan terluas melalui unit-unit BRI, dan prioritas utama mereka adalah untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah termasuk petani dan peternak. BRI juga tetap melayani nasabah perusahaan besar serta menangani program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan perkreditan pedesaan. Unit-unit BRI khususnya melihat para nasabah UMKM termasuk petani sebagai sebuah peluang baik dan siap mendanai mereka untuk berkembang lebih besar.

Demikian pula dengan Bank BUKOPIN yang memberikan prioritas bagi pelayanan kepada UMKM termasuk petani dan peternak melalui Kelompok Tani dan koperasi. Akan tetapi BUKOPIN memiliki jangkauan yang masih terbatas dan tidak memiliki banyak cabang yang dapat meliputi seluruh kabupaten.

Selain itu, ada Bank Danamon yang telah memulai memperluas jangkauannya melalui cabang-cabang Simpan Pinjam, tetapi cabang-cabang tersebut hanya menargetkan pedagang termasuk pihak yang menangani produksi pertanian, bukan petani yang memproduksi.

Bank BNI pernah memasukkan UMKM dalam salah satu prioritas mereka tetapi kemudian mengubah kebijakan mereka dan menargetkan sektor industri, perdagangan dan pelayanan serta kepada nasabah perusahaan.

Bank Jabar menangani program-program Pemerintah Daerah Propinsi, dengan memberikan pelayanan kepada pegawai negeri sipil dan petani individu. Bank Jatim juga merupakan agen dari program-program pemerintah dan melayani pegawai negeri sipil, Kelompok Tani dan nasabah dari sektor industri dan perdagangan. Bank-bank BPD tersebut bermaksud untuk mendukung petani melalui program bantuan pemerintah bagi UMKM.

BPR dan KSP/USP cenderung memberikan pinjaman kepada sektor perdagangan.

(2) Pembiayaan berdasarkan Komoditas (Siklus)

Siklus pembayaran pinjaman atau cicilan yang ditentukan oleh bank merupakan salah satu kendala besar bagi petani untuk meminjam uang dari bank, tetapi ini bukan menjadi kendala bagi pedagang (atau tengkulak dan pengepul) dan pemasok pakan. Bahkan, mereka adalah pemberi dana utama bagi para petani setelah lembaga perbankan, lembaga non perbankan dan Kelompok Tani. Diantara berbagai bentuk layanan keuangan, yang paling sering disebut adalah pedagang, dan untuk peternak itik adalah pengepul pakan.

Bentuk pembayaran yang biasa diterapkan adalah *yarnen* (petani menjual produk kepada pedagang/pemasok setelah panen, yang akan mengurangi jumlah pinjaman dan memberikan selisihnya kembali kepada petani).

Untuk kebanyakan kasus, mereka menyediakan kredit input dalam bentuk barang (in-kind) seperti pupuk, benih dan pakan atau uang tunai. Beberapa ketua Kelompok

juga adalah pedagang dan beberapa diantara mereka juga menyediakan pinjaman bagi anggota Kelompok Tani. Dalam hal ini, Kelompok Tani merupakan kendaraan terselubung bagi pedagang untuk mengumpulkan produk serta mengamankan kuantitas dan kualitas produk tersebut.

Hubungan kekuatan antara petani dan pedagang/pemasok berbeda satu sama lain. Beberapa petani melihat hal tersebut sebagai hal yang positif dengan menggunakan jaringan pemasaran pedagang/pemasok, untuk mengamankan penjualan bahkan sebelum panen. Koperasi Ternak Sumber Rejeki di Cirebon melakukan perjanjian dengan anggota Kelompok Tani Tigan Mekar dalam bidang pemasaran dan menggunakan kemampuan dan jaringan pemasaran dari anggota pedagang mereka. Hal ini, secara tidak langsung menjadi formalisasi hubungan antara pedagang dan penghasil, dan menjadikan transaksi lebih transparan dan akuntabel dengan membentuk koperasi. Petani ubi jalar Linggasari 2 bahkan memohon kredit dari pedagang sebagai solusi jangka pendek guna menanggulangi masalah kurangnya permodalan.

Sebaliknya, Sigranala Indah di Cirebon dan Tani Mulyo di Mojokerto merasa bahwa hubungan mereka dengan pemasok pakan-merangkap-pengepul sebagai sebuah ikatan, dengan menyatakan bahwa mereka dikenakan harga pasar ketika mereka mendapatkan pasokan pakan melalui kredit, dan ketika produk mereka dikumpulkan, harga pembelian menjadi lebih rendah daripada harga pasar yang berlaku.

Lembaga keuangan lain yang menerima pembayaran setelah panen termasuk koperasi, khususnya KUD dan warung yang menjual sarana produksi dan bahan makanan pokok yang lebih fleksibel dalam membiayai kebutuhan pertanian dalam hal tempo pembayaran. Lembaga-lembaga tersebut cenderung untuk menerima pembayaran setelah panen (yarnen).

Cara-cara baru yang memadukan keuangan dan pemasaran disebut sebagai skema resi gudang dan pasar lelang yang bertujuan untuk memberikan petani kondisi transaksi yang lebih baik. Skema Resi Gudang akan dimulai di Majalengka, dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada skema ini, petani produsen beras dapat meminjam uang dari lembaga keuangan dengan menggunakan beras yang disimpan di gudang sebagai agunan. Cara ini memberikan petani akses yang lebih baik ke pembiayaan, dan lembaga keuangan dapat mengamankan pinjaman mereka lebih baik dengan agunan. Dengan fasilitas gudang ini, petani dapat memilih kapan waktu untuk menjual beras, guna menghindari dampak negatif dari fluktuasi harga.

Cara yang lain adalah melalui pasar lelang yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Dinas memfasilitasi petani kecil dan usaha kecil menengah (UKM) untuk menjual komoditas dan produk mereka melalui lelang, bahkan sebelum produksi, dengan menggunakan sampel komoditas. Hingga kini lelang telah diselenggarakan sebanyak 29 kali dan telah merealisasi transaksi lebih dari Rp.700 milyar. Petani dan UKM dapat memasukkan permohonan pinjaman untuk produksi dari Bank Jatim, dimana lelang

diselenggarakan. Komoditas utama yang dikelola adalah tanaman pangan termasuk padi dan sayur mayur, tetapi untuk komoditas tertentu, semakin sedikit pembeli yang ikut serta dalam lelang.

(3) Program Departemen Pertanian

Diantara program dukungan keuangan yang dikelola oleh Departemen Pertanian (DEPTAN), ada tiga program yang menargetkan Kelompok Tani dan Kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK) bagi promosi agribisnis dan/atau peningkatan pendapatan.

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)

P4K didukung oleh dana pinjaman sebesar US\$117.5 juta yang berasal dari ADB dan IFAD, untuk membantu keuangan mikro melalui BRI kepada petani dan nelayan miskin yang tergabung dalam KPK. Proyek P4K mempunyai tiga fase yang berlangsung dari tahun 1979 hingga 2005, dan tambahan satu tahun untuk operasional darurat bagi bencana tsunami di tahun 2006. P4K mencapai tingkat pembayaran yang tinggi (Fase I: 85%, dan Fase II: 95%), dan meliputi 58,118 KPK. Akan tetapi, menjelang masa berakhirnya proyek dan setelah proyek diserahterimakan kepada pemerintah daerah kabupaten dan cabang BRI pada tahun 2006, jumlah pinjaman baru telah menurun. Demikian pula dengan anggaran bagi monitoring dan supervisi serta insentif bagi petugas penyuluh lapangan yang tidak dialokasikan sehingga menyebabkan penurunan performa. Berdasarkan hasil evaluasi sementara Fase III, total penyaluran pinjaman adalah sebesar Rp.1.3 triliun dan persentase tunggakan dan sisa pinjaman pada Desember 2005 adalah 32%¹.

Harus dicatat bahwa dibawah program P4K, kebijakan *exit strategy* bagi KPK telah dikonsepsikan yaitu untuk mengembangkan KPK menjadi Gabungan KPK dan mengubah bentuk mereka menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) termasuk anggota non-KPK dari masyarakat, kemudian LKM tersebut secara bertahap diharapkan untuk mendaftarkan diri menjadi koperasi. Tujuan dari pembentukan Gabungan adalah (i) untuk memfasilitasi layanan pemerintah, (ii) untuk mendapat kesempatan tambahan dalam mendapatkan permodalan usaha diluar kredit P4K, (iii) untuk memberikan layanan pinjaman bagi anggota dengan waktu dan jumlah yang tepat dengan menggunakan prosedur yang sederhana. Strategi P4K tersebut, kelihatannya tidak bisa menembus pemerintah daerah kabupaten.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

BLM merupakan skema dana bergulir bagi Kelompok Tani, yang diperkenalkan pada tahun 2000, dan dilanjutkan hingga sekarang dengan mengganti nama menjadi Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), yang kemudian berubah nama menjadi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMAM-PMUK). Di dalam konteks desentralisasi, program tersebut telah dimodifikasi di tahun 2002, untuk memberikan peran yang lebih besar kepada petugas penyuluh

¹ ADB (2005) *The 4th Draft of Project Completion Report: Rural Income Generation Project P4K-Phase III*, Indonesia

lapangan untuk menilai, menyeleksi, dan memonitor Kelompok Tani sasaran. Program tersebut meliputi 35,420 kelompok dari tahun 2000 sampai 2005 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.7 triliun.

Dalam pelaksanaannya BLM banyak mengalami beberapa masalah seperti (i) Kelompok Tani dibentuk tanpa persiapan hanya untuk tujuan menerima dana bantuan, (ii) dana bantuan tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada rencana usaha kelompok, dan (iii) dana bantuan tidak bergulir semestinya dalam kelompok. Guna mengatasi masalah-masalah tersebut, penyesuaian dan modifikasi telah dibuat. Apabila pinjaman Kelompok Tani yang didapat dari dana bergulir tidak dapat terbayar maka anggota Kelompok Tani akan diminta untuk melakukan pembayaran kepada rekening bank milik Dinas. Cara lain adalah dengan mengubah bentuk Kelompok Tani menjadi LKM. Akan tetapi, dari serangkaian wawancara yang dilakukan, telah terungkap bahwa staff dari pemerintah kabupaten yang terseleksi masih menghadapi kendala seperti (i) petani hanya memahami bahwa dana tersebut merupakan hibah, (ii) kurangnya pendampingan dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama yaitu untuk meningkatkan usaha agribisnis.

Lembaga Keuangan Mikro – Agribisnis (LKM-A)

Pusat Pembiayaan Pertanian Departemen Pertanian memulai program LKM-A pada tahun 2004. Program tersebut meliputi program peningkatan kemampuan (*capacity building*) seperti pelatihan, pendampingan dan bantuan permodalan bagi Embrio LKM dan LKM yang dikembangkan dari Kelompok Tani, KPK dan lembaga simpan pinjam lain di masyarakat. Ini merupakan cara dalam menggunakan dana yang dikelola oleh masyarakat yang dapat membiayai petani dan agribisnis, serta untuk memfasilitasi masyarakat menuju kemandirian dan otonomi. Hal ini merupakan langkah jelas ke depan untuk keluar dari pola pendanaan BLM/BPLM/PMUK, yang bertujuan untuk menunjukkan jalan keluar bagi Kelompok Tani untuk lulus dari bantuan pemerintah di masa depan dan dapat menghidupi diri sendiri (*self sustainable*). Dana dari Pemerintah Jepang yang dikelola oleh CF-SKR sebagian telah mendanai *pilot project* bagi LKM-A sejak akhir 2005, yang meliputi 60 Embrio LKM dan LKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Sejauh ini, sosialisasi, penyaluran dana bagi sasaran dan sistem bagi hasil dalam penggunaan dana dalam kelompok sasaran dinilai telah berjalan sesuai dengan rencana. Jumlah total Embrio LKM dan LKM dibawah program LKM-A antara tahun 2004-2006 adalah sebanyak 368 di 12 propinsi. LKM-A menggunakan keahlian dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), sebuah LSM yang membantu menumbuhkan LKM berbasis masyarakat serta kelompok usaha mikro.

3.8.3 Pengalaman Keuangan Kelompok Tani

(1) Kegiatan Kelompok yang Berbeda Tingkatan

Kebanyakan Kelompok Tani yang terseleksi telah memiliki kegiatan simpan pinjam, kecuali tiga Kelompok Tani yaitu Sigranala Indah di Cirebon, Bina Karya dan Linggasari 2 di Kuningan. Ketiga kelompok tersebut dianggap sebagai kelompok dengan koherensi

kelompok yang lemah dan ketua yang mendominasi kegiatan kelompok tersebut.

Sedangkan Kelompok Tani yang memiliki pengalaman P4K menunjukkan tingkat kedisiplinan keuangan yang tinggi dan kerja sama kelompok yang baik, contohnya adalah Delima 2 (Majalengka), Lestari Sejahtera (Mojokerto), Makmur Jaya, dan Budi Daya (Kediri).

Contoh kasus kelompok yang memiliki kegiatan kelompok yang kuat adalah Tigan Mekar (Cirebon), yang telah membentuk Koperasi Ternak Sumber Rejeki, bekerja sama dengan Kelompok Tani lain. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam serta membantu memasarkan produk anggota.

Kelompok tani ternak itik Bebek Jaya di Cirebon juga melakukan pemasaran produk mereka melalui kelompok dan berbagi hasil keuntungan diantara mereka. Kelompok Tani tersebut merupakan anggota dari KSP Syariah, yang memberikan pinjaman bagi produksi itik.

(2) Ketergantungan pada Program Pemerintah

Isu lain yang tidak boleh diabaikan adalah program bantuan pemerintah bagi petani dan pengentasan kemiskinan.

Petani, khususnya dari Kelompok Tani ternak itik Tigan Mekar di Cirebon telah menerima dukungan yang amat besar termasuk hibah dana bergulir dan pinjaman lunak dari Departemen Koperasi dan Dinas Koperasi serta bantuan teknis dari Dinas Perindustrian dan Dinas Peternakan. Selain itu Tigan Mekar juga dikatakan telah menerima dana bantuan dari program P2KP dan Bebek Jaya juga telah menerima bantuan program BLM. Sedangkan anggota kelompok Lestari Sejahtera di Mojokerto saat ini menerima pinjaman dari P4K dan menerima bantuan teknis dari BPTP Malang.

Disamping itu Delima 2 dan Mitra Binanggit 2 di Majalengka, Budi Daya dan Makmur Jaya di Kediri, juga diuntungkan dari program P4K. Linggasari 2 di Kuningan pernah menerima dana BLM pada tahun 2002²

Program bantuan non-keuangan lain seperti bantuan itik, alat dan mesin pengolahan makanan serta alat penyemprot serangga, juga membantu kelompok-kelompok tani tersebut yang pada akhirnya juga membantu mereka secara finansial.

Beberapa Kelompok Tani yang menerima bantuan dari program dengan persyaratan yang lebih ringan kelihatan telah siap untuk mandiri secara finansial, dari segala bentuk hibah atau pinjaman lunak. Dengan kata lain, agar kelompok tani dapat menerima bantuan besar, mereka dipilih untuk *showcase*. Akan tetapi bantuan yang terus menerus meningkat tersebut pastinya memicu pengharapan yang lebih besar akan program pendanaan lain dengan persyaratan lunak.

² Dana sebesar Rp.16 juta dikatakan telah dibagikan kepada seluruh anggota yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.0.8 juta. Dana tersebut dirancang untuk bergulir dengan dikenakan suku bunga sebesar 1% per bulan, bagi pinjaman selama empat bulan, dan pemasukan dari bunga akan dibagikan diantara kelompok dan anggota, masing-masing mendapat 50%. Akan tetapi, kenyataannya, dana tersebut tidak bergulir seperti yang diprogramkan.

Sebaliknya, Kelompok Tani yang memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman sama sekali dalam menerima program bantuan pemerintah lebih menunjukkan perilaku yang berorientasi bisnis.

(3) Pengalaman Menabung

Kebanyakan orang menabung adalah untuk berbagai tujuan seperti produksi komoditas, mengumpulkan uang untuk pembayaran pinjaman, kebutuhan keluarga termasuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari termasuk alasan religius seperti tabungan naik haji. Bagi mereka yang menjawab belum pernah menabung, pada kebanyakan kasus alasan mengapa mereka tidak menabung adalah karena tidak ada surplus untuk ditabung. Kelompok Tani tersebut berpendapat bahwa apabila mereka memiliki surplus, pasti mereka sudah menabung, untuk keperluan pendidikan dan membangun rumah. Sebagian kecil menjawab bahwa mereka tidak melihat adanya keharusan untuk menabung.

Ketika orang menabung, biasanya mereka akan pergi ke bank dan koperasi terdekat. Keamanan, jarak yang dekat dan penawaran kondisi yang fleksibel merupakan alasan mengapa orang menabung di bank dan koperasi tertentu. Adapula yang menabung dalam bentuk arisan karena jaraknya yang dekat dan untuk memupuk rasa solidaritas.

Beberapa ada pula yang membeli sarana produksi ketika ada surplus, dan itu merupakan cara mereka untuk menabung, contohnya, beberapa peternak itik menabung dalam bentuk itik dan beras.

Mengenai nominal tunai dari jumlah tabungan, peternak itik **Cirebon** menabung sebesar Rp.2.5 hingga Rp.8.4 juta (ada satu responden yang menjawab Rp.30 juta), untuk tujuan akumulasi modal bagi produksi itik. Sebaliknya, peternak itik **Mojokerto** menabung antara Rp.1 sampai Rp.25 juta, yang kebanyakan merupakan anggota Kelompok Wanita Tani Lestari Sejahtera, yang menabung karena berbagai alasan, bukan hanya untuk produksi itik tetapi juga untuk masa depan keluarga, akumulasi uang untuk pembayaran cicilan pinjaman dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Para penabung asal **Kuningan** menabung sejumlah Rp.0.5 hingga Rp.6 juta, bukan hanya untuk budidaya ubi jalar, tetapi juga untuk pendidikan anak-anak mereka, kebutuhan mendadak dan kebutuhan keluarga sehari-hari lainnya. Kelompok wanita Tani dari **Majalengka** yang mengolah ubi jalar dapat menabung antara Rp.0.05 hingga Rp.0.7 juta untuk pendidikan, kecuali untuk simpanan wajib program P4K.

Tidak banyak responden dari petani mangga di **Kediri** yang menjawab bahwa mereka menabung, kecuali bagi beberapa anggota yang menabung sekitar Rp.3 sampai Rp.5 juta untuk perbaikan rumah mereka. Simpanan wajib P4K tidak tercermin dalam jawaban survei rumah tangga.

(4) Akses Pinjaman yang Berbeda diantara Anggota

Mereka yang meminjam uang dari bank beralasan karena jaraknya yang dekat dan kesanggupan untuk memberikan agunan, yang biasanya berupa sertifikat tanah dan

sertifikat kendaraan bermotor. Sedangkan bagi mereka yang meminjam dari koperasi beralasan karena kemudahan proses aplikasi.

Kebanyakan petani meminjam dari unit-unit BRI, Kelompok Tani dan koperasi dimana mereka menjadi anggotanya, sebagian juga meminjam dari ketua kelompok. Pinjaman dari lembaga perbankan, apabila bukan dari unit-unit BRI, adalah dari bank-bank lain yang tidak harus dekat dengan masyarakat, tetapi ini banyak terjadi kepada ketua kelompok merangkap pedagang, anggota merangkap pedagang dan pemilik tanah.

Di dalam Kelompok Tani, nasabah bank kebanyakan merupakan para ketua kelompok atau beberapa anggota kelompok yang juga merangkap sebagai pedagang. Di beberapa kasus, ketua-ketua Kelompok Tani (beberapa diantaranya adalah pedagang) meminjam uang dari bank dan meminjamkannya kembali kepada anggota kelompok mereka.

(5) Karakteristik Penggunaan Pinjaman berdasarkan Komoditas

Berdasarkan komoditas, peternak itik menggunakan layanan bank lebih banyak daripada petani dan pengolah mangga dan ubi jalar, kecuali anggota Kelompok Tani yang berpartisipasi dalam program P4K.

Kebanyakan responden peternak **itik Cirebon** memiliki pengalaman meminjam dari BRI atau KSP Syariah, dan sisa pinjaman mereka berkisar antara Rp.0.5 sampai Rp.5 juta, untuk tujuan produksi dan perdagangan itik. Responden peternak **itik Lestari Sejahtera** di **Mojokerto** meminjam uang antara Rp.3 hingga Rp.20 juta dari BRI, dan Kelompok Tani lain dengan jumlah sebesar Rp.0.1 hingga Rp.5 juta dari dalam kelompok, untuk produksi itik.

Pinjaman dari pedagang sepertinya menjadi sebuah fenomena khususnya bagi produksi itik dan ubi jalar. Hal ini tidak muncul dalam survei rumah tangga tetapi dalam wawancara dengan para pedagang. Kesan yang didapat adalah bahwa petani yang tidak tergabung dalam Kelompok Tani formal lebih terorganisir oleh pedagang guna mengamankan stabilitas kuantitas dan kualitas dari produksi komoditas tersebut.

Responden petani **ubi jalar di Kuningan** apabila akan meminjam, kebanyakan adalah dari BRI dengan alasan yang berbeda-beda, bukan hanya untuk produksi ubi jalar tetapi juga untuk sumber pendapatan mereka yang lain, serta ada pula yang menggunakan pinjaman tersebut untuk dana pendidikan anak-anak mereka. Sisa pinjaman tersebut berkisar antara Rp.0.4 hingga Rp.6 juta, kecuali ada satu orang yang pinjamannya masih tersisa Rp.16 juta.

Di **Majalengka**, baik Mitra Binangkit 2 dan Delima 2 adalah kelompok P4K dibawah cabang BRI. Beberapa orang responden dari Delima 2 meminjam dari kelompok dan ketua kelompok. Sisa pinjaman mereka sejumlah Rp.0.3 sampai Rp.1.0 juta. Tujuan mereka mengambil pinjaman kebanyakan adalah untuk berdagang, ada juga yang untuk pendidikan.

Beberapa orang anggota wanita dari dua Kelompok Tani **mangga** di **Kediri** juga bergabung dalam program P4K. Responden dari kedua Kelompok Tani tersebut

mendapat pinjaman dari BRI. Bagi responden Budi Daya, pinjaman didapat dari koperasi yang ada di dalam kelompok, bagi sarana produksi pertanian (bukan mangga) dan kebutuhan sehari-sehari. Sisa pinjaman mereka sekarang adalah antara Rp. 0.05 hingga Rp. 0.2 juta. Responden dari Makmur Jaya meminjam dari BRI untuk keperluan produksi dan penjualan mangga.

(6) Hubungan Keuangan di dalam dan di luar Kelompok Tani

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Kelompok Tani menggunakan bank untuk membiayai kegiatan produksi dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan, biasanya dilakukan hanya oleh beberapa anggota Kelompok Tani, atau anggota yang berpartisipasi dalam program P4K. Sedangkan anggota-anggota yang lain bergantung kepada (i) simpan pinjam di dalam Kelompok Tani atau Koperasi, (ii) program bantuan pemerintah yang diberikan kepada Kelompok Tani atau Koperasi, (iii) pinjaman dari ketua yang mendapat pinjaman dari bank, dan /atau (iv) pedagang.

3.8.4 Kesenjangan

Saat ini bank telah mulai meningkatkan pembiayaan terhadap UMKM dan memberikan pola peminjaman kembali (*re-lending*) kepada LKM. Akan tetapi uang masih belum cukup mengalir kepada UMKM agribisnis dan masih banyak petani yang tidak memiliki akses kepada LKM yang terdaftar, yang mendapatkan dana *re-lending* dari bank umum.

Secara singkat, Kelompok Tani yang terseleksi telah memiliki akses ke sumber-sumber keuangan sampai pada tingkat tertentu, tetapi bukan dengan kondisi persyaratan yang mereka inginkan. Jenis lembaga keuangan yang dapat mereka akses juga berbeda-beda, kebanyakan disebabkan oleh faktor-faktor diluar kekuasaan mereka seperti keadaan geografis masyarakat dan struktur keuntungan dari komoditas yang dikembangkan. Beberapa diantara Kelompok Tani sudah memiliki akses ke bank, untuk menabung dan meminjam modal kerja serta meminjam modal investasi kecil sekitar Rp.5 juta. Beberapa sudah memiliki akses ke koperasi, menabung dan meminjam terutama untuk modal kerja sebesar Rp.1 juta tanpa agunan. Sedangkan sisanya menggunakan layanan Kelompok Tani untuk menabung dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.0.5 juta tanpa agunan, dan ke warung dan perseorangan (ketua kelompok, pedagang, pemasok pakan). Untuk petani lain yang tidak memiliki akses sama sekali ke bank karena lokasi mereka di daerah terpencil, saat ini mereka mendapatkan bantuan dari skema P4K.

Situasi-situasi tersebut diatas muncul akibat kesenjangan antara permintaan dan persediaan sebagai berikut:

(1) Minimnya Akses Fisik

Bagi Kelompok Tani yang berada di daerah terpencil, seperti yang berada di Majalengka dan Kediri, akses fisik kepada lembaga keuangan menjadi sulit. Hubungan dengan BRI akan terputus setelah siklus pinjaman dari P4K berakhir, karena tidak ada layanan keuangan yang tersedia pada lokasi yang dekat dengan masyarakat.

(2) Kebutuhan Keuangan Masyarakat Pedesaan

Bagi anggota masyarakat dimana Kelompok Tani yang terseleksi berada, penduduk dengan kategori melarat dan miskin, masih belum memiliki akses ke layanan keuangan manapun, atau telah memiliki akses hanya ke satu lembaga keuangan tidak resmi seperti rentenir dan pedagang. Tetapi mereka memiliki kemauan untuk menabung.

(3) Kebutuhan Keuangan bagi Agribisnis

Anggota Kelompok Tani, walaupun telah memiliki akses pinjaman dari bank, koperasi, Kelompok Tani, dan layanan keuangan lainnya, masih merasa bahwa modal produksi mereka tidak mencukupi.

Peternak itik, yang menginginkan permodalan lebih besar, memiliki keinginan untuk menggunakannya bagi peningkatan jumlah itik dan menginvestasikannya pada mesin penetas, menyewa lahan yang lebih besar bagi pemeliharaan itik dan membangun lebih banyak kandang itik. Kelompok ubi jalar di Kuningan juga menginginkan lebih banyak permodalan untuk pembelian sarana produksi pertanian dan untuk menguasai pemasaran dan harga. Kelompok ubi jalar di Majalengka menginginkan lebih banyak pendanaan bagi modernisasi peralatan pengolahan dan peningkatan pengemasan produk mereka. Kelompok mangga di Kediri tidak mengemukakan masalah mengenai kurangnya permodalan seperti yang dikemukakan di contoh kabupaten lainnya. Masalah utama mereka ada pada masalah teknis dalam produksi mangga dan fluktuasi harga.

(4) Tidak Memenuhi Persyaratan Pinjaman

Bagi petani yang tidak mau meminjam uang, mereka memiliki alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, ketakutan tidak dapat menepati jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Kedua, tidak memiliki agunan, baik dalam bentuk fisik maupun dokumen kepemilikan (sebagai contoh, dokumen bukan dalam bentuk sertifikat melainkan surat³). Petani juga merasa bahwa rasio lindungan agunan (*collateral coverage ration*) yang ditetapkan oleh bank terlalu ketat. Ketiga, mereka merasa bahwa usaha mereka tidak berjalan baik untuk membayar bunga yang tinggi. Sedangkan petani lain tidak merasa mendapatkan pinjaman adalah sesuatu keharusan.

Rata-rata jumlah pinjaman bagi pertanian yang diberikan oleh unit-unit BRI yang dikunjungi adalah kira-kira antara Rp.5 sampai Rp.6 juta, yaitu sesuai dengan jumlah pinjaman maksimum yang didapat oleh petani sasaran, kecuali mereka yang memiliki lahan lebih besar dan para pedagang yang bisa mendapatkan pinjaman sebesar puluhan juta rupiah. Pengecualian untuk persyaratan agunan yang diberikan oleh unit BRI adalah untuk pinjaman sampai dengan Rp.3 juta dan dari BPD sebesar Rp.1 juta. Jumlah pinjaman tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat diberikan koperasi kepada petani anggotanya. Kelompok P4K bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan Rp. 2 juta dengan memberikan 10% tabungan terbekukan yang wajib disimpan di bank.

³ Pengurusan kepemilikan tanah dari bentuk surat menjadi sertifikat membutuhkan biaya Rp.1 juta dan melalui proses yang panjang.

(5) Ketergantungan terhadap Pinjaman Pedagang

Petani yang tidak memiliki sumber keuangan yang memadai selain komoditas yang mereka miliki, cenderung untuk memilih meminjam dari pedagang untuk membeli sarana produksi pertanian mereka dan untuk memenuhi kebutuhan uang yang mendadak, dengan menggunakan komoditas sebagai agunan tidak resmi. Oleh sebab itu, kebanyakan petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar dan tidak mendapatkan kondisi perjanjian yang menguntungkan. Disamping itu, ini juga disebabkan oleh minimnya kemampuan pemasaran yang dimiliki oleh petani sehingga menyebabkan ketergantungan mereka kepada para pedagang untuk menjual hasil komoditas mereka. Dalam hal ini pinjaman dari pedagang memiliki konotasi yang positif, petani tidak mungkin gagal menjual komoditas melalui pedagang. Guna menyikapi masalah tersebut, petani harus melakukan salah satu saran berikut ini (i) mengembangkan sumber keuangan dari hasil akumulasi aset, (ii) meningkatkan kekuatan tawar menawar melalui kegiatan kolektif, atau (iii) membangun kemampuan pemasaran.

(6) Batas Jumlah Pinjaman yang diberikan oleh KT / Koperasi

Masalah bagi Koperasi dan Kelompok Tani sebagai organisasi keanggotaan adalah, mereka dengan mudah mencapai batas jumlah pinjaman, karena sumber dana utama bagi pemberian pinjaman kepada anggota adalah berasal dari simpanan internal. Jumlah pinjaman yang biasa diberikan dalam Kelompok Tani adalah sebesar Rp.0.5 juta, dan sebagai contoh, pinjaman maksimum yang diberikan kepada anggota Bebek Jaya dari KSP Syariah adalah ditentukan sebesar Rp.1 juta, sedangkan peternak itik membutuhkan dana pinjaman untuk modal lebih dari Rp.10 juta. Apabila modal yang dibutuhkan tersebut tidak mendapat dukungan dari lembaga keuangan lainnya, atau melalui program bantuan pemerintah seperti hibah (yang semestinya dimaksudkan untuk bergulir di dalam kelompok) dan pinjaman lunak, maka pinjaman yang diberikan kepada anggota akan terus membentur batas jumlah pinjaman. Guna mengatasi masalah tersebut, maka organisasi keanggotaan harus menambah jumlah anggota mereka dan/atau meningkatkan jumlah simpanan anggota.